



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2027.

Semarang, 18 Februari 2026
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

ENDI FAIZ EFFENDI, S.PI, MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 199603 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 juga disusun dengan memperhatikan evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 akan fokus pada pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung daya saing sumber daya manusia. Renja 2027 Dinas Kelautan dan Perikanan diselaraskan dengan Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, RENSTRA Tahun 2025-2029, RPJMN 2025-2029.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 diarahkan pada kebijakan, **“Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”**, dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
- b. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan; dan
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Prioritas daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah sesuai RPJMD, dan juga dalam rangka untuk membangun sinergi, keselarasan, kerja sama, kolaborasi, dan sinkronisasi antarsektor agar pembangunan dapat berjalan dengan maksimal.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2027;
- 2. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Gambar 1.1

Hubungan Rencana Kerja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 4);
23. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor S/000.7.2.5/78/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 Dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 ini dimaksudkan untuk sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program maupun anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, adalah :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran program kegiatan Tahun 2027 yang tertuang dalam arahan kebijakan Dinas berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
- b. Merumuskan rencana program dan kegiatan prioritas Dinas beserta indikasi, pagu anggaran dan target indikator kinerja Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
- 4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027
- 4.3 Dukungan Terhadap 136 Program Daerah

BAB V P E N U T U P

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun kedepan mengacu pada sasaran strategis seperti yang sudah ditentukan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis tersebut meliputi :

1. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator sasaran : produksi perikanan (ton/tahun);
2. Meningkatnya produksi garam, dengan indikator sasaran : produksi garam (ton/tahun);
3. Meningkatnya angka konsumsi ikan, dengan indikator sasaran: angka konsumsi ikan (angka);
4. Meningkatnya nilai tukar nelayan, dengan indikator sasaran : nilai tukar nelayan (angka);
5. Meningkatnya nilai tukar pembudidaya ikan indikator sasaran : nilai tukar pembudidaya ikan (angka);
6. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan partisipatif dengan indikator sasaran : Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%);
7. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran : Indeks kepuasan masyarakat (angka);
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan Risiko Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran : Indeks manajemen risiko (angka).

Dalam rangka mewujudkan tercapainya 8 (delapan) sasaran strategis yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang didalamnya berisi beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Guna memastikan agar capaian kinerja dan pelayanan tetap berjalan optimal sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dituangkan pada Tabel.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pilihan										
	Urusan Kelautan dan Perikanan										
		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan	%	n/a	1,5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	n/a	87	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Produksi Perikanan	Ton	2.859.106	855.734,92	927.350	968.353,80	104,42	968.353,80	952.718	100
		Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ Tahun	41,74	38,83	40,12	40,12	100	40,12	40,92	100
		Produksi Garam	Ton	403.920	595.984,41	133.320	629.952,95	472,51	629.952,95	134.640	100
		Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Angka	1	n/a	1	1	100	1	1,1	100
		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	108,05	n/a	107,78	104,82	97,25	104,82	108,05	100
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	106	n/a	105	101,4	96,57	101,4	105,5	100
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Angka	112	n/a	110	107,35	97,59	107,35	110,5	100
		Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	0,79	n/a	0,75	0,75	100	0,75	0,79	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	%	64	n/a	62	62	100	62	63	100
		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83	n/a	82	82	100	82	83	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	n/a	83	90,75	109,33	90,75	84	100
		Indeks Manajemen Risiko	Angka	84	n/a	82	2,69	3,28	2,69	2,6	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										
		Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	n/a	5	3,7	74	3,7	5	100
		Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108,54	n/a	108,27	101,41	93,66	101,41	108,54	100
		Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	50	n/a	44,44	44,44	100	44,44	50	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	72	100	72	72	100	72	72	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	72,72	100	72,72	72,72	100	72,72	72,72	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81,82	90,91	81,82	90,91	111,11	90,91	81,82	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor	%	70	100	70	70	100	70	70	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	71,72	81,82	62,62	72,72	116,13	72,72	71,72	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	81	100	81	81	100	81	81	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	72,72	63,64	63,63	90,9	142,86	90,9	72,72	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending	%	63	100	63	63	100	63	63	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	100	72	72	100	72	72	100
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil										
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	n/a	320.586,61	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan	Orang	10.000	n/a	10.100	10.100	100	10.100	4.100	100
		Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	Unit	4	n/a	3	3	100	3	4	100
		Jumlah produksi perikanan yang didaratkan	Ton	343.717,50	n/a	327.350	410.642	125,44	410.642	343.717,50	100
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap	Dokumen	n/a	452	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Unit	280	n/a	240	525	218,75	525	280	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan	%	0,25	n/a	0,25	0	0	0	0,25	100
		Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya	Lokasi	1	n/a	1	2	100	2	1	100
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi										
		Jumlah Pelayanan	Jenis	n/a	11	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	%		100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Jenis		8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	%		85,45	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	%		50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Tawang Kelas B)	%		40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Morodemak Kelas A)	%		50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Jenis		11	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Jenis	n/a	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	%	n/a	40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Lohgending Kelas A)	%	n/a	50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Larangan Kelas B)	%	n/a	40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Larangan Kelas B)	Jenis	n/a	11	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Tegalsari Kelas A	Jenis	9	n/a	9	9	100	9	9	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Tegalsari Kelas A	Jenis	7	n/a	7	7	100	7	7	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Tegalsari Kelas A	%	33	n/a	16	16	100	16	33	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Tegalsari Kelas A	%	70	n/a	60	60	100	60	70	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Tegalsari Kelas A	%	90	n/a	85	85	100	85	90	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Tegalsari Kelas A	%	30	n/a	15	15	100	15	30	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Asemdayong Kelas B	Jenis	5	n/a	5	5	100	5	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Asemdayong Kelas B	Jenis	5	n/a	5	5	100	5	5	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Asemdayong Kelas B	%	20	n/a	14	14,58	102	14,58	20	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketampilannya PPP Asemdayong Kelas B	%	30	n/a	20	20	100	20	30	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Wonokerto Kelas B	Jenis	7	n/a	7	7	100	7	7	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Wonokerto Kelas B	%	28	n/a	14	14	100	14	28	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Wonokerto Kelas B	%	42	n/a	39	57,69	147,92	57,69	42	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Wonokerto Kelas B	%	16,22	n/a	5	44,32	300	44,32	16,22	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketampilannya PPP Wonokerto Kelas B	%	25	n/a	9	81,82	300	81,82	25	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Klidanglor Kelas A	Jenis	9	n/a	9	9	100	9	9	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Klidanglor Kelas A	Jenis	6	n/a	6	6	100	6	6	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Klidanglor Kelas A	%	10	n/a	5	5	100	5	10	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Klidanglor Kelas A	%	60	n/a	50	100	200	100	60	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Klidanglor Kelas A	%	10	n/a	5	5	100	5	10	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Klidanglor Kelas A	%	10	n/a	5	50	300	50	10	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Tawang Kelas B	%	25	n/a	18	36	200	36	25	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Tawang Kelas B	%	7	n/a	6	9	150	9	7	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Tawang Kelas B	%	50	n/a	46	47	102,17	47	50	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Tawang Kelas B	%	20	n/a	20	20	100	20	20	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Tawang Kelas B	Jenis	7	n/a	6	6	100	6	7	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Tawang Kelas B	Jenis	7	n/a	6	7	116,67	7	7	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Morodemak Kelas A	Jenis	7	n/a	6	6	100	6	7	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Morodemak Kelas A	Jenis	5	n/a	4	4	100	4	5	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Morodemak Kelas A	%	57	n/a	42	42	100	42	57	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Morodemak Kelas A	%	66	n/a	55	55	100	55	66	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Morodemak Kelas A	%	14	n/a	7	14	200	14	14	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Bajomulyo Kelas A	%	14	n/a	6	6	100	6	14	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Bajomulyo Kelas A	%	90	n/a	85	100	117,65	100	90	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Bajomulyo Kelas A	%	68	n/a	65	65	100	65	68	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Bajomulyo Kelas A	%	43	n/a	29	29	100	29	43	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Bajomulyo Kelas A	Jenis	7	n/a	7	7	100	7	7	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Bajomulyo Kelas A	Jenis	9	n/a	9	9	100	9	9	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Tasikagung Kelas A	Jenis	7	n/a	6	6	100	6	7	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Tasikagung Kelas A	Jenis	6	n/a	5	5	100	5	6	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Tasikagung Kelas A	%	57,14	n/a	42,86	42,86	100	42,86	57,14	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Tasikagung Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Tasikagung Kelas A	%	35	n/a	25	85,34	300	85,34	35	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Tasikagung Kelas A	%	7,4	n/a	3,7	4	108,11	4	7,4	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Karimunjawa Kelas B	Jenis	5	n/a	5	6	120	6	5	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Karimunjawa Kelas B	Jenis	3	n/a	3	4	133,33	4	3	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Karimunjawa Kelas B	%	50	n/a	40	40	100	40	50	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Karimunjawa Kelas B	%	60	n/a	50	50	100	50	60	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Karimunjawa Kelas B	%	60	n/a	50	50	100	50	60	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Karimunjawa Kelas B	%	70	n/a	65	65	100	65	70	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Lohgending Kelas A	Jenis	5	n/a	5	5	100	5	5	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Lohgending Kelas A	%	60	n/a	50	50	100	50	60	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Lohgending Kelas A	Jenis	7	n/a	7	7	100	7	7	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Lohgending Kelas A	%	54	n/a	54	54	100	54	54	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Larangan Kelas B	Jenis		n/a	5	5	100	5		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Larangan Kelas B	Jenis		n/a	3	3	100	3		
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Larangan Kelas B	%	20	n/a	20	20	100	20	20	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Larangan Kelas B	%	45	n/a	40	40	100	40	45	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Larangan Kelas B	%	9	n/a	7	20	285,71	20	9	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Larangan Kelas B	%	32	n/a	30	30	100	30	32	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										
		Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase peningkatan produksi benih	%	n/a	25	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya	%	n/a	0,4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	n/a	5	5	100	5	5	100
		Produksi perikanan budidaya	Ton	609.000	n/a	600.000	554.810,13	92,47	554.810,13	609.000	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111,55	n/a	111,27	131,6	118,27	131,6	111,55	100
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya	Unit	n/a	26	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha	Orang	127	n/a	117	127	108,55	127	127	100
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut										
		Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (BLPKIL Kelas A)	Kasus	n/a	300	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (BLPKIL Kelas A)	%	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (BBIAPL Kelas A)	%	n/a	60	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (BBIAPL Kelas A)	%	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	n/a	535.148,31	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Pengguna Layanan Pengujian	%	20	n/a	20	20	100	20	20	100
		Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkatkan Kompetensinya	%	29	n/a	29	29	100	29	29	100
		Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Kasus	350	n/a	350	362	103,43	362	350	100
		Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut	Jenis	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	3	n/a	2	2	100	2	3	100
		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkatkan Keterampilannya	Orang	60	n/a	60	60	100	60	60	100
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat										
		Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Lokasi	9	n/a	9	9	100	9	9	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL										
		Persentase peningkatan produksi garam	%	n/a	37,99	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase produksi garam	%	2	n/a	1	1	100	1	2	100
		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	n/a	30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	17,6	5	5	100	5	5	100
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)	%	n/a	38,63	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Barat)	%	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)	%	n/a	38,99	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Selatan)	%	n/a	1,08	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)	%	n/a	30,43	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Timur)	%	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	4	n/a	3,7	3,7	100	3,7	4	100
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2,93	n/a	1,39	2,56	184,17	2,56	2,93	100
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	7,8	n/a	3,7	3,7	100	3,7	7,8	100
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil										
		Jumlah KUGAR terakses sarana prasarana peningkatan produksi garam	Kelompok	n/a	12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah perempuan dan taruna	Kelompok	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		pesisir yang berkembang skala usaha nya									
		Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Kelompok	5	n/a	5	8	160	8	5	100
		Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya	Kelompok	25	n/a	25	55	220	55	25	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya	Unit	5	n/a	5	5	100	5	5	100
		Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	4	n/a	4	5	125	5	4	100
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Lokasi	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Barat)	Ha	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Timur)	Ha	n/a	3,95	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Selatan)	Ha	n/a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL	Unit	5	n/a	5	5	100	5	5	100
		Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi CDK Wilayah Barat	Ha	2,2	n/a	2	2	100	2	2,2	100
		Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola CDK Wilayah Barat	Lokasi	2	n/a	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi CDK Wilayah Selatan	Ha	2,2	n/a	2	3,68	184	3,68	2,2	100
		Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi CDK Wilayah Timur	Ha	2,2	n/a	2	2	100	2	2,2	100
		Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola CDK Wilayah Timur	Lokasi	2	n/a	2	2	100	2	2	100
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Barat)	Dokumen	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Timur)	Dokumen	n/a	12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Selatan)	Dokumen	n/a	13	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu CDK Wilayah Barat	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu CDK Wilayah Selatan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu CDK Wilayah Timur	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										
		Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan	%	n/a	72	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp	%	n/a	45	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	%	n/a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah	%	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah	%	n/a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang- undangan	%	70	n/a	70	73	104,29	73	70	100
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	n/a	2	2	100	2	2	100
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	n/a	61	61	100	61	61	100
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2	n/a	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	n/a	61	64,5	105,74	64,5	61	100
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	n/a	2	2	100	2	2	100
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	n/a	61	61	100	61	61	100
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										
		Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	n/a	271	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	Kelompok	n/a	45	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Barat)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Timur)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Selatan)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil	%	100	n/a	100	120	120	120	100	100
		Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	18	n/a	18	46	255,56	46	18	100
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kelompok	35	n/a	35	40	114,29	40	35	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil CDK Wilayah Barat	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan CDK Wilayah Barat	Kali	10	n/a	10	10	100	10	7	100
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil CDK Wilayah Selatan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan CDK Wilayah Selatan	Kali	10	n/a	10	10	100	10	10	100
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil CDK Wilayah Timur	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan CDK Wilayah Timur	Kali	10	n/a	10	10	100	10	10	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum	Kasus	n/a	54	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (CDK Wilayah Barat)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (CDK Wilayah Timur)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (CDK Wilayah Selatan)	Kasus	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	180	n/a	180	190	105,56	190	180	100
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya CDK Wilayah Barat									
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya CDK Wilayah Selatan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya CDK Wilayah Timur	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										
		Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	n/a	37,61	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	%	n/a	72,9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah produksi olahan ikan	Ton	160.800	n/a	160.000	299.838,50	187,4	299.838,50	160.800	100
		Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	n/a	4	4	100	4	4	100
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Unit	n/a	9.524	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar	Dokumen	n/a	9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata	%	20	n/a	20	20,69	103,45	20,69	20	100
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										
		Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan	Ton	n/a	78.399,21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Perangkat Daerah (PPP Tegalsari Kelas A)									
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Perangkat Daerah (PPP Asemdayong Kelas B)									
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Wonokerto Kelas B)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Klidanglor Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tawang Kelas B)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Morodemak Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Bajomulyo Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tasikagung Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Karimunjawa Kelas B)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Lohgending Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BLPKIL Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BBIAPL Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Larangan Kelas B)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPMHP Kelas A)	%	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Tegalsari Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Asemdayong Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Wonokerto Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Klidanglor Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Tawang Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Morodemak Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Bajomulyo Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Tasikagung Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Karimunjava Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Lohgending Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BLPKIL Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BBIAPL Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Larangan Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK Wilayah Barat	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK Wilayah Selatan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK Wilayah Timur	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPMHP Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jenis	1	n/a	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jenis	1	n/a	1	1	100	1	1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)									
		Jumlah laporan pelaksanaan	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		administrasi umum Perangkat Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)									
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT BPMHP Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Tegalsari Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Asemdayong Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Wonokerto Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Klidanglor Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Tawang Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Morodemak Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Bajomulyo Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Tasikagung Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Karimunjawa Kelas B	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Lohgending Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BLPKIL Kelas A	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dokumen	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	n/a	1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	0	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)									
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BPMHP Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BPMHP Kelas A)	Dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Tegalsari Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Asemdayong Kelas B	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Wonokerto Kelas B	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Klidanglor Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Tawang Kelas B	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal PPP Morodemak Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Bajomulyo Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Tasikagung Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Karimunjawa Kelas B	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Lohgending Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BLPKIL Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BBIAPL Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Larangan Kelas B	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Keg iatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK Wilayah Barat	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK Wilayah Selatan	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK Wilayah Timur	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPMHP Kelas A	Unit	1	n/a	1	1	100	1	1	100

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Program - program yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2025-2029. Adapun program-program yang ditetapkan meliputi :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dalam mengukur capaian kinerja ke 6 (enam) Program yang ditetapkan kemudian ditentukan indikator utama pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a) Persentase produksi perikanan tangkap
 - b) Indeks harga yang diterima oleh nelayan
 - c) Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya
 - d) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPN Tegalsari
 - e) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong
 - f) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto
 - g) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor
 - h) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang
 - i) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak
 - j) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Juwana
 - k) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPN Tasikagung
 - l) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa
 - m) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending
 - n) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a) Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan
 - b) Persentase produksi ikan konsumsi air laut
 - c) Produksi perikanan budidaya
 - d) Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - a) Persentase produksi garam
 - b) Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif
 - c) Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat
 - d) Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan
 - e) Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur

4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a) Jumlah produksi olahan ikan
 - b) Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
 - a) Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan
 - b) Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat
 - c) Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat
 - d) Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan
 - e) Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan
 - f) Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur
 - g) Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a) Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah
 - b) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
 - c) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPN Tegalsari Kelas A)
 - d) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Asemdayong Kelas B)
 - e) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Wonokerto Kelas B)
 - f) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Klidanglor Kelas A)
 - g) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Tawang Kelas B)
 - h) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Morodemak Kelas A)
 - i) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Juwana Kelas A)
 - j) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPN Tasikagung Kelas A)
 - k) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Karimunjawa Kelas B)
 - l) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Lohgending Kelas A)
 - m) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BKIKHP Kelas A)

- n) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BPPB Kelas A)
- o) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Larangan Kelas B)
- p) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A)
- q) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A)
- r) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A)

Target indikator Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dan tahun 2026 serta realisasi indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 serta proyeksi capaian tahun 2026 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2025	Proyeksi Capaian Tahun 2026	Catatan Analisis
				2025	2026			
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
	Persentase produksi perikanan tangkap			5	5	74	100	
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan			108,27	108,54	93,66	100	
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya			44,44	50	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari			72	72	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong			72,72	72,72	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto			81,82	81,82	111,11	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor			70	70	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang			62,62	71,72	116,13	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak			81	81	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa			63,63	72,72	142,86	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending			63	63	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan			72	72	100	100	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan			100	100	100	100	
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut			5	5	100	5	
	Produksi perikanan budidaya			554.810,13	609.000	92,47	609.000	
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya			131,6	111,55	118,27	111,55	
III	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
	Persentase produksi garam			3	2	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2025	Proyeksi Capaian Tahun 2026	Catatan Analisis
				2025	2026			
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif			n/a	5	100	100	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat			4,5	4	100	100	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan			4,61	2,93	184,17	100	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur			12,3	7,8	100	100	
IV	PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan			70	70	104,29	100	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat			2	2	100	100	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat			61	61	100	100	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan			2	2	100	100	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan			61	61	105,74	100	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur			2	2	100	100	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur			61	61	100	100	
V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
	Jumlah produksi olahan ikan			160.000	160.800	187,4	100	
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan			4	4	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2025	Proyeksi Capaian Tahun 2026	Catatan Analisis
				2025	2026			
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Tegalsari Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Asemdayong Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Wonokerto Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Klidanglor Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Tawang Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Morodemak Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Bajomulyo Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Tasikagung Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Karimunjawa Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BLPKIL Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BLPKIL Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BBIAPL Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (PPP Larangan Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan			100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2025	Proyeksi Capaian Tahun 2026	Catatan Analisis
				2025	2026			
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Cabang Dinas Kelautan			100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BPMHP Kelas A)			100	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, maka kami uraikan sebagai berikut:

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala pembangunan sub sektor kelautan dan perikanan antara lain :

1. Belum optimalnya produksi perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, budidaya, dan garam. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan sarana prasarana penangkapan yang belum memadai dan kondisi pelabuhan perikanan yang perlu pengembangan baik dari sisi fasilitas maupun tata kelolanya, sedangkan dari sisi perikanan budidaya, selain dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, juga disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas induk. Sementara pada produksi garam, juga masih terdapat luasan tambak garam yang belum menerapkan teknologi, sehingga proses produksi garam masih tergantung cuaca. Selain itu, pada ketiganya, baik perikanan tangkap, budidaya, dan garam, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM untuk mendukung produksi perikanan.

2. Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berkaitan erat dengan produk perikanan yang mudah busuk (*perishable*) sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai standar dari hulu ke hilir, sementara saat ini usaha yang ada masih didominasi usaha skala kecil dan belum sepenuhnya sesuai standar, ditambah jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Hal yang lain adalah rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah sehingga membutuhkan dorongan lebih kuat untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani. Secara simultan dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM para pelaku usaha perikanan, serta secara khusus pada perikanan tangkap, risiko terjadinya kecelakaan kerja masih cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan.

3. Tingginya kerusakan ekosistem perikanan

Kerusakan ekosistem perikanan khususnya di wilayah pesisir disebabkan abrasi dan akresi yang cukup tinggi yang imbasnya dapat menyebabkan terjadinya banjir rob. Di sisi lain, masih dibutuhkan edukasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan perairan. Sedangkan pada perikanan budidaya diperlukan upaya untuk mempertahankan ikan jenis endemik lokal yang mulai menurun populasinya.

b) Tantangan

1. Optimalisasi hasil kelautan dan perikanan terutama pada usaha skala kecil dan menengah;
2. Rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir;
3. Digitalisasi sektor kelautan dan perikanan;
4. Kualitas SDM pelaku usaha perikanan;
5. Keterbatasan infrastruktur dan penyedia logistik di sentra perikanan;
6. Keterbatasan teknologi informasi untuk logistik perikanan;
7. Fasilitasi kemudahan perijinan;
8. Produksi komoditas unggulan perikanan budidaya di Jawa Tengah;
9. Inovasi, diseminasi dan pendampingan teknologi di Jawa Tengah;
10. Produksi garam yang masih bergantung cuaca, serapan pasar ke garam rakyat masih rendah;
11. Rekomendasi perijinan ruang laut;
12. Pengelolaan kawasan konservasi.

c) Peluang

1. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dalam mencukupi kebutuhan akan pangan;
2. Permintaan pasar akan ikan dan produk hasil olahan kelautan dan perikanan;
3. Pemanfaatan potensi SDA dan SDM;
4. Pengembangan infrastruktur.

d) Formulasi isu-isu penting

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan berpotensi memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis pembangunan lingkup kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah;
2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan dan garam rakyat;
3. Masih rendahnya Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan dikarenakan belum optimalnya perlindungan usaha;
4. Angka Konsumsi ikan di Jawa Tengah yang masih dibawah rata-rata Angka Konsumsi Ikan Nasional dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, rendahnya kompetensi sdm poklhasar, belum optimalnya jaminan mutu produk perikanan serta belum terbentuknya jejaring pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir dikarenakan minimnya kompetensi dan keterampilan yang dimiliki, bagi hasil yang tidak proporsional, praktik ijon, serta belum optimalnya jaminan perlindungan terhadap pelaku usaha;
6. Terjadinya *overfishing* di wilayah pengelolaan perikanan, *overcapacity* di Pelabuhan perikanan, *unreported* data produksi perikanan, serta minimnya teknologi penangkapan ikan;

7. Tingginya harga pakan, wabah dan hama penyakit ikan, menurunnya kualitas benih dan induk, rendahnya teknologi serta sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
8. Kerusakan ekosistem pesisir akibat abrasi, alih fungsi lahan, minimnya pengetahuan stakeholder dalam pengawasan SDKP, serta adanya ketidaksesuaian antara rencana alokasi ruang laut dengan pemanfaatan ruang laut;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu dilakukan dengan melakukan langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3. Catatan penting berisi hasil temuan apabila terjadi perbedaan antara kebutuhan dan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran volume/target serta anggaran berbeda, perbedaan indikator kinerja dengan RKPD dan lainnya.

Reviu tersebut tertuang dalam tabel 5 berikut :

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	453.691.000		Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	453.691.000
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	49.277.557.000			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	49.277.557.000
		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	1.444.788.000		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	1.444.788.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	644.022.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	644.022.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	507.428.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	507.428.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	381.904.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	381.904.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	457.676.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	457.676.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	756.170.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	756.170.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	463.378.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	463.378.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	491.265.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	491.265.000
		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	1.220.856.000		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	1.220.856.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	442.160.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	442.160.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	667.879.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	667.879.000
		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	742.039.000		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	742.039.000
		Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	4.390.153.000		Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	4.390.153.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	596.473.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	596.473.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	513.636.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	513.636.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	406.687.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	406.687.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
		Bidang Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	354.029 Ton	4.585.278.000		Bidang Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	354.029 Ton	4.585.278.000
		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	100%	230.988.000		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	100%	230.988.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	100%	1.381.613.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	100%	1.381.613.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	100%	204.283.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	100%	204.283.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	91%	1.116.347.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	91%	1.116.347.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	100%	577.223.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	100%	577.223.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	100%	91.400.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	100%	91.400.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	100%	127.772.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	100%	127.772.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	100%	92.096.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	100%	92.096.000
		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	100%	633.497.000		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	100%	633.497.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	100%	88.778.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	100%	88.778.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	100%	119.301.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	100%	119.301.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
		Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	50,17%	491.310.000		Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	50,17%	491.310.000
			Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	25%	274.068.000			Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	25%	274.068.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	0,07%	200.732.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	0,07%	200.732.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	0,16%	184.824.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	0,16%	184.824.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	0,19%	230.977.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	0,19%	230.977.000
IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	70%	952.991.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	70%	952.991.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	17%	58.212.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	17%	58.212.000
			Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	72%	182.011.000			Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	72%	182.011.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50%	56.960.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50%	56.960.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50%	103.390.000			Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50%	103.390.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	17%	64.710.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	17%	64.710.000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	61%	244.953.000			Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	61%	244.953.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Produksi Perikanan Budidaya	600.000 Ton	5.812.544.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Produksi Perikanan Budidaya	600.000 Ton	5.812.544.000
		Balai Pengembangan Budidaya Ikan	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	5%	6.530.616.000		Balai Pengembangan Budidaya Ikan	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	5%	6.530.616.000
		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	100%	268.890.000		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	100%	268.890.000
VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Angka Konsumsi Ikan	17.71 Kg/Kapita/Tahun	637.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Angka Konsumsi Ikan	17.71 Kg/Kapita/Tahun	637.000.000
		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4%	363.072.000		Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4%	363.072.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil telaah dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2027 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap / Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kota Semarang	Produksi Perikanan Tangkap	20 Paket	Hibah Aspirasi
2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan / Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kabupaten Kebumen	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	1 Paket	Hibah Aspirasi

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya / Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kota Magelang	Produksi Perikanan Budidaya	51 Paket	Hibah Aspirasi
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan / Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang	Angka Konsumsi Ikan	4 Paket	Hibah Aspirasi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 :

- Visi Pembangunan Nasional
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
- Misi Presiden
 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Program Prioritas Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang relevan mendukung Sektor Kelautan dan Perikanan :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air, ekonomi biru;
2. Reformasi politik, hukum , dan birokrasi;
3. Pemberantasan kemiskinan;
4. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
5. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan Internasional;
6. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

- 7. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 8. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- 9. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
- 10. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim

b. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Kelautan (RPJMN 2025-2029)

Arah kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Nasional Kelautan tahun 2025-2029, dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Rancangan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KKP 2025-2029			
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Pangkalan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Merwujudan Bangsa Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	 Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	 Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta berwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana	 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	 Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di semua-selera produksi kelautan dan perikanan	 Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasaan yang tangguh dan efektif	 Meningkatnya produktivitas sektor kelautan perikanan
	 Meningkatkan nilai tambah, kualitas dan pengemasan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan	 Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan	 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
	 Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	 Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan	 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
	 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas	 Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik	 Meningkatnya Efisiensi Birokrasi KKP yang Berkualitas



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu tahun; dan
- c. Menciptakan kepastian kebijakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 adalah:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 agar berjalan terarah, terukur, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, karena memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan keterpaduan, kepastian, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta pengalokasian anggaran guna mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
 Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (PE)		Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	Angka	2,1
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Garam	Ton	544.457,81
			Produksi Perikanan	Ton	969.649,9
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Kelautan dan Perikanan		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	85
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	86
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	3,22

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (IKLH)		Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik	(%)	67,03
		Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	(%)	0,88

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2027. Rencana tersebut dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028 Provinsi Jawa Tengah

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Kelautan dan Perikanan									59.075.925.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	85		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan								58.175.925.500		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	86	58.175.925.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						58.175.925.500		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	%	100	480.355.000	Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					42.105.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	42.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.405.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.700.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					313.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	313.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.000 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				310.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					124.950.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	124.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.000 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.950.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	31.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	%	100	641.500.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					26.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					508.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	508.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				505.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	505.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	100	193.973.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					62.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.600.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	27.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					41.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	41.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	38.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.273.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	90.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.273.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	27.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	100	134.506.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.006.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	55.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.546.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	42.546.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.960.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	11.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	100	190.000.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					110.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	110.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				86.580.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	86.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.920.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	20.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	35.200.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	34.200.000		OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	44.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.300.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	4.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				17.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	54.178.072.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.963.672.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.963.672.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				47.893.672.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	252	47.893.672.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				920.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	920.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					350.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				150.000.000		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	252	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					759.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	759.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.600.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	90.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				106.800.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	106.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.250.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1.250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.655.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.655.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.250.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.100.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				295.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	295.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				650.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	164.240.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					28.740.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	28.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.740.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					64.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	64.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				61.100.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	61.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	71.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.400.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	31.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	571.433.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					107.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					284.433.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	284.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.433.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				282.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	282.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	372.180.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					46.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					211.180.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	211.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				208.480.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	208.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				43.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	%	100	154.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.050.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	30.050.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.550.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.550.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	42.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					82.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	82.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.850.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	23.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	9.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	190.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	18.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	14.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	119.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	117.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	52.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	22.100.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	240.922.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					121.922.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	121.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.922.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	6.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	119.430.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					24.910.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	24.910.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.250.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.250.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.900.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.760.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	5.760.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					43.080.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	43.080.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.280.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.280.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.440.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	51.440.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				28.190.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	28.190.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.750.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.750.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	164.064.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					37.064.500		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	37.064.500	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.551.500		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.551.500	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.413.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.413.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.100.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	23.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	66.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	64.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	60.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.200.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	100	144.950.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					45.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	53.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	46.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	21.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	128.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	18.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	50.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	44.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	60.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	106.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	18.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.650.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	8.650.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					31.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	31.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	57.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.500.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	25.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				22.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan								900.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	3.22	900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						900.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	900.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					900.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	900.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				450.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				27.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	180	27.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				23.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	23.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (IKLH)									1.511.067.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik	%	67.03		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi								1.511.067.000		
						Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	%	0.88	1.511.067.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						1.511.067.000		
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	0.1	567.558.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					567.558.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	2	567.558.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				367.558.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	4253.6	367.558.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				200.000.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.66	200.000.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	0.26	397.839.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					397.839.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	1	397.839.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				76.002.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	288.98	76.002.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				321.837.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.66	321.837.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	0.27	545.670.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					545.670.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	3	545.670.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				61.173.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	772.78	61.173.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				484.497.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.66	484.497.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (PE)									28.852.176.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	%	2.1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Perikanan								28.852.176.500		
						Produksi Garam	Ton	544457.81	846.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						846.289.000		
						Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	%	50.73	846.289.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					846.289.000		
						Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	10	279.321.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				279.321.000		
						Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	120	279.321.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang meningkat teknologinya	Kelompok	11	566.968.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.03.0005			Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman				566.968.000		
						Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit	11	566.968.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi Perikanan	Ton	969649.9	28.005.887.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						521.071.000		
						Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	%	40	521.071.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					521.071.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	1	302.798.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				302.798.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	299.86	302.798.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Lokasi	5	218.273.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.02.1.01.0006			Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir				218.273.000		
						Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen	4	218.273.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						14.382.119.500		
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	1.107.791.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.107.791.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	6600	435.274.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				435.274.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	435.274.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	672.517.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				672.517.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	29	672.517.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	1.035.766.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.035.766.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	9720	882.376.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				882.376.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	882.376.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPR/KKPR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah	Unit	1	153.390.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				153.390.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	12	153.390.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	1.199.130.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.199.130.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	9725	281.490.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				281.490.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	20	281.490.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	917.640.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				917.640.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	26	917.640.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	%	100	788.189.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					788.189.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	1700	704.349.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				704.349.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	10	704.349.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	83.840.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				83.840.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	27	83.840.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	537.122.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					537.122.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	950	90.092.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				90.092.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	90.092.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	2	447.030.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				447.030.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	23	447.030.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	881.261.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					881.261.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	4100	427.661.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				427.661.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	427.661.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	453.600.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				453.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	19	453.600.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	691.613.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					691.613.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	160	541.928.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				541.928.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	14	541.928.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	149.685.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				149.685.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	14	149.685.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	1.080.716.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.080.716.500		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	63	647.427.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				647.427.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	16	647.427.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	433.289.500	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				433.289.500		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	25	433.289.500	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; KEBUMEN --> AYAH --> DESA AYAH
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	100	1.208.809.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.208.809.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	5000	401.352.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				401.352.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	12	401.352.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	807.457.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				807.457.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	20	807.457.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	928.813.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					928.813.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	60	492.289.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				492.289.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	17	492.289.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	kg/kapita/tahun	1	436.524.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				436.524.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	17	436.524.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	838.323.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					838.323.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	1050	638.323.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				638.323.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	11	638.323.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				200.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	23	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Produksi Perikanan Tangkap	Ton	364649.9	4.084.586.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					3.173.748.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa	Data	53	150.000.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.01.0001			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				150.000.000		
						Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	150.000.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya	Orang	30	790.368.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.01.0010			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				790.368.000		
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	30	790.368.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan	Orang	10000	2.233.380.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				2.233.380.000		
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2	2.233.380.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					560.838.000		
						Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Unit	1000	560.838.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.03.0004			Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				560.838.000		
						Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	%	100	560.838.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					350.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang disusun	Dokumen	1	350.000.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		3.25.03.1.06.0001			Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				350.000.000		
						Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	11	350.000.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						8.162.603.000		
						Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	863.640.000	Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					863.640.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	sampel	500	471.089.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	
		3.25.04.1.05.0011			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				471.089.000		
						Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	3	471.089.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya	Unit	45	392.551.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	
		3.25.04.1.05.0013			Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				392.551.000		
						Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	35	392.551.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	%	5	5.634.743.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					650.000.000		
						Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	1	650.000.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	
		3.25.04.1.05.0002			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				250.000.000		
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	250.000.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				400.000.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	3	400.000.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					4.984.743.000		
						Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan	Jenis	1	4.484.743.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	
		3.25.04.1.06.0003			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.484.743.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	27	4.484.743.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Lokasi	9	500.000.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	
		3.25.04.1.06.0004			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5	500.000.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi Perikanan Budidaya	Ton	605000	1.664.220.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					683.220.000		
						Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan	Jenis	3	339.220.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				339.220.000		
						Jumlah Pembudidaya	Orang	30	339.220.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana	Orang	10	344.000.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		3.25.04.1.05.0001			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				154.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	154.000.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				190.000.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	190.000.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					981.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jenis teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	3	981.000.000		
		3.25.04.1.06.0003			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				981.000.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	981.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						2.852.984.000		
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	72	483.620.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					483.620.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	75	483.620.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				483.620.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	15	483.620.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	300.000.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					300.000.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	50	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				300.000.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	12	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	61	494.056.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					494.056.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	50	494.056.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				494.056.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	12	494.056.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	19	178.061.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					178.061.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	15	76.371.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				76.371.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	20	76.371.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	%	100	101.690.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				12.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	5	12.400.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				8.125.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	8.125.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				8.125.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	8.125.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				73.040.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	5	73.040.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	342.989.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					342.989.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	15	105.924.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				105.924.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	24	105.924.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil	%	80	237.065.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				58.380.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	3	58.380.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				66.460.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	3	66.460.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				112.225.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	4	112.225.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	19	325.037.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					325.037.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	15	66.971.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				66.971.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	30	66.971.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	%	100	258.066.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				56.984.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	5	56.984.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				61.268.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	24	61.268.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				56.984.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	24	56.984.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				82.830.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	2	82.830.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	%	71	729.221.000	Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					596.321.000		
						Jumlah pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan	Orang	60	76.455.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				76.455.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	76.455.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan	%	90	519.866.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				233.623.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	6	233.623.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				200.000.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	35	200.000.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0018			Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah				86.243.000		
						Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Forum	1	86.243.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					132.900.000		
						Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	180	88.600.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				44.300.000		
						Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	44.300.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				44.300.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	44.300.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya	%	90	44.300.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.02.0004			Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi				44.300.000		
						Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	20	44.300.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						2.087.110.000		
						Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahu	18.12	1.207.527.000		
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					125.000.000		
						Jumlah Produk Olahan Ikan	Ton	162412	125.000.000		
		3.25.06.1.01.0004			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				125.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1	125.000.000		
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1.044.527.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2027			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan	Orang	2000	1.044.527.000		
		3.25.06.1.02.0003			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				1.044.527.000		
						Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	10	1.044.527.000		
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					38.000.000		
						Fasilitasi kegiatan kontinuitas bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan; dan distrbusi produk perikanan	Kegiatan	1	38.000.000		
		3.25.06.1.03.0004			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku				38.000.000		
						Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	Ton	985000	38.000.000		
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	879.583.000		
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					175.919.000		
						Jumlah Unit Pengolahan Ikan Yang difasilitasi kelayakan mutunya	Unit	90	175.919.000		
		3.25.06.1.01.0005			Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				175.919.000		
						Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomendasi	110	175.919.000		OPD Provinsi
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					703.664.000		
						Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan	Dokumen	600	703.664.000		
		3.25.06.1.02.0003			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				703.664.000		
						Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	625	703.664.000		OPD Provinsi
JUMLAH									89.439.169.000		

JUMLAH									89.439.169.000		
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program								
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Pelaku usaha penangkapan sebagian besar tidak memiliki dokumen perizinan penangkapan secara lengkap	16	Rendahnya kesadaran para pemilik kapal akan pemenuhan kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan	Pemilik kapal rentan terhadap permasalahan hukum dengan Aparat Penegak Hukum	Melanjutkan pelayanan perizinan terpadu dan pembinaan kepada masyarakat nelayan	Kepala Pelabuhan	November 2028
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Kurangnya sumber daya (manusia, keuangan, teknologi) untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan.	13	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang terbatas	Pelayanan kepelabuhanan kepada masyarakat dan pengguna jasa kawasan tidak dapat berjalan secara optimal	Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan kompetensi baik secara luring maupun daring, dan mengusulkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pelayanan	Kepala Pelabuhan	Desemembr 2027
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Aktivitas penangkapan ikan terhambat	16	Sarpras pelabuhan perikanan kurang memadai	Produksi perikanan tangkap menurun. Penghasilan ABK rendah	Optimalisasi pemeliharaan sarpras	Kepala PPN Tasikagung	Januari-Desember

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	Adanya kerusakan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan konsumsi air laut	14	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan konsumsi air laut	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan konsumsi air laut	Kelapa BPPB Kelas A	Desember 2027
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Adanya pelayanan atau pekerjaan yang terlambat untuk diselesaikan	17	Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten di PPP Larangan	Kebutuhan pengguna jasa layanan pelabuhan yang tidak terpenuhi	Menugaskan SDM yang ada untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi/pelatihan untuk menambah kompetensi yang dibutuhkan untuk pelayanan pelabuhan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	12	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	Kerusakan ekosistem dan sumber daya ikan, penurunan pendapatan masyarakat	melakukan perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan	Bidang PPSDP	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	13	Kurangnya kepedulian nelayan terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal dan penggunaan peralatan tangkap yang ramah lingkungan	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan	Melaksanakan Ops. Laut s.d. 12 Mil, penindakan pelanggaran alat tangkap yang melanggar. Serta penindakan dokumen yang tidak lengkap	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Terjadinya peningkatan kasus pelanggaran	17	Kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap kelengkapan dokumen berusaha	Kapal perikanan beroperasi tanpa dilengkapi dokumen periznan yang berlaku	Pengawasan dan edukasi terkait peraturan yang berlaku	Kepala CDK Wilayah Selatan	Desember 2026

Kegiatan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Beberapa bangunan kios ikan dan warung makan mengalami kerusakan dan tidak layak pakai	13	Beberapa bangunan kios sudah dimakan usia dan belum adanya anggaran pendukung	Kegiatan ekonomi para pelaku usaha mengalami kelesuan sehingga menurunkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Perawatan secara mandiri oleh pelaku usaha	PPP Asemdayong	Desember 2027
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Minimnya kerjasama dan dukungan dari stakeholder diluar pelabuhan dalam mengembangkan kawasan	13	Kurangnya koordinasi secara intens dengan instansi diluar PPP Asemdayong	Tidak ada nya dukungan yang maksimal dari luar instansi PPP Asemdayong	Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi luar PPP Asemdayong	Kepala PPP Asemdayong	Desember 2027
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Anggaran pembangunan /rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	14	Alokasi anggaran kurang untuk pembangunan /rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	Fasilitas kepelabuhan belum memadai	Mengusulkan penambahan anggaran pada periode berikutnya	Kepala PPP Klidang Lor	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Nelayan dan Bakul tidak aman dalam melakukan aktivitas di Pelabuhan	17	Anggaran pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan kecil	Pendapatan nelayan dan bakul menurun	pengerukan perbaikan kios dan penataan kawasan	PPP Tawang	Desember 2028
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Penerbitan dokumen kesyahbandaran ilegal	10	Banyaknya dokumen perijinan	mencari jalan pintas dalam kepengurusan dokumen	sosialisasi dan gerai perijinan	ppp tawang	desember 2027
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Kurangnya dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	13	Kebijakan terkait kelengkapan dokumen kepelabuhanan terkendala keterbatasan anggaran	Pelabuhan Perikanan kurang dapat berkembang lebih baik	Perbaikan sistem administrasi, pengajuan dokumen pendukung pelabuhan dan pengajuan anggaran	Kepala PPP Karimunjawa	1 Tahun (Januari - Desember 2027)
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Nelayan enggan membayar retribusi tambat labuh dan pas masuk	10	Kondisi kolam pelabuhan yang sudah dangkal dan banyak yang rusak	pendapatan pemerintah dari retribusi berkurang	Perbaikan dan pemeliharaan sarpras pelabuhan, pengajuan anggaran	Kepala PPP Karimunjawa	1 Tahun (Januari - Desember 2027)
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Adanya kerusakan sarana dan prasarana produksi budidaya di loka air laut	14	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan di loka air laut	target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan di loka air laut	Kelapa BPPB Kelas A	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan	Turunnya produksi benih ikan endemik yang dikembangkan	14	Turunnya produktifitas induk ikan endemik	Target produksi ikan tidak tercapai	Melakukan peremajaan calon induk ikan endemik lokal	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2027
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya kerusakan sarana dan prasaranan budidaya ikan di loka air tawar dan payau	14	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan di loka air tawar dan payau	Target produksi ikan tidak tercapai	Perbaikan sarana dan prasarana budidaya ikan di loka air tawar dan payau	Kelapa BPPB Kelas A	Desember 2027
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	17	Kurangnya kesadaran nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku	Mengajukan untuk diadakan kegiatan pengawasan dan penertiban nelayan di laut oleh instansi yang berwenang kepada Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Akses jalan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak	17	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah kunjungan dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan	Menetapkan perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Kolam pelabuhan yang semakin dangkal	17	Sedimentasi lumpur yang masuk ke kolam pelabuhan dari aliran Sungai Bongkok	Penurunan jumlah trip harian dan hasil tangkapan ikan di kawasan pelabuhan	Menetapkan pengerukan dan perubahan pintu masuk kolam pelabuhan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Dokumen pengembangan pelabuhan perikanan yang dimiliki masih belum lengkap	17	Keterbatasan anggaran untuk penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan	Terhambatnya pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Menetapkan penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan	Tidak terselesaikannya penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan secara tepat waktu	12	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masyarakat	masih terjadinya pelanggaran, kerusakan ekosistem sumberdaya ikan, konflik sosial, kerugian ekonomi	melakukan identifikasi jenis pelanggaran, koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran, dan penyelesaian pelanggaran dengan mengendepankan penerapan sanksi administratif dalam rangka pembinaan pelaku usaha/masyarakat	Kepala Bidang PPSDP	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha pergarahan dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/masyarakat pembudidaya air payau dan pergarahan terhadap regulasi perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan	12	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masyarakat	Pelaku usaha/masyarakat rentan terkena sanksi, terjadi kerusakan ekosistem sumber daya ikan	melakukan sosialisasi/pemb erian pemahaman secara langsung (tatap muka) kepada pelaku usaha pembiddaya ikan air payau dan pergarahan dengan pemilihan lokasi prioritas berdasarkan seringnya terjadi pelanggaran	Kepala Bidang PPSDP	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	13	Kurangnya pemahaman masyarakat/nelayan sekitar tentang zonasi dan aturan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	Kerusakan ekosistem terumbu karang Menurunnya hasil tangkapan nelayan	1. Sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkaitan, 2. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan, 3. Penguatan kegiatan pengawasan di kawasan konservasi	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Keselamatan petugas pada saat survei/monitoring di lapangan	17	1. Arus yang kencang dan gelombang yang tinggi 2. Minimnya sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja	Kecelakaan Kerja / Kematian	1. Pemantauan/mencari informasi kondisi cuaca sebelum kegiatan, 2. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan kerja, 3. Peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman yang cukup tinggi	16	1. Kualitas bibit yang tidak sesuai standar, 2. Metode dan waktu penanaman yang kurang tepat, 3. Jarak dan kondisi lingkungan sekitar lahan penanaman yang tidak sesuai, 4. Kegiatan pemeliharaan pasca penanaman yang tidak maksimal.	Bibit mangrove yang ditanam tidak tumbuh (mati), Bibit hilang terbawa ombak/gelombang	1. Pemilihan bibit mangrove yang baik dan sesuai standar, 2. Pemilihan lokasi tanam yang tepat sesuai habitatnya, 3. Mencari waktu tanam yang tepat untuk menghindari gelombang dan cuaca ekstrim, 4. Adanya masa pemeliharaan 90 hari setelah penanaman	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	13	Belum optimalnya tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk memberikan efek jera	Tidak ada efek jera bagi para pelaku usaha yang melanggar jika sanksi penanganan tindak lanjut belum optimal	Melaksanakan penanganan tindak lanjut pelanggaran secara cermat dan tepat serta memberikan sanksi sesuai aturan	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027

[illegible]

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang semakin rusak	19	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPN Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	Menentukan kebutuhan prioritas yang harus segera terpenuhi dan menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan pada saat perubahan APBD	Kepala PPN Tegalsari	Desember 2027
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	17	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum	Sosialisasi dan monitoring serta evaluasi thd kepatuhan pelaku usaha	Kepala PPN Tegalsari	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Kapal perikanan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi tertangkap saat patroli pengawasan dan menghambat aktivitas penangkapan serta citra	13	Kurangnya kesadaran nelayan untuk tertib dokumen dan penggunaan API ramah lingkungan	Kapal perikanan berpotensi terkena penertiban atau penindakan saat patroli pengawasan; Menurunnya citra pelabuhan apabila masih terdapat kapal yang tidak mematuhi ketentuan perikanan	Sosialisasi kewajiban dokumen kapal dan aturan alat tangkap; Fasilitasi pengurusan dokumen kapal bagi nelayan; Pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Proses bongkar muat ikan di kawasan PPP Wonokerto yang tidak lancar menyebabkan mutu hasil tangkapan tidak terjaga, sehingga menurunkan nilai jual ikan dan berdampak pada pendapatan nelayan.	13	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bongkar muat; Penataan aktivitas bongkar muat yang belum tertib; Penanganan hasil tangkapan yang belum sesuai standar	Mutu hasil tangkapan ikan tidak terjaga; kapal nelayan tidak bisa sandar di dermaga sehingga harus sandar di dermaga lama yang tergenang rob	Pembinaan penanganan ikan yang baik kepada nelayan dan pelaku usaha; Penataan dan pengaturan kegiatan bongkar muat di kawasan pelabuhan; pengusulan kelanjutan pembangunan dermaga	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Kondisi TPI Wonokerto yang kotor dan kumuh menyebabkan mutu hasil tangkapan ikan yang dilelang menjadi tidak higienis, sehingga menurunkan nilai jual dan kepercayaan pembeli.	13	Kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan di area TPI; Rendahnya kesadaran pedagang dan pengguna TPI dalam menjaga kebersihan; Keterbatasan sarana kebersihan dan sanitasi di kawasan TPI	Mutu dan higienitas ikan menurun; Harga jual ikan menjadi lebih rendah; Menurunnya kepercayaan pembeli terhadap kualitas ikan di TPI; Menurunnya aktivitas lelang dan daya tarik pasar ikan	Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pengelolaan kebersihan dan penanganan lingkungan kawasan TPI; Koordinasi dengan pengelola TPI Wonokerto terkait kebersihan lingkungan TPI Wonokerto	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di kawasan PPP Wonokerto, disertai kurangnya koordinasi antar pihak terkait, fasilitas pendukung, serta pemahaman nelayan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan kapal	13	Kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan dan masyarakat pelabuhan; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan kapal; Terbatasnya fasilitas pendukung keselamatan di kawasan pelabuhan; Koordinasi antar instansi	Meningkatnya potensi kecelakaan atau gangguan keselamatan kapal; Aktivitas pelabuhan menjadi kurang tertib dan aman; Menurunnya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna pelabuhan; Berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan pengguna pelabuhan.	'Penyusunan SOP penanganan kebakaran kapal di kawasan pelabuhan; Penyediaan sarana keselamatan seperti APAR dan perlengkapan darurat lainnya; Sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan terkait keselamatan dan keamanan kapal; Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan dan penanggulangan keadaan darurat	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persekongkolan antara pemilik pekerjaan dengan calon penyedia jasa menyebabkan proses pemilihan tidak objektif dan berpotensi menunjuk penyedia jasa yang tidak kompeten, sehingga menurunkan kualitas hasil pekerjaan serta berdampak pada memburuknya citra Dinas	20	Kurangnya transparansi dalam proses pemilihan penyedia jasa; Pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa belum optimal; Adanya potensi konflik kepentingan antara pihak yang terlibat dalam proses pengadaan	Kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis; Potensi kerugian keuangan negara; Menurunnya kepercayaan publik terhadap instansi; Potensi temuan audit oleh aparat pengawas	'Meningkatkan transparansi proses pengadaan melalui penerapan sistem pengadaan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku; Memperkuat pengawasan internal terhadap seluruh tahapan pemilihan penyedia jasa; Menerapkan prinsip integritas dan pakta integritas bagi pihak yang terlibat dalam proses	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banyaknya fasilitas kepelabuhanan di PPP Wonokerto yang rusak menyebabkan sarana dan prasarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menghambat pelayanan dan aktivitas operasional pelabuhan.	13	Rob yang menggenangi kawasan PPP Wonokerto; usia infrastruktur dan kurangnya pemeliharaan	Aset pelabuhan tidak termanfaatkan secara optimal dan berpotensi mangkrak; Menurunnya produktivitas kawasan pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan; Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan aset; Munculnya kesan kawasan	Penghapusan aset mangkrak; Melakukan pendataan dan pemetaan kondisi serta potensi pemanfaatan aset dan lahan di kawasan PPP Wonokerto; Pengusulan rehab sarpras	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Jumlah anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan terbatas	13	Sarana dan prasaran pelabuhan belum lengkap	pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha terganggu	Mengusulkan penambahan anggaran pada periode berikutnya	Kepala PPP Klidang Lor	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	pelayanan fungsi pemerintahan dan pengusahaan belum optimal	13	Jumlah Anggaran yang tersedia serta SDM yang dimiliki terbatas	pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha belum optimal	Mengusulkan peningkatan anggaran dan Penambahan SDM	Kepala PPP Klidang Lor	Desember 2027
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah anggaran Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan Lainnya terbatas	14	Gedung kantor dan bangunan Lainnya dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	Gedung kantor dan bangunan Lainnya belum berfungsi optimal	Mengusulkan penambahan anggaran pada periode berikutnya	Kepala PPP Klidang Lor	Desember 2027
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan	13	ketidaksesuaian spesifikasi sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional pelabuhan,	PAD menurun	peningkatan anggaran	ppp tawang	desember 2027
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	ketidakpatuhan pengguna pelabuhan terhadap peraturan yang berlaku.	10	banyaknya stakeholder yang ada dikawasan PPP	overlap tupoksi	sosialisasi	ppp tawang	desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	14	belum adanya pengawasan pelaksanaan kegiatan secara berkala	keterlambatan pelaksanaan kegiatan	perencanaan kegiatan yang matang	ppp tawang	desember 2026
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Data produksi perikanan rendah	10	Hasil tangkapan tidak didaratkan di PPN Tasikagung	Kebijakan pengembangan penangkapan ikan ditinjau kembali	Pengajuan anggaran pemeliharaan sarpras pelabuhan	Kepala PPN Tasikagung	Semester 1
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Volume pelayanan dan jumlah kapal di kolam pelabuhan meningkat	17	Pelayanan sesuai standar ISO	Kapal berdesak-desakan	Mengusulkan pembangunan breakwater untuk memperluas kolam pelabuhan	Kepala OPD	Semester 1
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Volume pelayanan dan jumlah kapal di kolam pelabuhan meningkat	17	Pelayanan sesuai standar ISO	Kapal berdesak-desakan	Mengusulkan penambahan SDM yang kompeten dan berintegrasi	Kepala PPN	Semester 2

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Fasilitas pelabuhan banyak yang rusak dan tidak layak	13	Kurangnya pemeliharaan dan faktor usia bangunan	Pelayanan pelabuhan terganggu	Sosialisasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan terkait pentingnya perjanjian kerja / asuransi	Kepala PPP Karimunjawa	1 Tahun (Januari - Desember 2027)
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi / SPK	13	Kurangnya kesadaran nelayan terhadapnya pentingnya asuransi atau perlindungan	Nelayan tidak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami ketika bekerja	Sosialisasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan terkait pentingnya perjanjian kerja / asuransi	Kepala PPP Karimunjawa	1 Tahun (Januari - Desember 2027)
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut belum optimal	14	Terbatasnya jumlah prasarana untuk budidaya ikan di laut	Produksi budidaya ikan di laut tidak optimal	Memperbaiki atau menambah prasarana budidaya ikan di laut	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2027
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut belum optimal	14	Terbatasnya sarana untuk budidaya ikan di laut	Produksi budidaya ikan laut tidak optimal	Penambahan jumlah sarana budidaya ikan di laut	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar belum optimal	14	Terbatasnya jumlah sarana untuk budidaya ikan air payau dan tawar	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar tidak optimal	Menambah jumlah sarana budidaya ikan air payau dan tawar	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2027
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar belum optimal	14	Terbatasnya jumlah prasarana untuk budidaya ikan air payau dan tawar	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar tidak optimal	Memperbaiki atau menambah jumlah prasarana budidaya ikan air payau dan tawar	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2027
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang semakin rusak	17	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPP Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	Menentukan kebutuhan prioritas yang harus segera terpenuhi dan menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan pada saat perubahan APBD	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Penyewa lahan tidak membayar retribusi pada waktu yang sudah ditetapkan	17	Kurangnya kesadaran dari penyewa lahan	Target retribusi dari pelayanan sewa lahan yang tidak tercapai	Melakukan pemberian teguran, peringatan, dan sanksi berupa pembongkaran lahan bagi penyewa lahan yang melanggar peraturan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027
Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Tidak terselesaikannya penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan secara tepat waktu	12	kompleksitas modus pelanggaran, keterbatasan kompetensi SDM pengawasan dan keterbatasan kewenangan	masih terjadinya pelanggaran, kerusakan ekosistem sumberdaya ikan, konflik sosial, kerugian ekonomi	melakukan identifikasi jenis pelanggaran, koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran, dan penyelesaian pelanggaran dengan mengendepankan penerapan sanksi administratif dalam rangka pembinaan pelaku usaha/masyarakat	Kepala Bidang PPSPD	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/masya rakat di perairan umum daratan terhadap regulasi perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan sektor perikanan	12	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masya rakat	Pelaku usaha/masya rakat rentan terkena sanksi, terjadi kerusakan ekosistem sumber daya ikan	melakukan sosialisasi/pemb erian pemahaman secara langsung (tatap muka) kepada pelaku usaha penangkapan dan pembudidaya ikan di perairan umum daratan dengan pemilihan lokasi prioritas berdasarkan seringnya terjadi pelanggaran	Kepala Bidang PPSDP	Desember 2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Pengelolaan kawasan konservasi kurang efektif sehingga terjadi degradasi ekosistem di dalam kawasan	17	1. Alokasi anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi yang tidak memadai. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, 3. Tingginya aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.	Meningkatnya luas kawasan konservasi yang mengalami kerusakan dan terancamnya target biota dan keanekaragaman hayati laut	1. Mengajukan usulan peningkatan anggaran pengelolaan kawasan konservasi. 2. Membentuk dan melatih Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) untuk memperluas jangkauan pengawasan	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Tingkat keberhasilan tumbuh (survival rate) dari kegiatan rehabilitasi rendah	16	1. Pemilihan metode yang kurang sesuai dengan karakteristik lokasi rehabilitasi. 2. Kerusakan bibit karang akibat pencemaran/ sampah.	Kegiatan rehabilitasi tidak memberikan hasil yang optimal, dan target luasan rehabilitasi tidak tercapai	1. Menyusun SOP Penanaman yang responsif terhadap perubahan iklim, termasuk jadwal tanam yang fleksibel. 2. Berkoordinasi dengan BMKG untuk informasi cuaca real-time.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027
Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	13	Masih rendahnya kepatuhan terkait kepemilikan, kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan	Melaksanakan tindak lanjut pelanggaran sanksi administrasi bagi para pelaku pelanggaran secara cermat dan tepat	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya Frekuensi Operasi Pengawasan yang sesuai Target Cakupan WPPNRI yang Diawasi	13	Biaya operasional operasi yang cenderung tinggi dan Kesiapan sarana prasarana operasi yang belum maksimal	Peningkatan potensi pelanggaran dan kerusakan SDKP di Wilayah Cakupan WPPNRI yang Diawasi	Manajemen peningkatan frekuensi operasi sesuai objek dan urgensi guna optimalisasi penggunaan biaya operasi	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	13	Masih rendahnya kepatuhan terkait kepemilikan, kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi	Peningkatan potensi pelanggaran dan kerusakan SDKP di Wilayah Cakupan WPPNRI yang Diawasi	Melaksanakan pengawasan usaha penangkapan ikan sesuai kewenangan provinsi	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kurangnya anggaran pemeliharaan rutin kendaraan dinas	13	Terbatasnya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas terdiri dari 1 mobil dinas dan 3 motor dinas dalam kondisi yang tidak baik.	Penyusutan nilai aset yang berakibat kerusakan kendaraan dinas sehingga meningkatkan biaya perbaikan di masa mendatang	Perencanaan anggaran tahun yang akan datang dinaikkan pada biaya pemeliharaan kendaraan dinas	Wilayah Barat	1 Tahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Rusak akibat usia dan Cuaca ekstrim	13	Usia gedung dan kualitas bangunan yang dimakan usia serta pengaruh cuaca ekstrim	Kondisi Ruang kerja menjadi rawan sehingga kurang nyaman bagi Pegawai CDKWB dan terjadi peningkatan biaya perbaikan dimasa mendatang	Perencanaan anggaran tahun yang akan datang dinaikkan pada biaya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2 bulan
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	16	Anggaran dan SDM pengelola tidak memadai	Nilai EVIKA masih rendah	Meningkatkan sinergitas dengan mitra (NGO, dinas setempat, akademisi)	Kepala CDK Wilayah Selatan	Desember 2026

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Rendahnya jumlah hari operasi pengawasan SDKP dengan Kapal Pengawas	14	Biaya operasional kapal pengawas yang tinggi	Jangkauan wilayah dan kapal perikanan yang beroperasi di laut kurang terawasi	Merencanakan penambahan anggaran operasi kapal pengawas	Kepala CDK Wilayah Selatan	Desember 2026

4.3 Dukungan Terhadap 136 Program Daerah

Tabel 4.3
Dukungan Terhadap 136 Program Daerah
Tahun 2027

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan	Pendirian SPBN milik BUMD JPEN di Kawasan nelayan	Melakukan verifikasi dan penerbitan surat permohonan rekomendasi pendirian SPBN oleh JPEN	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap /Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil / Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
2	Program asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Asuransi nelayan (Bantuan premi asuransi untuk nelayan skala kecil)	Bantuan Premi Asuransi Nelayan untuk 10.000 Orang @100.000 di 24 Lokasi Kab./Kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap /Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil / Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	-
3	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional	1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A 3. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	- Perbaikan Drainase dan Pengangkatan Ex. Kapal Kebakaran di Kawasan di PPN Tegalsari - Pengerukan Alur Kali Sambong PPP Klidanglor - Pengerukan Alur Kali Kutho PPP Tawang Dengan total Rp 571.448.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap / Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi / Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A 3. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	-
4	Penghapusan Hutang Petani, Nelayan, UMKM	Penyelesaian Piutang TPI	Melakukan Proses Penghapusan Piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah- Proses penetapan SK Penghapusan piutang oleh Provinsi Jawa Tengah	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Air Tawar (Sarana Prasarana Nila Salin)	- Modelling Pembenihan Nila Salin di Jepara dengan anggaran sebesar Rp.2.700.000.000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya / Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat / Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	-
5	Penyediaan Benih yang berkualitas	Penyediaan Benih Calon Indukan	Penyediaan Benih Calon Indukan Rp. 528.013.000 - Revitalisasi sarana dan prasarana di Loka Budidaya dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya / Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat / Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	-
6	Pelatihan Pengolahan dan Manajemen Keuangan Bagi Perempuan Pesisir dan Petani Perempuan	Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan	Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan Sebanyak 10 Kali Rp. 107.500.000	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan / Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar / Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	-
		Pertemuan Pemberdayaan Usaha Perempuan/Taruna Pesisir (Manajemen Keuangan)	Pertemuan Pemberdayaan Usaha Perempuan/Taruna Pesisir sebanyak 5 Kali Tema Materi Manajemen Keuangan Bagi Perempuan Pesisir Rp. 70.000.000	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
7	Penanggulangan Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri Segoro untuk Mengamankan Garis Pantai	Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) di Wilayah Selatan	Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) 20.000 Batang di Wilayah CDK Selatan dengan anggaran Rp. 124.000.000	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi / Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	-

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
		Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) di Wilayah Timur	Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) 25.000 Batang di Wilayah CDK Timur dengan anggaran Rp. 100.000.000	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi / Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	-
		Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) di Wilayah Barat	Rehabilitasi Pesisir (Penanaman Mangrove) 23.700 Batang di Wilayah CDK Barat dengan anggaran Rp. 130.350.000	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi / Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	-
8	Pembelian Hasil Panen Nelayan oleh BUMD Pelatihan Petambak Garam, Penyuluhan /Pelatihan untuk Meningkatkan Kualitas Panen)	Pertemuan Pemberdayaan Usaha Petambak Garam Rakyat	1 Kegiatan Rp.5.520.000	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
		Bantuan Hibah Barang berupa Sarana dan Prasarana Petambak Garam	Hibah Sarana dan Prasarana Petambak Garam (Geomembran) Rp.400.000.000 untuk 10 Kelompok Petambak Garam	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Dokumen Renja ini disusun secara operasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan guna mewujudkan sasaran pembangunan yang selaras dengan tujuan, misi, serta visi pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kualitas perencanaan yang terarah, terukur, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, Renja ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.

Dokumen perencanaan Tahun 2027, khususnya RKPD 2027 sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah, memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan keterpaduan arah pembangunan daerah. Penyusunannya dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh potensi sumber daya serta dukungan pembiayaan yang tersedia, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, melalui proses sinkronisasi dan sinergi yang berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, yaitu pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendukung pengembangan wisata bahari (marine tourism) yang berbasis pada potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan risiko yang efektif—termasuk risiko strategis, operasional, dan potensi fraud—menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan perangkat daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Melalui implementasi Renja ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran, terintegrasi, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dengan demikian, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang efektif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.

LAMPIRAN
Manajemen Risiko Perangkat Daerah

a. Identifikasi Risiko

Tabel 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indikator Sasaran								
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Terjadinya kematian ikan	Risiko Operasional	Benih ikan tidak standar	Harga ikan mahal	Masyarakat
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Terjadinya kematian ikan	Risiko Operasional	Terjangkit penyakit ikan	Kualitas ikan yang tidak sesuai standar	Masyarakat
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Nelayan tidak dapat melaut	Risiko Operasional	Cuaca buruk	Kelangkaan ikan	Masyarakat
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Nelayan tidak dapat melaut	Risiko Operasional	Kelangkaan BBM	Pendapatan nelayan turun	Nelayan
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Garam	Rendahnya kadar NaCl pada garam	Risiko Operasional	Teknologi yang belum memadai	Harga garam yang rendah	Petambak garam
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Garam	Kristal garam tidak terbentuk	Risiko Operasional	Cuaca yang tidak mendukung dalam produksi garam	Produktifitas garam rendah	Petambak garam
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelayanan tidak sesuai standar	Risiko Reputasi	SDM yang tidak kompeten	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga	Masyarakat
8	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Terjadinya risiko yang tidak teridentifikasi	Risiko Operasional	Terjadi musibah	Terganggunya pencapaian target indikator	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Sasaran Strategis	Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Matinya bibit mangrove	Risiko Operasional	Penanaman tidak sesuai lokasi	Rusaknya kawasan pesisir	Masyarakat
10	Sasaran Strategis	Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Matinya bibit mangrove	Risiko Operasional	Bibit mangrove tidak cukup umur	Hilangnya habitat ikan	Masyarakat
Indikator Program								
1	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Capaian Kinerja Rendah	Risiko Operasional	Kapasitas SDM Kurang Memadai	Kinerja Perangkat Daerah Tidak Mencapai Target	Pemerintah
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahapan penyusunan program dan kegiatan yang tidak sesuai jadwal	Risiko Operasional	Adanya perubahan kebijakan atau prioritas	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
1	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ketidakakuratan pelaporan data produksi perikanan tangkap	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dan sinkronisasi data antar petugas statistik perikanan tangkap Kabupaten/Kota dengan petugas PIPP di Pelabuhan Perikanan belum optimal	Perencanaan program dan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap menjadi kurang tepat sasaran	Pemerintah, akademisi dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	Sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan yang semakin rusak	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana di PPN Tegalsari	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	PPN Tegalsari, Nelayan dan Pelaku Usaha
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	Tidak optimalnya peningkatan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM; pemahaman terhadap administrasi dan pengelolaan keuangan yang belum merata; belum optimalnya sistem dan koordinasi pengelolaan administrasi perangkat daerah	Menurunnya kualitas pelayanan kepelabuhanan dan terganggunya aktivitas operasional pelabuhan perikanan	PPN Tegalsari, Nelayan pengguna pelabuhan, Pelaku usaha perikanan, Masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong belum dapat menyediakan fasilitas pendukung utama pelayanan kepelabuhanan	Risiko Operasional	Sarana prasarana di pelabuhan kurang memenuhi standar untuk dapat melayani para pengguna jasa di kawasan pelabuhan	Pelayanan kepelabuhanan kepada masyarakat dan pengguna jasa kawasan tidak dapat berjalan secara optimal	PPP Asemdayong, Nelayan, pemilik Kapal, pelaku usaha dan Pengguna Jasa Kawasan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Sub Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Pelaku usaha penangkapan sebagian besar tidak memiliki dokumen perizinan penangkapan secara lengkap	Risiko Kepatuhan	Rendahnya kesadaran para pemilik kapal akan pemenuhan kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan	Pemilik kapal rentan terhadap permasalahan hukum dengan Aparat Penegak Hukum	PPP Asemdayong, Nelayan, pemilik Kapal
3	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Kurangnya sumber daya (manusia, keuangan, teknologi) untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan.	Risiko Operasional	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang terbatas	Pelayanan kepelabuhanan kepada masyarakat dan pengguna jasa kawasan tidak dapat berjalan secara optimal	Masyarakat pengguna kawasan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Tidak tercapainya pelayanan kepelabuhanan di PPP Wonokerto secara optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan kondisi dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan; rendahnya kesadaran pengguna pelabuhan terhadap kebersihan dan keselamatan; keterbatasan SDM pengelola pelabuhan; koordinasi pengelolaan kawasan yang	Menurunnya kualitas pelayanan administrasi, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan keuangan yang kurang efektif dan akuntabel.	PPP Wonokerto, masyarakat penerima layanan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Tidak optimalnya peningkatan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM; pemahaman terhadap administrasi dan pengelolaan keuangan yang belum merata; belum optimalnya sistem dan koordinasi pengelolaan administrasi perangkat daerah	Menurunnya kualitas pelayanan kepelabuhanan dan terganggunya aktivitas operasional pelabuhan perikanan	PPP Wonokerto, Nelayan pengguna pelabuhan, Pelaku usaha perikanan, Masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Manajemen pengelolaan kepelabuhan perikanan	Risiko Operasional	Pelaksanaan tugas dan fungsi kepelabuhan perikanan kurang optimal	Pelayanan kepelabuhan perikanan kurang optimal	Nelayan dan PPP Klidang Lor
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Profesionalitas pegawai di pelabuhan perikanan	Risiko Operasional	Pegawai tidak berkompeten	Operasional kantor terhambat dan mutu pelayanan turun	Nelayan dan PPP Klidang Lor
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Nilai IKM rendah	Risiko Operasional	belum ada standarisasi pelayanan	pelayanan prima tidak diterima stakeholder	nelayan, bakul
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rendah	Risiko Operasional	Belum adanya standarisasi pelayanan	tidak bisa memberikan pelayanan yang cepat mudah dan murah	Bakul, nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Pelayanan kepelabuhanan tidak tercapai,Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelabuhan yang semakin rusak akibat terendam banjir ROB	Risiko Operasional	Banjir ROB yang setiap hari menggenangi kawasan Pelabuhan dan keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPP Morodemak	Terganggunya aktivitas nelayan dan pelaku usaha akibat banjir air ROB serta penurunan ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	Nelayan, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah tidak tercapai,Adanya keterlambatan pelayanan atau pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Kantor dan kawasan yang sudah terendam banjir ROB dan Keterbatasan SDM (PNS dan PPPK) yang ditugaskan di PPP Morodemak	Pelayanan eksternal (kepada masyarakat) dan pelayanan internal (kepegawaian, keuangan) kurang optimal,Terhambatnya kebutuhan pengguna jasa layanan pelabuhan yang belum bisa terpenuhi	Nelayan,Pelaku Usaha Perikanan,PPP Morodemak
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Aktivitas penangkapan ikan terhambat	Risiko Operasional	Sarpras pelabuhan perikanan kurang memadai	Produksi perikanan tangkap menurun. Penghasilan ABK rendah	Nelayan, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Munculnya pungutan liar dalam pelayanan kepelabuhanan	Risiko Fraud	Pembayaran retribusi secara tunai	Komplain dari pelaku usaha	Nelayan, Masyarakat pengguna jasa
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Pelayanan Kepelabuhanan Lambat	Risiko Reputasi	Penempatan SDM tidak tepat	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelabuhan	Nelayan, Masyarakat pengguna jasa
4	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Pelayanan Kepelabuhanan buruk	Risiko Reputasi	SDM tidak kompeten	Rendahnya nilai kepuasan masyarakat	Nelayan, masyarakat pengguna jasa
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan (pogram)	Risiko Operasional	Ketidackakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah	Pelayanan kepelabuhanan tidak terlaksana secara optimal	PPP Karimunjawa dan penerima layanan kepelabuhanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Ketidak cakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah	Operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja.	PPP Karimunjawa dan pelaku usaha Perikanan Tangkap
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	Adanya kerusakan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan konsumsi air laut	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan konsumsi air laut	Target produksi ikan tidak tercapai	Pemerintah dan stakeholder
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	Kurangnya sumber daya manusia dalam memenuhi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Jumlah SDM kurang dan fasilitas yang kurang memenuhi standar untuk menunjang urusan pemerintahan	Kegiatan yang ada kurang maksimal atau tidak berjalan efektif	Pemerintah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Adanya pelayanan atau pekerjaan yang terlambat untuk diselesaikan	Risiko Operasional	Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten di PPP Larangan	Kebutuhan pengguna jasa layanan pelabuhan yang tidak terpenuhi	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Terlambatnya penyelesaian urusan tata usaha yang ada di PPP Larangan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam penyelesaian urusan tata usaha di PPP Larangan	Terlambatnya realisasi program dan kegiatan yang ada di PPP Larangan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	Kerusakan ekosistem dan sumber daya ikan, penurunan pendapatan masyarakat	Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	Rendahnya kualitas dan kuantitas garam	Risiko Operasional	Aktivitas produksi garam masih bersifat konvensional	Kebutuhan garam tidak terpenuhi dan daya jual produk garam rendah	Petambak garam
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	Pelaku usaha tidak mendapatkan ijin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Menteri Kelautan dan Perikanan	Risiko Operasional	Pemanfaatan ruang yang ajukan pelaku usaha tidak sesuai dengan Perda Nomor 08 Tahun 2024 tentang RTRWP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	Pelaku usaha tidak dapat menjalankan kegiatan berusaha	Pemerintah daerah, nelayan, masyarakat pesisir, pelaku usaha perikanan kelautan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Terjadinya serangan hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya produksi	Risiko Operasional	Pembudidaya ikan belum bisa melakukan pengendalian dan adaptasi	Produksi perikanan budidaya dan pendapatan pembudidaya menurun	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya konsumsi ikan	Risiko Operasional	Edukasi tentang pentingnya mengkonsumsi ikan tidak menyeluruh	Masyarakat tidak mengetahui tentang pentingnya mengkonsumsi ikan	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Lokasi kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir rawan terjadinya pelanggaran dan berpotensi terdampak akibat adanya bencana alam seperti abrasi, gelombang tinggi dan perubahan iklim	Risiko Operasional	Kurangnya pengetahuan, informasi, pengawasan dan upaya mitigasi yang tepat, cepat dan akurat dalam mengidentifikasi karakteristik spesifik dari lokasi kegiatan rehabilitasi	Luasan ekosistem pesisir yang direhabilitasi tidak terpenuhi	Masyarakat pesisir, Instansi Pemerintah
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Risiko Operasional	Kurangnya kepedulian nelayan terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal dan penggunaan peralatan tangkap yang ramah lingkungan	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan	Masyarakat dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat kurang maksimal karena anggaran yang tersedia berkurang karena efisiensi	Risiko Operasional	Jumlah anggaran masih kurang dari pemenuhan kebutuhan operasional dan pentingnya peningkatan kompetensi bagi ASN	Terhambatnya pencapaian target maksimal pada realisasi fisik dan anggaran pada program pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah .	Pimpinan dan Seluruh pegawai CDK Barat
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Bibit mangrove dan cemara laut yang mengalami kekeringan atau mati pada saat masa pemeliharaan	Risiko Operasional	Cuaca di pesisir yang tidak menentu seperti gelombang tinggi dan curah hujan yang menurun saat musim kemarau	Persentase bibit yang bertahan pasca masa pemeliharaan menjadi rendah	Masyarakat pesisir
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Terjadinya peningkatan kasus pelanggaran	Risiko Operasional	Kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap kelengkapan dokumen berusaha	Kapal perikanan beroperasi tanpa dilengkapi dokumen periznan yang berlaku	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Ketergantungan Nakhoda dan ABK dari instansi lain	Risiko Operasional	Tidak ada tenaga nakhoda dan ABK Kapal Pengawasan CDK Wilayah Selatan	Kegiatan Pengawasan terhambat	Tim Pengawasan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Lokasi penanaman mangrove kurang ideal untuk direhabilitasi	Risiko Operasional	Lokasi penanaman mangrove berada pada pesisir yang berbatasan langsung dengan laut	Luasan lahan yang direhabilitasi tidak mencapai target	CDK Timur dan Masyarakat Pesisir
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Tidak terawasinya WPPNRI 712 wilayah perairan pantai utara bagian timur dari kegiatan Unreported and Unregulated (IUU) Fishing	Risiko Operasional	Periode patroli pengawasan yang rendah	Kasus IUU meningkat	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha bidang Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan yang berlaku	Pelaku usaha tidak tertib aturan	Pemerintah Daerah, Masyarakat, pemangku kepentingan/stakeholder dan Lingkungan
Indikator Kegiatan								
1	Sasaran Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Perubahan peraturan perundangan	Risiko Kebijakan	Perubahan kebijakan prioritas	Program tidak mampu mengakomodir perubahan kebijakan prioritas	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terlambatnya penyampaian data kepegawaian	Risiko Operasional	Pegawai Tidak menyampaikan pembaharuan data terkait kepegawaian	Pegawai menerima Kelebihan/kekurangan Gaji dan Tunjangan	Dinas

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan	Duplikasi data nelayan calon penerima bantuan asuransi	Risiko Operasional	Basis data nelayan yang sudah menerima bantuan asuransi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum terintegrasi	Alokasi bantuan asuransi nelayan menjadi tidak merata dan kurang tepat sasaran	Nelayan
2	Sasaran Sub Kegiatan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya	Nelayan atau awak kapal perikanan tidak dapat bekerja sesuai dengan prosedur diatas kapal	Risiko Operasional	Nelayan atau awak kapal perikanan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang minim mengenai keselamatan kerja dan prosedur kerja di atas kapal	1. Resiko kecelakaan pada kapal perikanan; 2.Nelayan tidak bisa mendapatkan sertifikat keterampilan dan kompetensi	Pemerintah dan Pelaku Usaha perikanan tangkap/ Nelayan
3	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa	Pendaratan ikan hasil tangkapan diluar kawasan pelabuhan	Risiko Operasional	Pembongkaran ikan di dermaga labuh penuh dan antri	Jumlah ikan yang didaratkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Pemerintah dan pelaku usaha perikanan tangkap

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Ketertiban nelayan yang rendah dalam melengkapi dokumen kapal perikanan sesuai aturan yang berlaku dan memberikan gratifikasi untuk dibantu dipercepat dokumen perizinannya.	Risiko Fraud	Keterbatasan kemampuan SDM nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	Denda Administrasi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku;	Pelaku Usaha Sektor Perikanan Tangkap
5	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang disusun	Ketidaksesuaian rencana pengembangan pelabuhan perikanan dengan peruntukan ruang laut dalam dokumen RTRW	Risiko Legal	Belum terakomodasinya rencana pengembangan pelabuhan perikanan dalam dokumen RTRW	Rencana pengembangan pelabuhan perikanan tidak dapat diimplementasikan	Pemerintah
1	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku	Nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Tidak optimalnya peningkatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, atau fasilitas penunjang yang dibangun/direhabilitasi sehingga berpotensi menghambat terlaksananya fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan.	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran, keterlambatan proses pengadaan, keterbatasan SDM pengelola kegiatan, kondisi cuaca yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan.	Fasilitas pelabuhan tidak berfungsi optimal sehingga menghambat pelaksanaan fungsi pemerintahan pelabuhan (pengaturan, pengawasan, dan pelayanan kapal perikanan) serta fungsi perusahaan pelabuhan (pelayanan tambat labuh, bongkar muat ikan, dan aktivitas usaha perikanan).	PPN Tegalsari, Nelayan, Pelaku usaha, Masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan
3	Sasaran Sub Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kerusakan komponen instalasi listrik/penerangan	Risiko Operasional	Kurangnya ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan yang sesuai dengan kebutuhan bangunan kantor.	Gangguan operasional pada gedung bangunan kantor	PPN Tegalsari, Nelayan dan Pelaku Usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pelayanan administrasi kantor dan masyarakat kurang maksimal	Risiko Operasional	Terbatasnya anggaran penyediaan listrik, air dan internet serta keterbatasan SDM	Pelayanan masyarakat dan pelaksanaan administrasi kantor terganggu	Masyarakat
5	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Tidak optimalnya penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sehingga berpotensi menghambat pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran pemeliharaan, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, serta belum optimalnya perencanaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan.	Kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya tidak terpelihara dengan baik sehingga dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.	PPN Tegalsari, masyarakat pengguna layanan
1	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Beberapa bangunan kios ikan dan warung makan mengalami kerusakan dan tidak layak pakai	Risiko Operasional	Beberapa bangunan kios sudah dimakan usia dan belum adanya anggaran pendukung	Kegiatan ekonomi para pelaku usaha mengalami kelesuan sehingga menurunkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Pelaku usaha, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Minimnya kerjasama dan dukungan dari stakeholder diluar pelabuhan dalam mengembangkan kawasan	Risiko Kemitraan	Kurangnya koordinasi secara intens dengan instansi diluar PPP Asemdayong	Tidak ada nya dukungan yang maksimal dari luar instansi PPP Asemdayong	PPP Asemdayong, Masyarakat
3	Sasaran Sub Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang ada	Risiko Kepatuhan	Pengawasan operasional penangkapan ikan belum dilaksanakan secara berkala	Nelayan dan para pemilik kapal kurang peduli terhadap fungsi dan keberadaan kantor PPP Asemdayong	Masyarakat, Nelayan dan Pemilik Kapal
4	Sasaran Sub Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kerusakan komponen pendukung dan instalasi listrik/penerangan	Risiko Operasional	Penggunaan komponen listrik secara terus menerus dan instalasi jaringan listrik yang sudah termakan usia	Pelayanan administrasi perkantoran terganggu	Masyarakat, PPP Asemdayong
5	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pelayanan administrasi kantor dan masyarakat kurang maksimal	Risiko Operasional	Terbatasnya anggaran penyediaan listrik, air dan internet serta keterbatasan SDM	Pelayanan masyarakat dan pelaksanaan administrasi kantor terganggu	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Minimnya pendukung operasional / peralatan kantor dan usia kendaraan yang sudah tua, serta gedung kantor yang sudah mulai rusak	Risiko Operasional	Kurang tersedianya anggaran pendukung peralatan dan usia gedung yang sudah tua	Waktu pelayanan pada masyarakat semakin lama serta kenyamanan bekerja berkurang	Masyarakat, PPP Asemdayong
1	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Tidak optimalnya peningkatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, atau fasilitas penunjang yang dibangun/direhabilitasi sehingga berpotensi menghambat terlaksananya fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan.	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran; keterlambatan proses pengadaan; keterbatasan SDM pengelola kegiatan; kondisi cuaca yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan.	Fasilitas pelabuhan tidak berfungsi optimal sehingga menghambat pelaksanaan fungsi pemerintahan pelabuhan (pengaturan, pengawasan, dan pelayanan kapal perikanan) serta fungsi perusahaan pelabuhan (pelayanan tambat labuh, bongkar muat ikan, dan aktivitas usaha perikanan).	PPP Wonokerto, Nelayan pengguna pelabuhan, Pelaku usaha perikanan, Masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tidak optimalnya peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah akibat potensi penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan administrasi perkantoran.	Risiko Operasional	Keterbatasan pengawasan internal, pemahaman pegawai terhadap tata kelola administrasi yang belum merata, serta belum optimalnya penerapan sistem pengendalian administrasi.	Menurunnya kualitas pelayanan administrasi, terjadinya ketidaktertiban administrasi, serta berpotensi menimbulkan kerugian dan menurunkan akuntabilitas perangkat daerah.	PPP Wonokerto, masyarakat pengguna layanan
3	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Tidak optimalnya penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sehingga berpotensi menghambat pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran pemeliharaan, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, serta belum optimalnya perencanaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan.	Kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya tidak terpelihara dengan baik sehingga dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.	PPP Wonokerto, masyarakat pengguna layanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Anggaran pembangunan/rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	Risiko Kebijakan	Alokasi anggaran kurang untuk pembangunan/rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	Fasilitas kepelabuhan belum memadai	Nelayan dan PPP Klidang Lor
2	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah dokumen kesyahbandaran yang diterbitkan tidak mencapai target	Risiko Kepatuhan	Jumlah kapal aktif menurun	Volume pelayanan kesyahbandaran menurun	PPP Klidang Lor
3	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tingkat kepercayaan pengguna jasa terhadap penyelenggaraan pelayanan kepelabuhan	Risiko Reputasi	Penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan	Tingkat kepuasan pengguna jasa menurun	PPP Klidang Lor
4	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Ketepatan laporan administrasi	Risiko Operasional	Data belum lengkap dan belum ada jadwal pelaporan	Penilaian kinerja kurang	PPP Klidang Lor

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah anggaran pemeliharaan aset	Risiko Operasional	Banyak aset dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	Aset tidak berfungsi optimal	Nelayan, Pelaku Usahan dan PPP Klidang Lor
1	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Nelayan dan Bakul tidak aman dalam melakukan aktivitas di Pelabuhan	Risiko Operasional	Anggaran pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan kecil	Pendapatan nelayan dan bakul menurun	bakul dan nelayan
2	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Penerbitan dokumen kesyahbandaran ilegal	Risiko Kebijakan	Banyaknya dokumen perijinan	mencari jalan pintas dalam kepengurusan dokumen	nelayan, ppp tawang
3	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	belum ada standarisasi layanan	Risiko Operasional	SDM rendah	kualitas layanan menurun	pegawai internal
4	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	masih ada jasa penunjang urusan pemda yang belum teridentifikasi	Risiko Operasional	tidak adaptif terhadap perubahan	bias dalam penganggaran	pegawai internal

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	tidak ada identifikasi BMD	Risiko Operasional	tidak adanya monev BMD	banyak BMD yang tidak ada anggaran pemeliharaan	pegawai internal
1	Sasaran Program	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak berfungsi optimal	Risiko Fraud	Penerapan kebijakan prioritas	Pelayanan kepelabuhanan terganggu dan kurang optimal	Nelayan dan pelaku usaha perikanan
2	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar Layanan tidak tercapai,Peralatan pendukung administrasi perkantoran yang belum tersedia	Risiko Operasional	Pelaksanaan kegiatan belum sesuai SOP yang sudah ditetapkan,Keterbatasan anggaran dalam penyediaan peralatan pendukung administrasi perkantoran	Waktu pelayanan kepada pengguna jasa menjadi lebih lama (tidak sesuai standar layanan),Kegiatan administrasi perkantoran di PPP Morodemak yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal	Masyarakat dan pelaku usaha perikanan Pengguna Jasa, PPP Morodemak

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun tidak tersusun,Terham bat dalam penyelesaian urusan tata usaha yang ada di PPP Morodemak	Risiko Operasional	Kawasan dan kantor pelabuhan yang terendam banjir ROB,Data dukung kepalabuhanan belum lengkap	Penyediaan Jasa Penunjang tidak optimal,Terhamb atnya realisasi program dan kegiatan yang akan di laksanakan di PPP Morodemak	Nelayan, Pelaku Usaha Perikanan, PPP Morodemak
4	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Aset barang milik daerah yang semakin rusak,Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak berfungsi baik	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang milik daerah	Aset barang milik daerah yang tidak bisa digunakan lagi	PPP Morodemak,Masy arakat Pengguna Jasa

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL /KKPR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat	Dokumen kepelabuhanan perikanan tidak lengkap	Risiko Kemitraan	Fasilitas pelabuhan tidak memadai	Tidak ada investor yang dapat menanamkan modal	Investor
2	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Terjadi IUU fishing	Risiko Operasional	Sarpras tidak memadai	Produksi perikanan tidak terdata	Nelayan dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jaringan listrik dan internet kantor padam	Risiko Operasional	Tidak tersedia anggaran listrik dan internet	Pelayanan kepada masyarakat tidak terlaksana	Masyarakat penerima layanan
4	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Relutasi pelabuhan buruk	Risiko Reputasi	Tidak terlaksananya koordinasi baik secara langsung maupun surat menyurat	Koordinasi dengan instansi lain terhambat	PPN Tasikagung
5	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Muncul komplain dari masyarakat karena pelayanan terhambat	Risiko Reputasi	Tidak dilakukan pemeliharaan barang milik negara	Kegiatan pelayanan terhambat	Masyarakat
1	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen kepelabuhan dan kapal nelayan tidak lengkap	Risiko Kepatuhan	Kebijakan perikanan tangkap memberatkan nelayan dan sering berubah - ubah	Nelayan melaut tanpa kelengkapan dokumen / ilegal	Nelayan, PPP Karimunjawa, KKP, DKP

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Kurangnya dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	Risiko Kebijakan	Kebijakan terkait kelengkapan dokumen kepelabuhanan terkendala keterbatasan anggaran	Pelabuhan Perikanan kurang dapat berkembang lebih baik	PPP Karimunjawa, Nelayan, DKP Jateng
3	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Nelayan enggan membayar retribusi tambat labuh dan pas masuk	Risiko Kebijakan	Kondisi kolam pelabuhan yang sudah dangkal dan banyak yang rusak	pendapatan pemerintah dari retribusi berkurang	PPP Karimunjawa, DKP Jateng, Pemprov Jateng, Nelayan
4	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan administrasi umum perangkat daerah kurang sesuai dengan standart layanan	Risiko Operasional	Ketidak cakapan dan kurangnya SDM secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan sarana dan prasarana	Pelayanan administrasi umum perangkat daerah kuarng optimal	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan
5	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan Penyediaan Jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, serta lambatnya proses penghapusan aset yang rusak	Aset dan Barang milik pemerintah yang sudah tidak bisa dipakai	PPP Karimunjawa dan pengguna kawasan (pengguna aset)
1	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Adanya kerusakan sarana dan prasarana produksi budidaya di loka air laut	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan di loka air laut	target produksi ikan tidak tercapai	Pemerintah dan stakeholder
2	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan	Turunnya produksi benih ikan endemik yang dikembangkan	Risiko Operasional	Turunnya produktifitas induk ikan endemik	Target produksi ikan tidak tercapai	Pemerintah dan stakeholder
3	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya kerusakan sarana dan prasaranan budidaya ikan di loka air tawar dan payau	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan di loka air tawar dan payau	Target produksi ikan tidak tercapai	Pemerintah dan stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Potensi penurunan kualitas pelayanan administrasi umum daerah	Risiko Operasional	Jumlah SDM kurang memenuhi	Kepuasan masyarakat terhadap layanan tidak tersampaikan	Pemerintahan dan Masyarakat Pengguna layanan
5	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Jumlah SDM kurang memenuhi	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	pemerintah
6	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemanfaatan BMD kurang optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran serta kesulitan dalam pengusulan dan penghapusan BMD	Pemanfaatan BMD kurang optimal	Pemerintah
1	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku	Nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Akses jalan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah kunjungan dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
3	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Kolam pelabuhan yang semakin dangkal	Risiko Operasional	Sedimentasi lumpur yang masuk ke kolam pelabuhan dari aliran Sungai Bongkok	Penurunan jumlah trip harian dan hasil tangkapan ikan di kawasan pelabuhan	-Nelayan -Pelaku Usaha
4	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Dokumen pengembangan pelabuhan perikanan yang dimiliki masih belum lengkap	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan	Terhambatnya pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
5	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Peralatan pendukung administrasi perkantoran yang tidak tersedia	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam penyediaan peralatan pendukung administrasi perkantoran	Kegiatan administrasi perkantoran di PPP Larangan yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Biaya pengeluaran yang tidak terduga dari belanja langganan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Risiko Operasional	Adanya belanja langganan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang berlebihan	Realisasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan RAB yang sudah disusun	PPP Larangan
7	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Aset barang milik daerah yang semakin rusak	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang milik daerah	Aset barang milik daerah yang tidak bisa digunakan lagi	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
1	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan	Tidak terselesaikannya penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan secara tepat waktu	Risiko Operasional	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masyarakat	masih terjadinya pelanggaran, kerusakan ekosistem sumberdaya ikan, konflik sosial, kerugian ekonomi	Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha pergarman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/masyarakat pembudidaya air payau dan pergarman terhadap regulasi perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan	Risiko Operasional	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masyarakat	Pelaku usaha/masyarakat rentan terkena sanksi, terjadi kerusakan ekosistem sumber daya ikan	Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha
1	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menyetujui usulan kawasan konservasi	Risiko Operasional	Kategori kawasan konservasi yang diusulkan tidak sesuai dengan Permen KP No 31 Tahun 2020	Hasil tangkapan nelayan menjadi berkurang	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha
2	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diusulkan tidak sesuai dengan Informasi Kesesuaian Ruang Laut yang diterbitkan	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan terkait pemanfaatan ruang laut	Pengelolaan ruang laut menjadi tidak optimal	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Petambak garam menghasilkan garam tidak sesuai standar	Risiko Operasional	Rendahnya motivasi petambak garam dikarenakan tingkat harga dan kondisi cuaca (kemarau basah)	Pemenuhan kebutuhan garam industri tidak tercapai	Petambak garam
4	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Masyarakat pesisir tidak terampil dalam pengelolaan keuangan baik kelompok maupun perorangan	Risiko Operasional	Masyarakat pesisir belum bisa menentukan skala prioritas finansial	Kesejahteraan masyarakat pesisir tidak meningkat	Perempuan/taruna pesisir
5	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang meningkat teknologinya	Adanya praktek suap dan pengaturan penyedia	Risiko Fraud	Hubungan pertemanan/kekerabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tersebut	Kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang meningkat teknologinya	Adanya gratifikasi dari penerima bantuan	Risiko Fraud	Menginginkan agar penerima bantuan dapat diberikan bantuan kembali sesering mungkin	Profesionalitas pemilik pekerjaan berkurang	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan	Pembudidaya ikan belum melaksanakan kegiatan pembudidayaan sesuai dengan standar	Risiko Operasional	Pembudidaya Ikan belum memahami pentingnya budidaya ikan sesuai standar	Pembudidaya Ikan tidak meningkat keterampilannya sehingga produk perikanan budidaya tidak mampu berdaya saing	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
2	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana	Rendahnya tingkat pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima	Risiko Operasional	Bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan pembudidaya ikan	Hasil produksi perikanan budidaya tidak optimal	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
3	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jenis teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Pembudidaya ikan belum menerapkan teknologi pada kegiatan budidayanya	Risiko Operasional	Pembudidaya ikan tidak mampu menyediakan alat penunjang teknologi dan biaya operasionalnya tinggi	Produksi budidaya ikan rendah karena masih menggunakan sistem budidaya tradisional	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
4	Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produk Olahan Ikan	Akses pasar pelaku usaha terbatas	Risiko Operasional	Perizinan berusaha dianggap rumit dan memerlukan biaya tambahan	Produksi Olahan Hasil Perikanan menurun	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
5	Sasaran Kegiatan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan	Kompetensi SDM dan pelaku usaha perikanan menurun	Risiko Operasional	Keterbatasan akses informasi, teknologi, dan jejaring usaha	Produk perikanan tidak mampu berdaya saing	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kegiatan kontinuitas bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan; dan distrbusi produk perikanan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku bagi industri pengolahan ikan tidak optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan sistem informasi pasokan bahan baku dan distribusi	Kontinuitas produksi perikanan terhambat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
1	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	Risiko Kepatuhan	Kurangnya pemahaman masyarakat/nelayan sekitar tentang zonasi dan aturan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	Kerusakan ekosistem terumbu karang Menurunnya hasil tangkapan nelayan	Masyarakat pesisir, Nelayan dan Lingkungan
2	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Keselamatan petugas pada saat survei/monitoring di lapangan	Risiko Operasional	1. Arus yang kencang dan gelombang yang tinggi 2. Minimnya sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja	Kecelakaan Kerja / Kematian	Petugas, Instansi Pemerintah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman yang cukup tinggi	Risiko Operasional	1. Kualitas bibit yang tidak sesuai standar, 2. Metode dan waktu penanaman yang kurang tepat, 3. Jarak dan kondisi lingkungan sekitar lahan penanaman yang tidak sesuai, 4. Kegiatan pemeliharaan pasca penanaman yang tidak maksimal.	Bibit mangrove yang ditanam tidak tumbuh (mati), Bibit hilang terbawa ombak/gelombang	Masyarakat pesisir, Instansi Pemerintah
4	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Risiko Operasional	Belum optimalnya tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk memberikan efek jera	Tidak ada efek jera bagi para pelaku usaha yang melanggar jika sanksi penanganan tindak lanjut belum optimal	OPD dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Rendahnya tingkat penerbitan HPK dan SLO Kapal perikanan Kewenangan Provinsi	Risiko Kepatuhan	Masih rendahnya kepatuhan terkait kepemilikan, kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi	Kegiatan penangkapan ikan oleh kapal perikanan kewenangan provinsi tidak terlapor dan terawasi	OPD dan Masyarakat
6	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kurang terpenuhinya sarana Peralatan dan perlengkapan kantor	Risiko Operasional	Jumlah anggaran pemenuhan Peralatan Kantor yang sangat terbatas	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat tidak memiliki peralatan dan perlengkapan kantor yang maksimal untuk menunjang kinerja.	Pimpinan dan Pegawai Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kurang terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun	Risiko Operasional	Peningkatan penggunaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan penyediaan jasa penunjang urusan daeran menjadi terkendala terlambat akibat dari kurang terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pimpinan dan Seluruh pegawai CDK Barat
8	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kurangnya terpenuhinya jumlah anggaran untuk melakukan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Risiko Operasional	Terbatasnya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Dampaknya kinerja karyawan terhambat 2. keselamatan jiwa karyawan bisa terancam	Pimpinan dan Seluruh pegawai CDK Barat
1	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	Risiko Operasional	Anggaran dan SDM pengelola tidak memadai	Nilai EVIKA masih sangat rendah	SUOP
2	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil	Tindak lanjut pelanggaran kegiatan usaha tidak terselesaikan	Risiko Operasional	Kurangnya jumlah petugas tindak lanjut pelanggaran yang menangani	Terjadinya peningkatan tindak pelanggaran pelaku usaha	Masyarakat dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan Kapal Pengawas	Risiko Operasional	Biaya operasional dan pemeliharaan kapal pengawas yang tinggi	Banyak pelaku usaha dan kapal perikanan yang beroperasi tidak terperiksa	Masyarakat dan Lingkungan
4	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Keterbatasan SDM Pengawas Perikanan	Risiko Operasional	Kurangnya jumlah petugas penerbit HPK dan SLO kapal perikanan	Penerbitan HPK dan SLO yang tidak optimal	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan yang menggunakan kapal diatas 5 GT
5	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Harga barang di GO lebih tinggi dari RAB sehingga tidak dapat melakukan transaksi	Risiko Operasional	Tidak dapat transaksi pembelian barang lewat GO	Kegiatan layanan administrasi terhambat	Pegawai CDK Wilayah Selatan
6	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	Risiko Operasional	Penggunaan listrik yang tidak bisa diprediksi karena menggunakan gedung kantor bersama	Tidak dapat dilakukan pembayaran listrik	Pegawai CDK Wilayah Selatan
7	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	Risiko Operasional	Anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan barang	Kegiatan operasional terhambat	Pegawai CDK Wilayah Selatan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan konservasi tidak terkelola secara optimal	Risiko Operasional	1. Kurangnya anggaran dalam mengelola kawasan konservasi 2. Kurangnya SDM pengelola 3. Kurangnya kompetensi yang dimiliki pengelola dalam mengelola kawasan konservasi	Nilai EVIKA mengalami penurunan/rendah	SUOP
2	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Petugas pengawasan tidak kompeten	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman petugas terhadap peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan	Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan tidak tertangani	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan
3	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Belum adanya Peraturan perundang-undangan di tingkat Provinsi yang mengatur sanksi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	Risiko Operasional	1. Peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang selalu diperbaharui 2. Belum adanya Peraturan Gubernur yang mengatur sanksi sektor kelautan dan perikanan	1. Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan tidak tertangani sesuai ketentuan yang berlaku 2. Pelaku Usaha (kewenangan provinsi) yang melanggar tidak memiliki efek jera	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	Tidak terawasinya WPPNRI 712 dari kegiatan IUU Fishing	Risiko Operasional	Periode patroli pengawasan yang terbatas	Kasus IUU Fishing meningkat	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Stakeholder dan Lingkungan
5	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Pelayanan penerbitan HPK dan SLO rendah	Risiko Operasional	Lokasi Pelabuhan tempat penerbitan HPK dan SLO jauh dari kantor CDK Timur	HPK dan SLO tidak terbit	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan
Indikator Sub Kegiatan								
1	Sasaran Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan prioritas tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan	Risiko Operasional	Keterlambatan penyampaian usulan kegiatan	Target kinerja yang tidak tercapai secara optimal	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Sasaran Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Data yang digunakan dalam evaluasi belum lengkap atau berbeda dengan data pada sistem pelaporan lainnya.	Risiko Operasional	Data yang digunakan masih perlu perbaikan atau belum divalidasi sehingga memperlambat proses penyusunan	Analisis capaian kinerja menjadi kurang akurat karena data yang digunakan belum lengkap atau kurang valid.	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota tidak mengirimkan data hingga waktu yang ditentukan	Risiko Operasional	Pengambilan data di kabupaten/kota yang terlambat	Data statistik yang tersaji belum lengkap	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tidak tersedia data yang valid	Risiko Operasional	Sampling di kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat	Data yang tersedia tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya	Masyarakat
5	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tidak terupdatenya data kepegawaian	Risiko Operasional	Kesalahan atau ketidaklengkapan data kepegawaian	Terjadinya ketidaksesuaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kelebihan atau kekurangan bayar)	ASN
6	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terjadinya kesalahan dalam penyusunan dokumen administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN.	Risiko Kepatuhan	Kurangnya ketelitian dalam penyusunan dan pemeriksaan dokumen administrasi keuangan.	Terjadi ketidaksesuaian dokumen administrasi keuangan sehingga memerlukan perbaikan dan penyesuaian dalam proses pertanggungjawaban keuangan	SKPD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terjadinya kesalahan dalam penginputan data laporan keuangan.	Risiko Operasional	Kurangnya ketelitian dalam proses input dan verifikasi data.	Laporan keuangan menjadi tidak akurat dan memerlukan revisi/perbaikan.	SKPD
1	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang semakin rusak	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPN Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	PPN Tegalsari, Nelayan dan Pelaku Usaha
2	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum	DKP Prov. Jateng, PPN Tegalsari, dan pelaku usaha Perikanan Tangkap

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Kerusakan bangunan/kios penggerehan di kawasan pelabuhan	Risiko Operasional	Bangunan yang sudah berumur	Pelaku usaha tidak dapat menyimpan produknya secara baik, kualitas produk menurun	Pelaku usaha/pedagang
2	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Kerusakan beberapa gedung kantor pelayanan	Risiko Operasional	Usia gedung sudah berumur sehingga terjadi kerusakan dan kerapuhan di beberapa bagian	Pelayanan kepada masyarakat terganggu sserta suasana bekerja yang kurang nyaman	PPP Asemdayong, masyarakat pengguna layanan
3	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Pendangkalan kembali dermaga pelabuhan dan muara Sungai Elon sebagai alur utama masuk pelabuhan	Risiko Operasional	Sedimentasi akibat sedimen kiriman yang terbawa dari hulu sungai	Kapal nelayan tidak dapat beroperasi/melau t	Pemilik Kapal, Nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Kawasan PPP Wonokerto yang kotor dan kumuh dapat menurunkan kualitas lingkungan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat di sekitar pelabuhan.	Risiko Operasional	Rendahnya kesadaran pengguna pelabuhan (nelayan, pedagang, dan pengunjung) dalam menjaga kebersihan lingkungan; Keterbatasan sarana prasarana kebersihan seperti tempat sampah dan sistem drainase; Terjadinya rob yang membawa sampah dan menggenangi kawasan pelabuhan sehingga memperburuk kondisi	Menurunnya kualitas lingkungan dan kebersihan kawasan pelabuhan; Meningkatnya potensi penyakit akibat lingkungan yang tidak higienis dan genangan air rob; Menurunnya kenyamanan aktivitas nelayan dan masyarakat di kawasan PPP Wonokerto; Memburuknya citra kawasan pelabuhan sebagai pusat kegiatan perikanan	PPP Wonokerto, masyarakat kawasan PPP Wonokerto

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Kapal perikanan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi tertangkap saat patroli pengawasan dan menghambat aktivitas penangkapan serta citra pelabuhan.	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran nelayan untuk tertib dokumen dan penggunaan API ramah lingkungan	Kapal perikanan berpotensi terkena penertiban atau penindakan saat patroli pengawasan; Menurunnya citra pelabuhan apabila masih terdapat kapal yang tidak mematuhi ketentuan perikanan	Nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Hasil tangkapan yang tidak berkualitas menyebabkan pendapatan nelayan stagnan atau menurun, serta berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan di kawasan PPP Wonokerto.	Risiko Operasional	Penanganan hasil tangkapan di atas kapal dan saat pendaratan belum optimal; Pemahaman nelayan terhadap penanganan ikan yang baik masih terbatas meningkatkan produk hasil perikanan	Harga jual ikan menurun karena kualitas tidak terjaga; Pendapatan nelayan menurun; aktivitas ekonomi perikanan di kawasan PPP Wonokerto ikut menurun	Nelayan
4	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Proses bongkar muat ikan di kawasan PPP Wonokerto yang tidak lancar menyebabkan mutu hasil tangkapan tidak terjaga, sehingga menurunkan nilai jual ikan dan berdampak pada pendapatan nelayan.	Risiko Operasional	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bongkar muat; Penataan aktivitas bongkar muat yang belum tertib; Penanganan hasil tangkapan yang belum sesuai standar	Mutu hasil tangkapan ikan tidak terjaga; kapal nelayan tidak bisa sandar di dermaga sehingga harus sandar di dermaga lama yang tergenang rob	Masyarakat/konsumenten

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Rendahnya kualitas dan higienitas pengolahan hasil perikanan di PPP Wonokerto menyebabkan produk tidak memenuhi standar kesehatan dan berpotensi membahayakan konsumen serta menurunkan kepercayaan pasar.	Risiko Operasional	Masih banyak pengolah hasil perikanan melakukan aktivitas penjemuran di jalan yang tidak higienis karena keterbatasan fasilitas tempat penjemuran yang memadai	Produk hasil perikanan berpotensi terkontaminasi debu, kotoran, dan polutan sehingga menurunkan mutu produk serta berisiko terhadap kesehatan konsumen dan menurunkan kepercayaan pasar	Masyarakat/konsumen
6	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Kondisi TPI Wonokerto yang kotor dan kumuh menyebabkan mutu hasil tangkapan ikan yang dilelang menjadi tidak higienis, sehingga menurunkan nilai jual dan kepercayaan pembeli.	Risiko Operasional	Kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan di area TPI; Rendahnya kesadaran pedagang dan pengguna TPI dalam menjaga kebersihan; Keterbatasan sarana kebersihan dan sanitasi di kawasan TPI	Mutu dan higienitas ikan menurun; Harga jual ikan menjadi lebih rendah; Menurunnya kepercayaan pembeli terhadap kualitas ikan di TPI; Menurunnya aktivitas lelang dan daya tarik pasar ikan	Masyarakat/konsumen, PPP Wonokerto

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di kawasan PPP Wonokerto, disertai kurangnya koordinasi antar pihak terkait, fasilitas pendukung, serta pemahaman nelayan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan kapal	Risiko Operasional	Kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan dan masyarakat pelabuhan; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan kapal; Terbatasnya fasilitas pendukung keselamatan di kawasan pelabuhan; Koordinasi antar instansi dan pihak terkait belum optimal.	Meningkatnya potensi kecelakaan atau gangguan keselamatan kapal; Aktivitas pelabuhan menjadi kurang tertib dan aman; Menurunnya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna pelabuhan; Berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan pengguna pelabuhan.	PPP Wonokerto, Nelayan, masyarakat di kawasan PPP Wonokerto

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persekongkolan antara pemilik pekerjaan dengan calon penyedia jasa menyebabkan proses pemilihan tidak objektif dan berpotensi menunjuk penyedia jasa yang tidak kompeten, sehingga menurunkan kualitas hasil pekerjaan serta berdampak pada memburuknya citra Dinas Kelautan dan Perikanan	Risiko Fraud	Kurangnya transparansi dalam proses pemilihan penyedia jasa; Pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa belum optimal; Adanya potensi konflik kepentingan antara pihak yang terlibat dalam proses pengadaan	Kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis; Potensi kerugian keuangan negara; Menurunnya kepercayaan publik terhadap instansi; Potensi temuan audit oleh aparat pengawas	PPP Wonokerto, DKP Prov. Jateng, masyarakat kawasan PPP Wonokerto

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banyaknya fasilitas kepelabuhanan di PPP Wonokerto yang rusak menyebabkan sarana dan prasarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menghambat pelayanan dan aktivitas operasional pelabuhan.	Risiko Operasional	Rob yang menggenangi kawasan PPP Wonokerto; usia infrastruktur dan kurangnya pemeliharaan	Aset pelabuhan tidak termanfaatkan secara optimal dan berpotensi mangkrak; Menurunnya produktivitas kawasan pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan; Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan aset; Munculnya kesan kawasan pelabuhan kurang tertata dan kurang produktif pelabuhan menjadi tidak	PPP Wonokerto, DKP Prov. Jateng, masyarakat kawasan PPP Wonokerto
1	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Jumlah anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan terbatas	Risiko Operasional	Sarana dan prasaran pelabuhan belum lengkap	pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha terganggu	Nelayan, Pelaku Usahan dan PPP Klidang Lor

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	pelayanan fungsi pemerintahan dan pengusahaan belum optimal	Risiko Operasional	Jumlah Anggaran yang tersedia serta SDM yang dimiliki terbatas	pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha belum optimal	Nelayan, Pelaku Usahan dan PPP Klidang Lor
3	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen instalasi listrik dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	Risiko Operasional	Komponen instalasi listrik dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	Komponen instalasi listrik belum berfungsi optimal	Nelayan, Pelaku Usahan dan PPP Klidang Lor
4	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah anggaran peralatan dan perlengkapan kantor terbatas	Risiko Operasional	peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	peralatan dan perlengkapan kantor belum berfungsi optimal	Nelayan, Pelaku Usahan dan PPP Klidang Lor
5	Sasaran Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketepatan laporan adminitrasi	Risiko Operasional	Data belum lengkap	Penilaian kinerja kurang	PPP Klidang Lor
6	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Profesionalitas pegawai di pelabuhan perikanan	Risiko Operasional	Pegawai tidak berkompeten	Operasional kantor terhambat dan mutu pelayanan turun	Nelayan dan PPP Klidang Lor

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Anggaran tidak dibayarkan tepat waktu	Risiko Operasional	Anggaran yang terbatas	Pelayanan tidak berjalan dengan baik	Nelayan, Pelaku Usahan dan PPP Klidang Lor
8	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa pelayanan terlambat terbayarkan	Risiko Operasional	Anggaran yang terbatas	Pelayanan tidak berjalan dengan baik	Nelayan, Pelaku Usahan dan PPP Klidang Lor
9	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional terbatas	Risiko Operasional	Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	Kendaraan Dinas Operasional belum berfungsi optimal	PPP Klidang Lor
10	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terbatas	Risiko Operasional	Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	Peralatan dan Mesin Lainnya belum berfungsi optimal	Nelayan, Pelaku Usahan dan PPP Klidang Lor
11	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah anggaran Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan Lainnya terbatas	Risiko Operasional	Gedung kantor dan bangunan Lainnya dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	Gedung kantor dan bangunan Lainnya belum berfungsi optimal	Nelayan, Pelaku Usahan dan PPP Klidang Lor

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan	Risiko Operasional	ketidaksesuaian spesifikasi sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional pelabuhan,	PAD menurun	nelayan, bakul
2	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	ketidakpatuhan pengguna pelabuhan terhadap peraturan yang berlaku.	Risiko Kepatuhan	banyaknya stakeholder yang ada dikawasan PPP	overlap tupoksi	nelayan, bakul
3	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kerusakan peralatan akibat kualitas komponen yang kurang baik.	Risiko Operasional	ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan kebutuhan instalasi	konsetling listrik	nelayan, bakul
4	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kehilangan atau penyalahgunaan perlengkapan kantor	Risiko Operasional	kurangnya perawatan	terhambatnya operasional kantor	pegawai internal
5	Sasaran Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	keterbatasan waktu yang menyebabkan pembahasan tidak berjalan secara maksimal.	Risiko Operasional	keterlambatan penyampaian undangan	koordinasi kurang optimal	stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kehilangan atau kerusakan dokumen selama proses pengiriman.	Risiko Operasional	kesalahan dalam penulisan alamat atau tujuan surat	keterlambatan pengiriman atau penerimaan surat	instansi lain
7	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	penghentian sementara layanan	Risiko Operasional	keterlambatan pembayaran tagihan	gangguan jaringan komunikasi, pemadaman listrik, serta keterbatasan pasokan air yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat.	pegawai, nelayan dan bakul
8	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kurangnya koordinasi antar petugas	Risiko Operasional	kurang optimalnya kinerja petugas pelayanan umum	keterlambatan pelaksanaan tugas pelayanan	nelayan, bakul
9	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	pencatatan dan pelaporan kondisi aset tidak tertib	Risiko Operasional	keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan	menurunnya fungsi dan nilai manfaat barang milik daerah	pegawai internal

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	kurangnya kapasitas petugas dalam pengoperasian dan pemeliharaan peralatan	Risiko Operasional	keterbatasan tenaga teknis yang kompeten dalam melakukan pemeliharaan	menurunnya kinerja atau fungsi peralatan dan mesin	pegawai internal
11	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	Risiko Operasional	belum adanya pengawasan pelaksanaan kegiatan secara berkala	keterlambatan pelaksanaan kegiatan	nelayan, bakul
1	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelabuhan yang semakin rusak akibat terendam banjir ROB	Risiko Operasional	Banjir ROB yang setiap hari menggenangi kawasan Pelabuhan dan keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPP Morodemak	Terganggunya aktivitas nelayan dan pelaku usaha serta penurunan ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	Nelayan,Pelaku Usaha Perikanan dan PPP Morodemak
2	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Adanya keterlambatan pelayanan atau pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Kantor dan kawasan yang sudah terendam banjir ROB dan Keterbatasan jumlah SDM yang di tugaskan pada bidang tersebut	Terhambatnya kebutuhan pengguna jasa layanan pelabuhan yang belum bisa terpenuhi	Nelayan,Pelaku Usaha Perikanan dan PPP Morodemak

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Adanya keterlambatan pelayanan atau pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu	Risiko Kepatuhan	Kurang Maksimalnya terkait pengadaan Jumlah paket komponen listrik/instalasi listrik yang di sediakan	Adanya keterlambatan pelayanan atau pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu	Pelaku Usaha Perikanan, Nelayan dan PPP Morodemak
4	Sasaran Program	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan pendukung administrasi perkantoran yang tidak tersedia/belum tersedia	Risiko Kebijakan	Keterbatasan anggaran dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan perkantoran	Kegiatan administrasi perkantoran di PPP Morodemak yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik	Nelayan,Pelaku Usaha Perikanan dan PPP Morodemak
5	Sasaran Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kurang maksimalnya kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Risiko Operasional	Banjir ROB yang setiap hari menggenangi kawasan Pelabuhan dan keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPP Morodemak	Terganggunya aktivitas nelayan dan pelaku usaha serta kurangnya koordinasi antar stekholder di kawasan Pelabuhan	Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdapat risiko ketidakefisienan operasional apabila jumlah penyediaan jasa surat-menyurat tidak direncanakan secara tepat.	Risiko Kepatuhan	keterlambatan pembuatan dan pengiriman surat, menurunkan kualitas pelayanan administrasi, serta menghambat proses komunikasi resmi. Sebaliknya, kelebihan penyediaan jasa dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal.	Keterlambatan proses administrasi dan pelayanan, Menurunnya efektivitas komunikasi resmi, Pemborosan anggaran operasional, Ketidakefisienan pemanfaatan sumber daya	PPP Morodemak

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terdapat risiko ketidaktepatan dan ketidaksesuaian informasi apabila jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan atau ketentuan yang berlaku	Risiko Operasional	Kurangnya monitoring terhadap pemakaian kebutuhan sumber daya air,Internet dan Listrik di kawasan PPP Morodemak	Informasi penggunaan layanan tidak akurat atau tidak lengkap,Keterlambatan dalam proses pelaporan administrasi,Kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan jasa dan Potensi ketidaksesuaian dengan ketentuan pelaporan yang berlaku	PPP Morodemak
8	Sasaran Program	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Adanya keterlambatan pelayanan atau pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Kantor dan kawasan yang sudah terendam banjir ROB dan Keterbatasan jumlah SDM yang di tugaskan di PPP Morodemak	Terhambatnya kebutuhan pengguna jasa layanan pelabuhan yang belum bisa terpenuhi secara maksimal	Nelayan,Pelaku Usaha Perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Sasaran Strategis	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang milik daerah	Aset barang milik daerah yang tidak bisa digunakan lagi di karenakan sudah semakin rusak	PPP Morodemak dan pengguna jasa layanan di PPP Morodemak
10	Sasaran Program	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang milik daerah	Aset barang semakin rusak	PPP Morodemak
11	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang sudah semakin rusak	Risiko Operasional	Kantor dan kawasan yang sudah terendam banjir ROB dan Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan di kawasan PPP Morodemak	Terganggunya aktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan yang membutuhkan pelayanan	Nelayan,Pelaku usaha perikanan serta Masyarakat
1	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Data produksi perikanan rendah	Risiko Kebijakan	Hasil tangkapan tidak didaratkan di PPN Tasikagung	Kebijakan pengembangan penangkapan ikan ditinjau kembali	Masyarakat nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Volume pelayanan dan jumlah kapal di kolam pelabuhan meningkat	Risiko Kebijakan	Pelayanan sesuai standar ISO	Kapal berdesak-desakan	Pelaku usaha
3	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Menerima komplain dari masyarakat	Risiko Operasional	Jaringan listrik rusak	Pelayanan tidak maksimal	Masyarakat
4	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Menerima komplain dari masyarakat	Risiko Operasional	Peralatan kantor rusak	Pelayanan terhambat	Masyarakat
5	Sasaran Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Informasi pengelolaan pelabuhan terhambat	Risiko Operasional	Tidak dilaksanakan koordinasi yang baik dengan stakeholder	Pengelolaan pelabuhan tidak sesuai arahan pimpinan	PPN Tasikagung
6	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat dan dokumen penting hilang	Risiko Operasional	Administrasi surat menyurat tidak dilaksanakan dengan baik	Riwayat disposisi tidak tercatat	PPN Tasikagung

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kondisi kantor tidak nyaman	Risiko Operasional	Kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor tidak tersedia	Kinerja petugas pelayanan rendah	Masyarakat
8	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ketertiban, keamanan dan kebersihan kawasan pelabuhan buruk	Risiko Operasional	Tidak tersedia tenaga K3	Kondisi pelabuhan tidak baik	Masyarakat dan OPD
9	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan dinas rusak	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan dinas operasional	Kegiatan lapangan terhambat	Petugas lapangan
10	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin rusak	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin	Petugas tidak dapat bekerja dengan optimal	Kantor PPN Tasikagung
11	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan gedung kantor tidak terlaksana	Risiko Operasional	Tidak tersedia anggaran yang cukup	Kerusakan gedung dan bangunan lain tidak terhindarkan	Pegawai PPN Tasikagung

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Fasilitas pelabuhan banyak yang rusak dan tidak layak	Risiko Operasional	Kurangnya pemeliharaan dan faktor usia bangunan	Pelayanan pelabuhan terganggu	PPP Karimunjawa, DKP Jateng, Nelayan
2	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Perbaikan fasilitas terhambat	Risiko Fraud	rekanan / penyedia barang kurang kompeten	kualitas barang/ fasilitas rendah	PPP Karimunjawa, DKP Jateng
3	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	Risiko Operasional	sarana prasarana PPP yang sangat terbatas, keterbatasan SDM pelayanan	Keperluan nelayan dan pelaku usaha tidak terlayani dengan baik	PPP Karimunjawa, Nelayan dan pelaku usaha perikanan
4	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	Risiko Fraud	Persekongkolan yang dilakukan pihak pengguna layanan dengan petugas lapangan	Kualitas hasil pekerjaan yang menyalahi prosedur dan menyalahi SOP yang ada	PPP Karimunjawa, Nelayan dan pelaku usaha perikanan
5	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Fungsi pengusahaan tidak dapat berjalan dengan baik	Risiko Fraud	Persekongkolan yang dilakukan pihak pengguna layanan dengan petugas lapangan	Penurunan kualitas output pekerjaan	PPP Karimunjawa dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)
6	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Penumpukan piutang oleh penyewa lahan	Risiko Fraud	Pengguna layanan atau mitra melanggar perjanjian yang telah disepakati	Target PAD Pelabuhan yang tidak terpenuhi	PPP Karimunjawa, DKP Jateng, Pemprov Jateng Nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi / SPK	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan terhadapnya pentingnya asuransi atau perlindungan	Nelayan tidak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami ketika bekerja	Nelayan, PPP Karimunjawa, KKP, DKP
8	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan paket mengalami keterlabatan / mundur	Risiko Operasional	Pihak rekanan kurang profesional	Pelayanan terganggu dan tidak terselenggara dengan optimal	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan
9	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tidak sesuai dengan kriteria	Risiko Operasional	Pihak rekanan kurang profesional	Pelayanan terganggu karena perangkat yang di gunakan berkualitas rendah	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan
10	Sasaran Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan
11	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan jasa surat menyurat tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya	Pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat tidak tercatat dengan baik	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah beban tagihan yang dibayarkan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran yang dibuat	Risiko Operasional	Beban tagihan yang dibayarkan terlalu besar dan melebihi anggaran yang tersedia	Pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan terganggu	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan
13	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan jasa surat menyurat tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya	Pelaksanaan kegiatan jasa pelayanan umum kantor tidak tercatat dengan baik	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan
14	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, serta lambatnya proses penghapusan aset yang rusak	Aset dan Barang milik pemerintah yang sudah tidak bisa dipakai	PPP Karimunjawa dan pengguna kawasan (pengguna aset)
15	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Proses pemeliharaan dan perawatan kurang optimal dan kurang tepat waktu	Risiko Operasional	Tenaga ahli yang kompeten tidak tersedia di Karimunjawa dan harus didatangkan dari Jepara	peralatan dan mesin lainnya cepat ,engalami kerusakan dan tidak optimal performans	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Proses pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kurang optimal	Risiko Operasional	kerusakan gedung / bangunan terlalu berat dan tidak mampu tercover pagu yang tersedia	kegiatan operasional dan pelayanan di PPP karimunjawa terganggu	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan
1	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut belum optimal	Risiko Operasional	Terbatasnya jumlah prasarana untuk budidaya ikan di laut	Produksi budidaya ikan di laut tidak optimal	Pemerintah dan Steakholder
2	Sasaran Sub Kegiatan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut belum optimal	Risiko Operasional	Terbatasnya jumlah sarana untuk budidaya ikan di laut	Produksi budidaya ikan laut tidak optimal	Pemerintah dan steakholder
3	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar belum optimal	Risiko Operasional	Terbatasnya jumlah sarana untuk budidaya ikan air payau dan tawar	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar tidak optimal	Pemerintah dan Steakholder
4	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar belum optimal	Risiko Operasional	Terbatasnya jumlah prasarana untuk budidaya ikan air payau dan tawar	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar tidak optimal	Pemerintah dan Steakholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia belum memenuhi kebutuhan	Risiko Operasional	Masih ada komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang belum memenuhi standar	Aliran listrik tidak stabil dan mengalami kerusakan	Pemerintah dan Pengguna layanan
6	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan perlengkapan kantor tidak memenuhi	Risiko Operasional	Jumlah stock terbatas, pemakaian meningkat	Terhambatnya kegiatan pelaksanaan administrasi	Pemerintah
7	Sasaran Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat tidak sesuai rencana	Risiko Operasional	Adanya perubahan jadwal rapat yang tidak terduga	Pelaporan rapat tidak tersampaikan secara optimal	Pemerintah
8	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman berkas/dokumen terlambat	Risiko Operasional	Kesalahan saat proses administrasi pengiriman surat	Terhambatnya penyampaian informasi administrasi	Pemerintah
9	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tagihan yang melebihi pagu anggaran	Risiko Operasional	Pemakaian jasa meningkat dari kebutuhan sebelumnya	Anggaran kurang	Pemerintah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Adanya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang berubah dari perencanaan	Risiko Operasional	adanya kenaikan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	kekurangan anggaran	Pemerintah
11	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaran dinas oprasional banyak yang mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Kurangnya pendataan kendaraan dinas yang perlu dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan belum terlaksana secara optimal	Pemerintah
12	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Banyaknya jumlah peralatan dan mesin yang rusak	Risiko Operasional	Pendataan perencanaan pemeliharaan peralatan dan mesin kurang optimal	Masih adanya peralatan dan mesin yang belum dilakukan pemeliharaan atau terfasilitasi	Pemerintah
13	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Adanya kerusakan pada Gedung Kantor dan bangunan	Risiko Operasional	Kerusakan karena faktor alam	Gedung kantor dan bangunan tidak dapat di gunakan sebagai mana peruntukannya	Pemerintah
1	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang semakin rusak	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPP Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Penyewa lahan tidak membayar retribusi pada waktu yang sudah ditetapkan	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran dari penyewa lahan	Target retribusi dari pelayanan sewa lahan yang tidak tercapai	PPP Larangan
3	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Biaya belanja paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terlalu mahal	Risiko Operasional	Kenaikan harga barang untuk paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terhambatnya realisasi belanja paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	PPP Larangan
4	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	Risiko Operasional	Keterbatasan jenis paket peralatan dan perlengkapan kantor yang dijual oleh pelaku usaha	Terhambatnya operasional perkantoran di PPP Larangan	PPP Larangan
5	Sasaran Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya tamu undangan yang tidak hadir pada kegiatan rapat	Risiko Operasional	Tamu undangan memiliki kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan	Penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak bisa terealisasi secara maksimal	PPP Larangan
6	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rendahnya tingkat pengiriman jasa surat menyurat melalui kantor pos	Risiko Operasional	Pengiriman surat sudah bisa dilaksanakan secara online melalui aplikasi Srikandi	Realisasi anggaran untuk pengiriman surat dinas yang tidak tercapai	PPP Larangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Biaya belanja jasa langganan air yang tinggi	Risiko Operasional	Pemakaian sumber daya air yang terlalu berlebihan	Realisasi anggaran untuk belanja langganan air yang tidak sesuai target	PPP Larangan
8	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlambatnya penerimaan gaji bagi P3K Paruh Waktu dan Tenaga Outsourcing	Risiko Operasional	Terlambatnya administrasi pemindahbukuan gaji oleh operator dan Kuasa Pengguna Anggaran	Realisasi anggaran jasa pelayanan umum kantor yang tidak tepat waktu	PPP Larangan
9	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan dinas sering mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Kondisi kendaraan dinas sudah terlalu tua dan mudah mengalami kerusakan	Terhambatnya perjalanan kedinasan bagi pegawai di PPP Larangan	PPP Larangan
10	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya melebihi anggaran yang disediakan	Risiko Operasional	Kerusakan peralatan dan mesin lainnya yang melebihi anggaran perbaikan yang direncanakan	Terhambatnya operasional perkantoran di PPP Larangan	PPP Larangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hasil pekerjaan rehabilitasi yang tidak sesuai dengan perencanaan	Risiko Operasional	Penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik	Gedung kantor dan bangunan lainnya akan mudah mengalami kerusakan kembali	PPP Larangan
1	Sasaran Sub Kegiatan	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Tidak terselesaikannya penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan secara tepat waktu	Risiko Operasional	kompleksitas modus pelanggaran, keterbatasan kompetensi SDM pengawasan dan keterbatasan kewenangan	masih terjadinya pelanggaran, kerusakan ekosistem sumberdaya ikan, konflik sosial, kerugian ekonomi	Nelayan, Masyarakat dan Pemerintah
2	Sasaran Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/masyarakat di perairan umum daratan terhadap regulasi perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan sektor perikanan	Risiko Operasional	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masyarakat	Pelaku usaha/masyarakat rentan terkena sanksi, terjadi kerusakan ekosistem sumber daya ikan	Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Sub Kegiatan	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Penurunan kualitas dan habitat ekosistem pesisir	Risiko Operasional	Nilai Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) rendah	Pengelolaan Kawasan Konservasi kurang optimal	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha
2	Sasaran Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak mematuhi peraturan pemanfaatan ruang laut yang berlaku	Terjadi kerusakan/degradasi lingkungan laut dan pesisir	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha
3	Sasaran Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peserta tidak memahami esensi kegiatan secara komprehensif	Risiko Operasional	Stabilitas jaringan rendah	Tujuan kegiatan tidak tercapai dan kurangnya motivasi produksi garam berkualitas tinggi	Petambak garam
4	Sasaran Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Ketidakselarasan kebutuhan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tema kegiatan	Risiko Operasional	Lemahnya koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota	Tidak ada keberlanjutan program karena dirasa tidak ada manfaatnya	Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Kelompok tidak tepat sasaran	Risiko Operasional	Kurangnya pengawasan terhadap syarat kelompok calon penerima hibah	Ketidakadilan sosial	Petambak garam
1	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan data dan informasi usaha subsektor perikanan budidaya tidak optimal	Risiko Operasional	Perubahan aplikasi pelaporan data dari Valnas Desktop menjadi Website Portal Data	Data produksi perikanan budidaya tidak tersedia dan tidak valid	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
2	Sasaran Sub Kegiatan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Bantuan yang diberikan dipindahtangkannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Dinas Kab/Kota maupun Provinsi	Risiko Fraud	Pembudidayaan ikan sudah tidak mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara optimal	Bantuan sarana prasarana menjadi tidak tepat sasaran	Kelompok pembudidayaan ikan dan kelompok masyarakat
3	Sasaran Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Pelaku usaha perikanan budidaya yang telah dibina tidak melanjutkan ke tahap permohonan Sertifikasi CBIB, CPIB dan CPPIB	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen pelaku usaha budidaya untuk sertifikasi CBIB, CPIB dan CPPIB	Pelaku usaha perikanan budidaya tidak tersertifikasi	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembudidaya ikan tidak menerapkan teknologi budidaya yang telah diberikan	Risiko Operasional	Keterbatasan akses informasi karena pembudidaya ikan belum memahami cara penggunaan teknologi yang telah diberikan	Bantuan yang diberikan tidak termanfaatkan (mangkrak)	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
5	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Pelaporan data dan informasi usaha subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tidak optimal	Risiko Operasional	Perubahan aplikasi pelaporan data dari Valnas Desktop menjadi Website Portal Data	Data dan informasi usaha subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tidak valid	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Sub Kegiatan	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kompetensi SDM dan pelaku usaha perikanan menurun	Risiko Operasional	Keterbatasan akses informasi, teknologi, dan jejaring usaha	Produk perikanan tidak mampu berdaya saing	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
7	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	Tidak tersedia ikan untuk konsumsi dan bahan baku industri	Risiko Operasional	Penurunan produksi dan pasokan ikan akibat faktor cuaca, penyakit ikan, serta gangguan distribusi	Harga ikan dipasar tidak stabil	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Sub Kegiatan	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Pengelolaan kawasan konservasi kurang efektif sehingga terjadi degradasi ekosistem di dalam kawasan	Risiko Kebijakan	1. Alokasi anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi yang tidak memadai. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, 3. Tingginya aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	Meningkatnya luas kawasan konservasi yang mengalami kerusakan dan terancamnya target biota dan keanekaragaman hayati laut	Masyarakat Pesisir, Nelayan, Instansi Pemerintah
2	Sasaran Sub Kegiatan	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Tingkat keberhasilan tumbuh (survival rate) dari kegiatan rehabilitasi rendah	Risiko Operasional	1. Pemilihan metode yang kurang sesuai dengan karakteristik lokasi rehabilitasi. 2. Kerusakan bibit karang akibat pencemaran/sampah	Kegiatan rehabilitasi tidak memberikan hasil yang optimal, dan target luasan rehabilitasi tidak tercapai	Masyarakat pesisir, Instansi Pemerintah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Sub Kegiatan	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Risiko Kepatuhan	Masih rendahnya kepatuhan terkait kepemilikan, kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan	OPD dan Masyarakat
4	Sasaran Sub Kegiatan	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya Frekuensi Operasi Pengawasan yang sesuai Target Cakupan WPPNRI yang Diawasi	Risiko Operasional	Biaya operasional operasi yang cenderung tinggi dan Kesiapan sarana prasarana operasi yang belum maksimal	Peningkatan potensi pelanggaran dan kerusakan SDKP di Wilayah Cakupan WPPNRI yang Diawasi	OPD dan Masyarakat
5	Sasaran Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Risiko Kepatuhan	Masih rendahnya kepatuhan terkait dokumen perizinan usaha pembudidaya ikan dilaut	Banyak ditemukan usaha pembudidaya ikan yang belum berizin	OPD dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Risiko Operasional	Masih rendahnya kepatuhan terkait kepemilikan, kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi	Peningkatan potensi pelanggaran dan kerusakan SDKP di Wilayah Cakupan WPPNRI yang Diawasi	OPD dan Masyarakat
7	Sasaran Sub Kegiatan	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Risiko Kepatuhan	Masih rendahnya kepatuhan terkait dokumen perizinan usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan	Banyak ditemukan usaha pemanfaatan yang belum berizin	OPD dan Masyarakat
8	Sasaran Sub Kegiatan	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Belum optimalnya pengembangan kapasitas dan keterampilan teknis bagi POKMASWAS	Risiko Operasional	Belum optimalnya intensitas pembinaan, sosialisasi dan pelatihan teknis bagi POKMASWAS	Kurangnya pemahaman Pokmaswas terkait Regulasi serta keterampilan teknis	OPD dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Keterbatasan mendapatkan Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang sesuai dengan harga pagu	Risiko Operasional	Terbatasnya penyedia layanan Gratis Ongkir yang menyediakan Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan harga sesuai anggaran (Pagu)	Keterlambatan pengadaan Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dipesan sesuai waktu yang telah ditentukan	Pimpinan dan Seluruh pegawai CDK Barat
10	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kurangnya terpenuhinya jumlah anggaran untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Risiko Operasional	Terbatasnya anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan kantor menjadi terhambat	Pimpinan dan seluruh pegawai Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
11	Sasaran Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kurangnya terpenuhinya jumlah anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Risiko Operasional	Terbatasnya anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara rutin	Pimpinan dan Pegawai Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
12	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terjadinya keterlambatan pengiriman surat dinas ke tujuan	Risiko Operasional	Keterlambatan penerbitan laporan	Terganggunanya pelayanan administrasi	Pimpinan dan Pegawai Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Perlunya penambahan daya listrik dan penambahan kecepatan internet	Risiko Operasional	Beban pemakaian listrik yang besar dan jumlah pengguna internet yang banyak	Akibat dari beban pemakaian listrik yang besar sehingga menimbulkan listrik turun (padam)dan jumlah pengguna internet yang banyak sehingga menimbulkan penurunan kecepatan.	Pimpinan dan Pegawai Cabang Dinas kelautan Wilayah Barat
14	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Keterlambatan dalam pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu	Risiko Operasional	Keterlambatan pengajuan anggaran	Keterlambatan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu	PPPK Paruh Waktu
15	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kurangnya anggaran pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Risiko Operasional	Terbatasnya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas terdiri dari 1 mobil dinas dan 3 motor dinas dalam kondisi yang tidak baik.	Penyusutan nilai aset yang berakibat kerusakan kendaraan dinas sehingga meningkatkan biaya perbaikan di masa mendatang	Pimpinan dan Seluruh pegawai CDK Barat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kurangnya anggaran pemeliharaan rutin Peralatan dan Mesin Lainnya	Risiko Operasional	Terbatasnya anggaran pemeliharaan rutin Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusutan nilai aset yang berakibat kerusakan peralatan dan mesin lainnya sehingga meningkatkan biaya perbaikan di masa mendatang	Pimpinan dan Seluruh pegawai CDK Barat
17	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Rusak akibat usia dan Cuaca ekstrim	Risiko Operasional	Usia gedung dan kualitas bangunan yang dimakan usia serta pengaruh cuaca ekstrim	Kondisi Ruang kerja menjadi rawan sehingga kurang nyaman bagi Pegawai CDKWB dan terjadi peningkatan biaya perbaikan dimasa mendatang	Pimpinan dan Seluruh pegawai CDK Barat
1	Sasaran Sub Kegiatan	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	Risiko Operasional	Anggaran dan SDM pengelola tidak memadai	Nilai EVIKA masih rendah	SUOP

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Sub Kegiatan	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Bibit mangrove dan cemara laut yang mengalami kekeringan atau mati pada saat masa pemeliharaan	Risiko Operasional	Cuaca di pesisir yang tidak menentu seperti gelombang tinggi dan curah hujan yang menurun saat musim kemarau	Luas lahan yang direhabilitasi tidak memenuhi target	Masyarakat Pesisir
3	Sasaran Sub Kegiatan	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Rendahnya tingkat penanganan perkara sanksi administratif	Risiko Operasional	Kurangnya jumlah petugas penanganan perkara sanksi administratif	Terjadinya peningkatan perkara pelanggaran pelaku usaha	Masyarakat dan Lingkungan
4	Sasaran Sub Kegiatan	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Rendahnya jumlah hari operasi pengawasan SDKP dengan Kapal Pengawas	Risiko Operasional	Biaya operasional kapal pengawas yang tinggi	Jangkauan wilayah dan kapal perikanan yang beroperasi di laut kurang terawasi	Masyarakat dan Lingkungan
5	Sasaran Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Target pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha tidak tercapai	Risiko Operasional	keterbatasan jumlah personil pengawas	Pengawasan usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 Mil kurang optimal	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Sub Kegiatan	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Target pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha tidak tercapai	Risiko Operasional	keterbatasan jumlah personil pengawas	Pengawasan usaha pemanfaatan SDK kurang optimal	Masyarakat pesisir dan Pemerintah Daerah
7	Sasaran Sub Kegiatan	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pengembangan POKMASWAS tidak berjalan optimal	Risiko Operasional	Kurangnya pembinaan dan motivasi masyarakat	Partisipasi pengawasan oleh masyarakat menurun	Masyarakat pesisir
8	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Keterbatasan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Risiko Operasional	Perencanaan kebutuhan komponen instalasi listrik yang kurang akurat, sehingga jumlah atau jenis komponen yang dibutuhkan tidak teridentifikasi dengan baik	Potensi terganggunya operasional perkantoran karena sistem listrik atau penerangan tidak berfungsi dengan baik	Pegawai CDK Wilayah Selatan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan perlengkapan kantor tidak memadai	Risiko Operasional	Perubahan kebutuhan organisasi yang tidak segera diakomodasi dalam perencanaan	Kegiatan administrasi dan pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal karena pegawai tidak memiliki peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas	Pegawai CDK Wilayah Selatan
10	Sasaran Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak optimalnya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran atau sarana prasarana rapat	Koordinasi antar SKPD tidak berjalan efektif	Pegawai CDK Wilayah Selatan
11	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesalahan pencatatan atau pengarsipan surat masuk dan keluar	Risiko Operasional	Sistem pengarsipan manual yang rentan human error	Sulitnya penelusuran surat masuk/keluar ketika dibutuhkan dan potensi dokumen penting tidak tersedia saat dibutuhkan	Pegawai CDK Wilayah Selatan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	Risiko Operasional	Penggunaan listrik yang tidak bisa diprediksi karena menggunakan gedung kantor bersama	Tidak dapat dilakukan pembayaran listrik	Pegawai CDK Wilayah Selatan
13	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terjadinya gangguan atau keterlambatan dalam penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM	Produktivitas kerja menurun	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
14	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Biaya pemeliharaan yang melebihi anggaran dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan berdampak pada kegiatan operasional lain	Risiko Operasional	Estimasi biaya pemeliharaan yang tidak realistis atau tidak diperbarui sesuai kondisi kendaraan	Tekanan pada anggaran operasional dan pembatasan kegiatan lain	Pegawai CDK Wilayah Selatan
15	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tidak terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan kantor	Risiko Operasional	Alokasi anggaran pemeliharaan untuk tidak mengcover semua peralatan yang dipelihara	Pekerjaan tidak dapat dilakukan secara optimal karena peraltan tidak berfungsi dengan baik	Pegawai CDK Wilayah Selatan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Keterlambatan penyelesaian pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	Risiko Operasional	Ketidakcukupan anggaran pemeliharaan gedung kantor	Terganggunya kegiatan kantor dan pelayanan	Pegawai CDK Wilayah Selatan
1	Sasaran Sub Kegiatan	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Pemanfaatan kawasan konservasi yang bersifat destruktif	Risiko Operasional	1. Pelanggaran pemanfaatan oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman mengenai zonasi kawasan konservasi 2. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan	1. Rusaknya ekosistem di dalam kawasan konservasi 2. menurunnya hasil tangkapan dan semakin jauhnya area tangkapan nelayan	CDK Timur dan Masyarakat di sekitar kawasan konservasi
2	Sasaran Sub Kegiatan	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Mangrove yang di tanam mati/hilang	Risiko Operasional	1. Bibit yang ditanam tidak sesuai standar 2. Faktor alam seperti cuaca, gelombang, arus dan abrasi 3. Hama (3W) 4. Pemantauan dan Pemeliharaan pasca penanaman yang kurang optimal	mangrove yang telah ditanam mengalami kematian atau terbawa gelombang, arus dan abrasi	CDK Timur dan Masyarakat Pesisir

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Sub Kegiatan	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Belum adanya Peraturan perundang-undangan di tingkat Provinsi yang mengatur sanksi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	Risiko Operasional	1. Peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang selalu diperbaharui 2. Belum adanya Peraturan Gubernur yang mengatur sanksi sektor kelautan dan perikanan	1. Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan tidak tertangani sesuai ketentuan yang berlaku 2. Pelaku Usaha (kewenangan provinsi) yang melanggar tidak memiliki efek jera	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan
4	Sasaran Sub Kegiatan	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Tidak terawasinya WPPNRI 712 dari kegiatan IUU Fishing	Risiko Operasional	Periode patroli pengawasan yang terbatas	Kasus IUU Fishing meningkat	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Stakeholder dan Lingkungan
5	Sasaran Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha bidang Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan yang berlaku	Pelaku usaha tidak tertib aturan	Pemerintah Daerah, Masyarakat, pemangku kepentingan/stakeholder dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha bidang Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan yang berlaku	Pelaku usaha tidak tertib aturan	Pemerintah Daerah, Masyarakat, pemangku kepentingan/stakeholder dan Lingkungan
7	Sasaran Sub Kegiatan	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha bidang Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan yang berlaku	Pelaku usaha tidak tertib aturan	Pemerintah Daerah, Masyarakat, pemangku kepentingan/stakeholder dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Sasaran Sub Kegiatan	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Belum optimalnya pengembangan kapasitas dan keterampilan bagi POKMASWAS	Risiko Operasional	Kurangnya intensitas pembinaan, sosialisasi dan pelatihan teknis pengawasan di laut bagi POKMASWAS	Kurangnya pemahaman POKMASWAS terkait regulasi dan keterampilan teknis pengawasan di laut	Pemerintah Daerah, Masyarakat, pemangku kepentingan/stakeholder dan Lingkungan

b. Analisis Risiko

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indikator Sasaran									
Terjadinya kematian ikan	2	2	5	Ada	Menggunakan bibit ikan yang bersertifikasi CPIB	Memadai	1	1	1
Terjadinya kematian ikan	3	2	9	Ada	Monitoring hama penyakit ikan secara berkala	Memadai	2	1	2
Nelayan tidak dapat melaut	4	3	16	Ada	Pembaruan informasi cuaca secara berkala	Belum Memadai	4	2	12
Nelayan tidak dapat melaut	4	4	19	Ada	Bekerjasama dengan pihak swasta dalam distribusi BBM	Memadai	2	2	5
Rendahnya kadar NaCl pada garam	4	4	19	Ada	Pengenalan teknologi dalam produksi garam	Memadai	3	3	13
Kristal garam tidak terbentuk	2	3	10	Ada	Pengenalan teknologi dalam produksi garam	Memadai	2	2	5
Pelayanan tidak sesuai standar	2	4	14	Ada	Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Memadai	2	2	5
Terjadinya risiko yang tidak teridentifikasi	2	3	10	Ada	Pelatihan kesiapsiagaan bencana	Memadai	2	2	5
Matinya bibit mangrove	2	2	5	Ada	Melakukan survei penentuan lokasi penanaman mangrove	Memadai	1	1	1
Matinya bibit mangrove	2	2	5	Ada	Melakukan penyeleksian bibit sebelum dilakukan penanaman	Memadai	1	1	1
Indikator Program									
Capaian Kinerja Rendah	3	3	13	Ada	Peningkatan Kapasitas SDM Yang Memadai	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tahapan penyusunan program dan kegiatan yang tidak sesuai jadwal	3	2	9	Ada	Meningkatkan koordinasi antar unit kerja	Memadai	2	2	5
Ketidakakuratan pelaporan data produksi perikanan tangkap	3	3	13	Ada	Setiap awal bulan dilakukan monitoring evaluasi data produksi perikanan tangkap bulan sebelumnya.	Memadai	3	2	9
Sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan yang semakin rusak	3	4	17	Ada	Melakukan usulan pengajuan penambahan anggaran untuk perbaikan /pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	2	3	10
Tidak optimalnya peningkatan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	3	3	13	Ada	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pembinaan dan bimbingan teknis; Memperbaiki tata kelola administrasi pelayanan, kepegawaian, dan keuangan	Memadai	2	3	10
Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong belum dapat menyediakan fasilitas pendukung utama pelayanan kepelabuhanan	4	4	19	Ada	Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pemeliharaan ringan	Belum Memadai	3	2	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelaku usaha penangkapan sebagian besar tidak memiliki dokumen perizinan penangkapan secara lengkap	4	3	16	Ada	Pembukaan gerai perizinan terpadu di Kantor PPP Asemdayong	Belum Memadai	4	3	16
Kurangnya sumber daya (manusia, keuangan, teknologi) untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan.	2	3	10	Ada	Peningkatan kemampuan & komitmen staf serta dukungan dari pimpinan, dan Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dengan memaksimalkan anggaran yang ada	Memadai	3	3	13
Tidak tercapainya pelayanan kepelabuhanan di PPP Wonokerto secara optimal	3	4	17	Ada	Melaksanakan pemeliharaan rutin fasilitas pelabuhan; Meningkatkan penataan dan kebersihan kawasan pelabuhan; Melakukan sosialisasi keselamatan dan ketertiban kepada nelayan; Menyusun SOP keselamatan serta menyediakan APAR di kawasan pelabuhan; Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan	Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak optimalnya peningkatan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	3	3	13	Ada	- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pembinaan dan bimbingan teknis; Memperbaiki tata kelola administrasi pelayanan, kepegawaian, dan keuangan; - Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi serta pelaporan secara berkala; Meningkatkan koordinasi internal dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah	Memadai	2	2	5
Manajemen pengelolaan kepelabuhan perikanan	1	3	7	Ada	Manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan melalui perencanaan, pengendalaian, koordinasi dan evaluasi	Memadai	1	4	11
Profesionalitas pegawai di pelabuhan perikanan	2	2	5	Ada	Peningkatan kapasitas kompetensi pegawai melalui pendidikan, pelatihan dan seminar	Memadai	1	2	3
Nilai IKM rendah	3	3	13	Ada	standarisasi layanan	Memadai	2	2	5
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rendah	3	3	13	Ada	standarisasi SOP	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelayanan kepelabuhanan tidak tercapai,Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelabuhan yang semakin rusak akibat terendam banjir ROB	4	3	16	Ada	Melakukan usulan pengajuan penambahan anggaran untuk perbaikan /pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Memadai	3	2	9
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah tidak tercapai,Adanya keterlambatan pelayanan atau pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu	2	2	5	Ada	Mengajukan usulan Analisis Beban Kerja untuk penambahan pegawai	Memadai	2	2	5
Aktivitas penangkapan ikan terhambat	4	3	16	Ada	Pembangunan/pe rbaikan sarana prasarana	Belum Memadai	4	3	16
Munculnya pungutan liar dalam pelayanan kepelabuhanan	2	2	5	Ada	Pembayaran retribusi secara non tunai	Memadai	1	1	1
Pelayanan Kepelabuhanan Lambat	4	4	19	Ada	Penempatan SDM dengan mempertimbangk an kompetensi dan integritas	Memadai	2	2	5
Pelayanan Kepelabuhanan buruk	4	4	19	Ada	Pembinaan dan pelatihan SDM	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan (pogram)	3	3	13	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	2	3	10
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	5	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik, Penunjukan rekanan yang profesional dan kompeten	Memadai	1	2	3
Adanya kerusakan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan konsumsi air laut	3	4	17	Ada	Perbaikan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan konsumsi air laut	Memadai	2	4	14
Kurangnya sumber daya manusia dalam memenuhi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	3	2	9	Ada	Penambahan Jumlah SDM pada sektor pelayanan dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan yang memadai	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Adanya pelayanan atau pekerjaan yang terlambat untuk diselesaikan	4	4	19	Ada	Melakukan pengajuan kebutuhan SDM yang kompeten kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	17
Terlambatnya penyelesaian urusan tata usaha yang ada di PPP Larangan	3	3	13	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran urusan tata usaha di PPP Larangan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	2	3	10
Terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	4	3	16	Ada	melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Memadai	4	2	12
Rendahnya kualitas dan kuantitas garam	3	3	13	Ada	Memberikan bantuan hibah teknologi produksi garam tepat sasaran	Memadai	1	2	3
Pelaku usaha tidak mendapatkan ijin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Menteri Kelautan dan Perikanan	4	2	12	Ada	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terjadinya serangan hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya produksi	4	3	16	Ada	Monitoring hama penyakit ikan dan pemberian bantuan kepada pembudidaya ikan	Memadai	3	2	9
Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya konsumsi ikan	4	3	16	Ada	Mengedukasi melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	Memadai	3	2	9
Lokasi kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir rawan terjadinya pelanggaran dan berpotensi terdampak akibat adanya bencana alam seperti abrasi, gelombang tinggi dan perubahan iklim	4	4	19	Ada	1. Melakukan dan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi, lembaga dan masyarakat, 2. Melakukan pemetaan potensi lahan/area yang akan direhabilitasi, 3. Melakukan kegiatan monitoring secara berkala (rutin), dan 4. Memperkuat kegiatan pengawasan	Memadai	2	3	10
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	19	Ada	Melaksanakan Ops. Laut s.d. 12 Mil, penindakan pelanggaran alat tangkap yang melanggar. Serta penindakan dokumen yang tidak lengkap	Belum Memadai	3	3	13

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat kurang maksimal karena anggaran yang tersedia berkurang karena efisiensi	4	3	16	Ada	Melakukan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja secara matang dan berkelanjutan, serta menyesuaikan kebijakan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal.	Memadai	3	2	9
Bibit mangrove dan cemara laut yang mengalami kekeringan atau mati pada saat masa pemeliharaan	4	3	16	Ada	"- Koordinasi dengan masyarakat lokal dan penyuluh kehutanan mengenai lokasi penanaman yang minim potensi terkena gelombang tinggi dan arus yang membawa sampah dari daratan - Melaksanakan penanaman cemara laut pada musim penghujan"	Memadai	2	3	10
Terjadinya peningkatan kasus pelanggaran	5	4	23	Ada	Pengawasan dan edukasi terkait peraturan yang berlaku	Belum Memadai	3	4	17
Ketergantungan Nakhoda dan ABK dari instansi lain	3	3	13	Ada	Diterbitkan SOTK baru 2026 dalam peta jabatan sudah ada nakhoda, mualim dan ABK	Memadai	3	2	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lokasi penanaman mangrove kurang ideal untuk direhabilitasi	4	3	16	Ada	1. identifikasi awal melalui data citra 2. melakukan survei pendahuluan sebelum pelaksanaan penanaman	Belum Memadai	3	2	9
Tidak terawasinya WPPNRI 712 wilayah perairan pantai utara bagian timur dari kegiatan Unreported and Unregulated (IUU) Fishing	2	4	14	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan di wilayah perairan sampai 12 mil	Memadai	2	3	10
Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	4	4	19	Ada	1. Melaksanakan penyadartahuan kepada pelaku usaha tentang peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang berlaku 2. Melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan terkait perijinan berusaha dan peraturan dan perundangan bidang kelautan dan perikanan 3. Bagi pelaku usaha yang tidak tertib diberikan sanksi	Memadai	2	3	10
Indikator Sub Kegiatan									
Perubahan peraturan perundangan	2	3	10	Ada	Koordinasi antar unit kerja	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terlambatnya penyampaian data kepegawaian	2	3	10	Ada	Pengecekan secara berkala antara data kepegawaian dan data gaji	Memadai	1	2	3
Duplikasi data nelayan calon penerima bantuan asuransi	2	4	14	Ada	Melakukan sinkronisasi dan validasi data calon penerima bantuan asuransi nelayan dengan kabupaten/kota sebelum penetapan penerima	Memadai	1	3	7
Nelayan atau awak kapal perikanan tidak dapat bekerja sesuai dengan prosedur diatas kapal	3	3	13	Ada	Sosialisasi dan Pelatihan melalui paguyuban nelayan, HNSI, KNTI dan Penyuluh Perikanan	Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pendaratan ikan hasil tangkapan diluar kawasan pelabuhan	3	3	13	Ada	1. Pengumpulan data statistik perikanan tangkap melibatkan petugas/operator di masing2 kabupaten/kota 2. Dilakukan monitoring produksi 3 komodita potensial jateng dan produksi utama 3. Validasi data tiap semester sehingga setiap data produksi dan nilai produksi telah dilakukan filter dan validasi, dimulai dari petugas	Memadai	2	3	10
Ketertiban nelayan yang rendah dalam melengkapi dokumen kapal perikanan sesuai aturan yang berlaku dan memberikan gratifikasi untuk dibantu dipercepat dokumen perizinannya.	3	4	17	Ada	Melakukan Sosialisasi dan Gerai Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan Pengawasan kelengkapan dokumen kapal perikanan serta menerapkan nilai-dasar ASN BerAKHLAK terutama pada nilai Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel.	Memadai	3	3	13

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ketidaksesuaian rencana pengembangan pelabuhan perikanan dengan peruntukan ruang laut dalam dokumen RTRW	3	3	13	Ada	Menelaah kesesuaian rencana pengembangan pelabuhan dengan dokumen RTRW dan mengusulkan perubahannya	Memadai	2	2	5
Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	4	4	19	Ada	Membantu dan mendampingi nelayan yang kesulitan dalam pengurusan perijinan kapal secara online	Belum Memadai	3	2	9
Tidak optimalnya peningkatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, atau fasilitas penunjang yang dibangun/direhabilitasi sehingga berpotensi menghambat terlaksananya fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan.	3	4	17	Ada	Meningkatkan kualitas perencanaan teknis pembangunan/rehabilitasi fasilitas pelabuhan, memperkuat pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian waktu pelaksanaan, melakukan monitoring dan evaluasi progres pembangunan secara berkala, mengoptimalkan koordinasi dengan penyedia jasa dan pihak terkait dalam pelaksanaan	Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerusakan komponen instalasi listrik/penerangan	3	2	9	Ada	Peningkatan perencanaan dan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan.	Memadai	3	2	9
Pelayanan administrasi kantor dan masyarakat kurang maksimal	2	3	10	Ada	Mengoptimalkan sumber daya yang ada secara optimal baik komponen pendukung operasional administrasi kantor dan SDM yang ada	Memadai	2	2	5
Tidak optimalnya penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sehingga berpotensi menghambat pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	3	4	17	Ada	Meningkatkan perencanaan kebutuhan pemeliharaan gedung dan bangunan secara berkala, melaksanakan pemeliharaan rutin serta rehabilitasi gedung kantor sesuai kondisi dan prioritas, meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan oleh penyedia jasa, melakukan monitoring dan evaluasi kondisi bangunan secara berkala.	Memadai	2	3	10
Beberapa bangunan kios ikan dan warung makan mengalami kerusakan dan tidak layak pakai	3	3	13	Ada	Perbaiki mandiri para pelaku usaha dalam skala kecil	Belum Memadai	3	3	13

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Minimnya kerjasama dan dukungan dari stakeholder diluar pelabuhan dalam mengembangkan kawasan	3	3	13	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan instansi baik Pemerintah maupun swasta diluar PPP Asemdayong	Memadai	3	3	13
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang ada	4	3	16	Ada	Pembinaan masyarakat nelayan serta penyediaan gerai pelayanan perijinan di PPP Asemdayong	Belum Memadai	3	2	9
Kerusakan komponen pendukung dan instalasi listrik/penerangan	3	2	9	Ada	Perawatan secara berkala dan penggunaan listrik secara efektif dan efisien	Memadai	2	3	10
Pelayanan administrasi kantor dan masyarakat kurang maksimal	2	3	10	Ada	Mengoptimalkan sumber daya yang ada secara optimal baik komponen pendukung operasional administrasi kantor dan SDM yang ada	Memadai	2	2	5
Minimnya pendukung operasional / peralatan kantor dan usia kendaraan yang sudah tua, serta gedung kantor yang sudah mulai rusak	3	3	13	Ada	Melakukan service berkala pada peralatan kantor dan kendaraan serta perbaikan gedung kantor skala kecil / parsial	Memadai	3	2	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak optimalnya peningkatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, atau fasilitas penunjang yang dibangun/direhabilitasi sehingga berpotensi menghambat terlaksananya fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan.	3	4	17	Ada	Meningkatkan kualitas perencanaan teknis pembangunan/rehabilitasi fasilitas pelabuhan; Memperkuat pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian waktu pelaksanaan; Melakukan monitoring dan evaluasi progres pembangunan secara berkala; Mengoptimalkan koordinasi dengan penyedia jasa dan pihak terkait dalam pelaksanaan	Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak optimalnya peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah akibat potensi penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan administrasi perkantoran.	3	4	17	Ada	Memperkuat pengawasan dan pengendalian administrasi perkantoran; Meningkatkan pemahaman pegawai terkait tata kelola administrasi dan integritas; Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi secara berkala; Mengoptimalkan penerapan sistem administrasi dan pencatatan yang tertib dan transparan.	Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak optimalnya penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sehingga berpotensi menghambat pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	3	4	17	Ada	Meningkatkan perencanaan kebutuhan pemeliharaan gedung dan bangunan secara berkala; Melaksanakan pemeliharaan rutin serta rehabilitasi gedung kantor sesuai kondisi dan prioritas; Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan oleh penyedia jasa; Melakukan monitoring dan evaluasi kondisi bangunan secara berkala.	Memadai	2	3	10
Anggaran pembangunan/rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	3	4	17	Ada	Menyusun rencana anggaran untuk pembangunan/rehabilitasi berbasis skala prioritas	Memadai	2	4	14
Jumlah dokumen kesyahbandaran yang diterbitkan tidak mencapai target	3	3	13	Ada	Sosialisasi kepada nelayan kecil yang belum memiliki izin	Memadai	1	3	7
Tingkat kepercayaan pengguna jasa terhadap penyelenggaraan pelayanan kepelabuhan	1	3	7	Ada	Internalisasi standar pelayanan publik	Memadai	1	1	1
Ketepatan laporan adminitrasi	3	2	9	Ada	Penetapan jadwal pelaporan dan pelapran admintrasi secara berkala	Memadai	1	2	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah anggaran pemeliharaan aset	2	3	10	Ada	Prioritas pemeliharaan aset yang sudah rusak disesuaikan dengan jumlah anggaran	Memadai	1	3	7
Nelayan dan Bakul tidak aman dalam melakukan aktivitas di Pelabuhan	3	5	22	Ada	pengurangan perbaikan kios penataan kawasan	Belum Memadai	3	4	17
Penerbitan dokumen kesyahbandaran ilegal	3	3	13	Ada	sosialisasi dan gerai perijinan	Memadai	2	3	10
belum ada standarisasi layanan	2	2	5	Ada	pendidikan dan pelatihan	Memadai	2	1	2
masih ada jasa penunjang urusan pemda yang belum teridentifikasi	1	2	3	Ada	identifikasi jasa pendukung urusan pemda	Memadai	1	1	1
tidak ada identifikasi BMD	2	2	5	Ada	rakor bulanan bmd	Memadai	2	1	2
Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak berfungsi optimal	3	3	13	Ada	Mencari alternatif sumber pembiayaan dari APBN dan / CSR Melaksanakan perbaikan dengan menggunakan anggaran yang sudah di berikan terutama pada tempat pelayanan	Memadai	3	2	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar Layanan tidak tercapai,Peralatan pendukung administrasi perkantoran yang belum tersedia	3	2	9	Ada	Membuat SOP dan Melakukan Pelayanan kepada Pengguna Jasa berdasarkan SOP yang telah ditetapkan; Pengawasan Berjenjang,Melakukan pengajuan anggaran penyediaan peralatan pendukung administrasi perkantoran kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Memadai	2	1	2
Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun tidak tersusun,Terhambat dalam penyelesaian urusan tata usaha yang ada di PPP Moorodemak	2	1	2	Ada	Melaksanakan Pengawasan Internal terhadap kegiatan Rutin	Memadai	1	1	1
Aset barang milik daerah yang semakin rusak,Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak berfungsi baik	2	2	5	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk pemeliharaan aset barang milik daerah di PPP Moorodemak	Memadai	1	1	1
Dokumen kepelabuhanan perikanan tidak lengkap	4	4	19	Ada	Penyediaan anggaran dan kegiatan penyusunan dokumen kepelabuhanan perikanan	Memadai	2	1	2
Terjadi IUU fishing	4	4	19	Ada	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jaringan listrik dan internet kantor padam	2	4	14	Ada	Memperhitungkan dengan cermat kebutuhan langganan dan pemeliharaan listrik dan internet kantor selama satu tahun	Memadai	1	1	1
Relutasi pelabuhan buruk	2	4	14	Ada	Merencanakan kebutuhan pendukung administrasi	Memadai	1	1	1
Muncul komplain dari masyarakat karena pelayanan terhambat	1	3	7	Ada	Melakukan pemeliharaan rutin terhadap seluruh barang milik negara	Memadai	1	1	1
Dokumen kepelabuhan dan kapal nelayan tidak lengkap	4	3	16	Ada	Pembinaan dan pendampingan nelayan	Memadai	3	2	9
Kurangnya dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	4	3	16	Ada	Perbaikan sistem administrasi, pengajuan dokumen pendukung, pengajuan anggaran	Memadai	3	3	13
Nelayan enggan membayar retribusi tambat labuh dan pas masuk	3	4	17	Ada	Pembinaan dan pengarahan kepada nelayan	Memadai	2	3	10
Layanan administrasi umum perangkat daerah kurang sesuai dengan standart layanan	3	3	13	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	3	2	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Laporan Penyediaan Jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	2	2	5	Ada	Pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, penataan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	2	3
Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	3	2	9	Ada	Pelatihan kompetensi petugas aset barang, menyusun jadwal pemeliharaan berkala, percepatan penghapusan barang milik daerah yang rusak, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	1	2
Adanya kerusakan sarana dan prasarana produksi budidaya di loka air laut	3	4	17	Ada	Perbaikan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan di loka air laut	Memadai	2	4	14
Turunnya produksi benih ikan endemik yang dikembangkan	3	4	17	Ada	Melakukan peremajaan calon induk ikan endemik lokal	Memadai	2	4	14
Adanya kerusakan sarana dan prasaranan budidaya ikan di loka air tawar dan payau	3	4	17	Ada	Perbaikan sarana dan prasarana budidaya ikan di loka air tawar dan payau	Memadai	2	4	14

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Potensi penurunan kualitas pelayanan adminstrasi umum daerah	3	2	9	Ada	Penambahan Jumlah SDM, pelatihan pegawai dan evaluasi internal secara periodik	Belum Memadai	2	2	5
Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	3	2	9	Ada	Penambahan Jumlah SDM, Pelatihan pegawai sesuai tupoksinya, monitoring dan evaluasi internal secara periodik	Belum Memadai	2	2	5
Pemanfaatan BMD kurang optimal	3	2	9	Ada	Mengajukan jumlah anggaran yang optimal agar perawatan kendaraan dinas dan BMD lainnya bisa secara rutin	Belum Memadai	2	2	5
Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	4	4	19	Ada	Membantu dan mendampingi nelayan yang kesulitan dalam pengurusan perijinan kapal secara online	Belum Memadai	3	4	17
Akses jalan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak	4	4	19	Ada	Melakukan pengajuan anggaran perbaikan akses jalan masuk ke kawasan pelabuhan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	17

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kolam pelabuhan yang semakin dangkal	4	4	19	Ada	Melakukan pengajuan anggaran pengerukan dan perubahan pintu masuk kolam pelabuhan untuk mengurangi sedimentasi kepada kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	17
Dokumen pengembangan pelabuhan perikanan yang dimiliki masih belum lengkap	4	4	19	Ada	Melakukan pengajuan anggaran penyusunan dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	17
Peralatan pendukung administrasi perkantoran yang tidak tersedia	3	3	13	Ada	Melakukan pengajuan anggaran penyediaan peralatan pendukung administrasi perkantoran kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Biaya pengeluaran yang tidak terduga dari belanja langganan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	3	13	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk jasa penunjang urusan pemerintah daerah di PPP Larangan	Belum Memadai	2	3	10
Aset barang milik daerah yang semakin rusak	3	3	13	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk pemeliharaan aset barang milik daerah di PPP Larangan	Belum Memadai	2	3	10
Tidak terselesaikannya penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan secara tepat waktu	4	3	16	Ada	melakukan penyelesaian penanganan pelanggaran dengan pengenaan sanksi administratif sesuai regulasi dan mengedepankan azas ultimum remidium serta koordinasi/kolaborasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan	Memadai	4	2	12
Kurangnya pemahaman pelaku usaha/masyarakat pembudidaya air payau dan pergaraman terhadap regulasi perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan	4	3	16	Ada	melakukan pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh pelaku usaha/masyarakat pembudidaya ikan air payau dan pergaraman	Memadai	4	2	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menyetujui usulan kawasan konservasi	4	2	12	Ada	Melakukan pendampingan secara intensif pada saat penyusunan dokumen kajian kawasan konservasi, kosultasi publik, dan pembahasan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Memadai	2	1	2
Kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diusulkan tidak sesuai dengan Informasi Kesesuaian Ruang Laut yang diterbitkan	4	2	12	Ada	'Melakukan sosialisasi RTRWP dan aturan terkait perizinan kegiatan berusaha dan nonberusaha di sektor kelautan dan perikanan	Memadai	2	1	2
Petambak garam menghasilkan garam tidak sesuai standar	3	3	13	Ada	Melakukan Pembinaan terhadap perwakilan petambak garam	Memadai	2	2	5
Masyarakat pesisir tidak terampil dalam pengelolaan keuangan baik kelompok maupun perorangan	3	3	13	Ada	Memberikan pembinaan dan pelatihan finansial	Memadai	2	2	5
Adanya praktek suap dan pengaturan penyedia	3	2	9	Ada	Proses penentuan vendor dilakukan secara profesional, terbuka dan segala proses pengadaan melalui aplikasi	Memadai	1	2	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Adanya gratifikasi dari penerima bantuan	3	2	9	Ada	Melakukan verifikasi kellompok calon penerima bantuan bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/kota terkait	Memadai	1	2	3
Pembudidaya ikan belum melaksanakan kegiatan pembudidayaan sesuai dengan standar	3	2	9	Ada	Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan sertifikasi CBIB, CPIB dan CPPIB kepada pembudidaya ikan	Memadai	2	1	2
Rendahnya tingkat pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima	2	2	5	Ada	Pelaksanaan verifikasi penerima bantuan secara berjenjang dan penelaahan proposal bantuan dengan lebih mendalam	Memadai	2	1	2
Pembudidaya ikan belum menerapkan teknologi pada kegiatan budidayanya	4	2	12	Ada	Pemberian bantuan berupa sarana atau prasarana penunjang teknologi bagi pembudidaya ikan	Memadai	3	2	9
Akses pasar pelaku usaha terbatas	3	2	9	Ada	- Sosialisasi perizinan berusaha - Fasilitasi perizinan berusaha melalui gerai SKP	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kompetensi SDM dan pelaku usaha perikanan menurun	3	2	9	Ada	Memfasilitasi kegiatan bagi pelaku usaha berupa pelatihan diversifikasi produk, jejaring pemasaran, dsb	Memadai	2	2	5
Penyediaan dan penyaluran bahan baku bagi industri pengolahan ikan tidak optimal	3	2	9	Ada	Fasilitasi pertemuan antara pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah)	Memadai	2	2	5
Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	4	4	19	Ada	1. Sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkaitan, 2. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan, 3. Penguatan kegiatan pengawasan di kawasan konservasi	Memadai	3	3	13

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Keselamatan petugas pada saat survei/monitoring di lapangan	4	4	19	Ada	1. Pemantauan/pen- carian informasi kondisi cuaca sebelum kegiatan, 2. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan kerja, 3. Peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan	Memadai	3	4	17
Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman yang cukup tinggi	4	4	19	Ada	1. Pemilihan bibit mangrove yang baik dan sesuai standar, 2. Pemilihan lokasi tanam yang tepat sesuai habitatnya, 3. Mencari waktu tanam yang tepat untuk menghindari gelombang dan cuaca ekstrim, 4. Adanya masa pemeliharaan 90 hari setelah penanaman	Memadai	4	3	16
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	4	4	19	Ada	Melaksanakan penanganan tindak lanjut pelanggaran secara cermat dan tepat serta memberikan sanksi sesuai aturan	Belum Memadai	3	3	13

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Rendahnya tingkat penerbitan HPK dan SLO Kapal perikanan Kewenangan Provinsi	4	4	19	Ada	Peningkatan pemantauan dan penyadartahuan di Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan terkait kewajiban untuk melakukan pengajuan HPK dan SLO bagi kapal ukuran 6-30 GT kapal perikanan kewenangan provinsi	Memadai	3	3	13
Kurang terpenuhinya sarana Peralatan dan perlengkapan kantor	3	3	13	Ada	1. Melakukan perencanaan yang matang dan detail untuk seluruh kebutuhan penunjang, termasuk alokasi anggaran yang memadai. 2.Melaksanakan koordinasi komperhensif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Induk Instansi terkait perlunya penambahan anggaran pengadaan peralatan dan perlengkapan	Belum Memadai	3	2	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kurang terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun	3	3	13	Ada	Melakukan perencanaan yang matang dan detail untuk seluruh kebutuhan jasa penunjang, termasuk alokasi anggaran yang memadai.	Memadai	3	2	9
Kurangnya terpenuhinya jumlah anggaran untuk melakukan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	3	3	13	Ada	Melakukan perencanaan yang matang dan detail untuk seluruh kebutuhan jasa penunjang, termasuk alokasi anggaran yang memadai.	Memadai	3	2	9
Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	5	4	23	Ada	"- Merencanakan anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan - Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM - Kolaborasi dengan mitra (NGO, dinas setempat, akademisi)"	Belum Memadai	4	3	16
Tindak lanjut pelanggaran kegiatan usaha tidak terselesaikan	2	4	14	Ada	Merencanakan kegiatan tindak lanjut pelanggaran pelaku usaha	Memadai	1	3	7
Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan Kapal Pengawas	4	3	16	Ada	Pemeliharaan Speedboat secara berkala (Docking 1 Tahun sekali)	Belum Memadai	4	3	16
Keterbatasan SDM Pengawas Perikanan	2	3	10	Belum Ada	-	Belum Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Harga barang di GO lebih tinggi dari RAB sehingga tidak dapat melakukan transaksi	2	3	10	Ada	Penyusunan rencana anggaran pembelian barang disesuaikan dengan harga barang pada aplikasi GO	Memadai	1	1	1
Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	3	2	9	Ada	Koordinasi dengan pengguna gedung kantor bersama lainnya dan menyesuaikan perencanaan anggaran tahun yang akan datang	Memadai	1	3	7
Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	2	3	10	Ada	Penambahan anggaran pemeliharaan	Memadai	1	3	7
Kawasan konservasi tidak terkelola secara optimal	4	3	16	Ada	1. Berkolaborasi dengan NGO,LSM, dan stakeholder terkait dalam pengelolaan kawasan konservasi 2. Mengikuti Pelatihan dan sertifikasi dalam upaya meningkatkan soft skill dan hard skill	Belum Memadai	3	2	9
Petugas pengawasan tidak kompeten	3	3	13	Ada	Mengikuti pelatihan dan bimtek pengawasan SDKP	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Belum adanya Peraturan perundang-undangan di tingkat Provinsi yang mengatur sanksi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	3	3	13	Ada	Menggunakan Peraturan perundang-undangan tingkat Pusat untuk menangani perkara sektor kelautan dan perikanan	Memadai	2	2	5
Tidak terawasinya WPPNRI 712 dari kegiatan IUU Fishing	2	4	14	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan bersama instansi terkait (PSDKP) di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil di wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Memadai	2	3	10
Pelayanan penerbitan HPK dan SLO rendah	2	3	10	Belum Ada	-	Belum Memadai	2	3	10
Indikator Sub Kegiatan									
Kegiatan prioritas tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan	2	3	10	Ada	Mengajukan usulan kegiatan sesuai jadwal tahapan penyusunan dokumen perencanaan	Memadai	2	2	5
Data yang digunakan dalam evaluasi belum lengkap atau berbeda dengan data pada sistem pelaporan lainnya.	2	3	10	Ada	Melakukan validasi data dan kroscek ulang data	Memadai	2	2	5
Kabupaten/Kota tidak mengirimkan data hingga waktu yang ditentukan	2	3	10	Ada	Validasi data tingkat provinsi pada tiap semester	Memadai	2	2	5
Tidak tersedia data yang valid	2	3	10	Ada	Validasi data pada tingkat provinsi pada tiap semester	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak terupdatenya data kepegawaian	2	3	10	Ada	Pengecekan secara berkala antara data kepegawaian dan data gaji	Memadai	1	2	3
Terjadinya kesalahan dalam penyusunan dokumen administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN.	2	3	10	Ada	MELAKUKAN DESK BULANAN DENGAN UPT/BIDANG/CD K	Memadai	1	2	3
Terjadinya kesalahan dalam penginputan data laporan keuangan.	3	3	13	Ada	Melakukan Desk data Keuangan Baik secara Internal maupun eksternal dengan BPKAD	Memadai	1	3	7
Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang semakin rusak	4	4	19	Ada	Melakukan usulan pengajuan penambahan anggaran untuk perbaikan /pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	4	4	19
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	3	4	17	Ada	Sosialisasi bersama dengan instansi terkait dan stakeholder terkait peraturan perundang-undangan, dan pendampingan kepada nelayan oleh instansi terkait.	Memadai	3	4	17

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerusakan bangunan/kios penggerehan di kawasan pelabuhan	3	3	13	Ada	Perbaikan parsial pada bangunan yang rusak	Belum Memadai	2	3	10
Kerusakan beberapa gedung kantor pelayanan	3	3	13	Ada	Melakukan perbaikan secara mandiri dan parsial sesuai kemampuan anggaran	Belum Memadai	3	2	9
Pendangkalan kembali dermaga pelabuhan dan muara Sungai Elon sebagai alur utama masuk pelabuhan	4	4	19	Ada	Pembangunan Breakwater dan pengerukan dermaga dan alur sungai Elon	Memadai	2	2	5
Kawasan PPP Wonokerto yang kotor dan kumuh dapat menurunkan kualitas lingkungan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat di sekitar pelabuhan.	2	4	14	Ada	Melaksanakan kegiatan kerja bakti rutin dan pembersihan kawasan pelabuhan; Penyediaan tempat sampah yang memadai; Melakukan sosialisasi kepada pengguna pelabuhan terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan; Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengangkutan sampah	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kapal perikanan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi tertangkap saat patroli pengawasan dan menghambat aktivitas penangkapan serta citra pelabuhan.	4	4	19	Ada	Sosialisasi kewajiban dokumen kapal dan aturan alat tangkap; Fasilitasi pengurusan dokumen kapal bagi nelayan; Pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	Memadai	3	3	13
Hasil tangkapan yang tidak berkualitas menyebabkan pendapatan nelayan stagnan atau menurun, serta berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan di kawasan PPP Wonokerto.	3	4	17	Ada	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan terkait penanganan hasil tangkapan yang baik (Good Handling Practices); Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penanganan hasil tangkapan di kawasan PPP Wonokerto	Memadai	2	2	5
Proses bongkar muat ikan di kawasan PPP Wonokerto yang tidak lancar menyebabkan mutu hasil tangkapan tidak terjaga, sehingga menurunkan nilai jual ikan dan berdampak pada pendapatan nelayan.	3	4	17	Ada	Pembinaan penanganan ikan yang baik kepada nelayan dan pelaku usaha; Penataan dan pengaturan kegiatan bongkar muat di kawasan pelabuhan; pengusulan kelanjutan pembangunan dermaga	Memadai	3	3	13

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Rendahnya kualitas dan higienitas pengolahan hasil perikanan di PPP Wonokerto menyebabkan produk tidak memenuhi standar kesehatan dan berpotensi membahayakan konsumen serta menurunkan kepercayaan pasar.	3	4	17	Ada	Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha pengolahan mengenai standar sanitasi dan higienitas pengolahan hasil perikanan; Mengarahkan pelaku usaha untuk menggunakan lokasi penjemuran yang lebih bersih dan tertata; Mendorong penyediaan atau penataan fasilitas tempat penjemuran yang lebih higienis di kawasan PPP	Memadai	2	3	10
Kondisi TPI Wonokerto yang kotor dan kumuh menyebabkan mutu hasil tangkapan ikan yang dilelang menjadi tidak higienis, sehingga menurunkan nilai jual dan kepercayaan pembeli.	3	4	17	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pengelolaan kebersihan dan penanganan lingkungan kawasan TPI; Koordinasi dengan pengelola TPI Wonokerto terkait kebersihan lingkungan TPI Wonokerto	Memadai	3	3	13

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di kawasan PPP Wonokerto, disertai kurangnya koordinasi antar pihak terkait, fasilitas pendukung, serta pemahaman nelayan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan kapal	3	4	17	Ada	'Penyusunan SOP penanganan kebakaran kapal di kawasan pelabuhan; Penyediaan sarana keselamatan seperti APAR dan perlengkapan darurat lainnya; Sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan terkait keselamatan dan keamanan kapal; Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan dan penanggulangan keadaan darurat	Memadai	3	3	13

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Persekongkolan antara pemilik pekerjaan dengan calon penyedia jasa menyebabkan proses pemilihan tidak objektif dan berpotensi menunjuk penyedia jasa yang tidak kompeten, sehingga menurunkan kualitas hasil pekerjaan serta berdampak pada memburuknya citra Dinas Kelautan dan Perikanan	4	5	24	Ada	Meningkatkan transparansi proses pengadaan melalui penerapan sistem pengadaan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku; Memperkuat pengawasan internal terhadap seluruh tahapan pemilihan penyedia jasa; Menerapkan prinsip integritas dan pakta integritas bagi pihak yang terlibat dalam proses pengadaan; Melakukan evaluasi	Memadai	1	5	20
Banyaknya fasilitas kepelabuhanan di PPP Wonokerto yang rusak menyebabkan sarana dan prasarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menghambat pelayanan dan aktivitas operasional pelabuhan.	4	4	19	Ada	Penghapusan aset mangkrak; Melakukan pendataan dan pemetaan kondisi serta potensi pemanfaatan aset dan lahan di kawasan PPP Wonokerto; Pengusulan rehab sarpras	Memadai	3	3	13
Jumlah anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan terbatas	3	4	17	Ada	Prioritas pembangunan dan pemeliharaan yang sudah rusak disesuaikan dengan jumlah anggaran	Memadai	3	3	13

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
pelayanan fungsi pemerintahan dan perusahaan belum optimal	3	4	17	Ada	Mengusulkan peningkatan anggaran dan Penambahan SDM	Memadai	3	3	13
Komponen instalasi listrik dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	3	3	13	Ada	Prioritas pemeliharaankomponen instalasi listrik yang sudah rusak disesuaikan dengan jumlah anggaran	Memadai	1	3	7
Jumlah anggaran peralatan dan perlengkapan kantor terbatas	3	3	13	Ada	Prioritas pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah rusak disesuaikan dengan jumlah anggaran	Memadai	2	3	10
Ketepatan laporan adminitrasi	3	3	13	Ada	Penetapan jadwal pelaporan dan pelaporan admintrasi secara berkala	Memadai	3	2	9
Profesionalitas pegawai di pelabuhan perikanan	3	3	13	Ada	Peningkatan kapasitas kompetensi pegawai melalui pendidikan, pelatihan dan seminar.	Memadai	3	2	9
Anggaran tidak dibayarkan tepat waktu	2	3	10	Ada	mengusulkan penambahan anggaran	Memadai	3	2	9
Jasa pelayanan terlambat terbayarkan	2	3	10	Ada	mengusulkan penambahan anggaran	Memadai	3	2	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional terbatas	2	3	10	Ada	Prioritas pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional yang sudah rusak disesuaikan dengan jumlah anggaran	Memadai	2	3	10
Jumlah anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terbatas	2	2	5	Ada	Prioritas pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang sudah rusak disesuaikan dengan jumlah anggaran	Memadai	5	1	8
Jumlah anggaran Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan Lainnya terbatas	2	4	14	Ada	Prioritas pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan yang sudah rusak disesuaikan dengan jumlah anggaran	Memadai	2	4	14
kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan	4	4	19	Ada	peningkatan anggaran	Memadai	3	3	13
ketidapatuhan pengguna pelabuhan terhadap peraturan yang berlaku.	3	3	13	Ada	sosialisasi, monev kawasan	Memadai	2	3	10
kerusakan peralatan akibat kualitas komponen yang kurang baik.	2	3	10	Ada	perencanaan kebutuhan yang tepat	Memadai	2	2	5
kehilangan atau penyalahgunaan perlengkapan kantor	2	3	10	Ada	perencanaan kebutuhan yang tepat	Memadai	2	2	5
keterbatasan waktu yang menyebabkan pembahasan tidak berjalan secara maksimal.	2	3	10	Ada	dukungan sasrpras yang memadai	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
kehilangan atau kerusakan dokumen selama proses pengiriman.	2	2	5	Ada	pengarsipan dokumen secara sistematis,	Memadai	1	2	3
penghentian sementara layanan	2	2	5	Ada	pengelolaan penggunaan layanan secara efektif dan efisien	Memadai	2	1	2
kurangnya koordinasi antar petugas	2	2	5	Ada	pengawasan dan evaluasi secara berkala agar pelayanan umum kantor dapat berjalan secara efektif, tertib, dan mendukung kelancaran kegiatan perkantoran.	Memadai	2	1	2
pencatatan dan pelaporan kondisi aset tidak tertib	2	2	5	Ada	pelaksanaan pemeliharaan sesuai standar teknis	Memadai	2	1	2
kurangnya kapasitas petugas dalam pengoperasian dan pemeliharaan peralatan	2	2	5	Ada	pemeliharaan secara berkala sesuai standar teknis.	Memadai	2	1	2
kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	3	4	17	Ada	perencanaan kegiatan yang matang	Memadai	2	4	14
Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelabuhan yang semakin rusak akibat terendam banjir ROB	2	3	10	Ada	Melakukan usulan pengajuan penambahan anggaran untuk perbaikan /pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Adanya keterlambatan pelayanan atau pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu	2	3	10	Ada	Melaksanakan leveling kawasan secara berkala dengan memaksimalkan anggaran yang sudah ada	Memadai	2	2	5
Adanya keterlambatan pelayanan atau pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu	2	2	5	Ada	Mengusulkan penambahan anggaran terkait Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memadai	2	2	5
Peralatan pendukung administrasi perkantoran yang tidak tersedia/belum tersedia	2	2	5	Ada	Melakukan pengajuan anggaran penyediaan peralatan pendukung administrasi perkantoran untuk kelancaran kegiatan pemenuhan perlatan dan perlengkapan kantor	Memadai	2	2	5
Kurang maksimalnya kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	2	5	Ada	Melakukan usulan pengajuan penambahan anggaran untuk perbaikan /pengadaan sarana dan prasarana pelayanan guna memberi kelancaran pada setiap kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terdapat risiko ketidakefisienan operasional apabila jumlah penyediaan jasa surat-menyrat tidak direncanakan secara tepat.	2	2	5	Ada	Melakukan analisis kebutuhan surat-menyrat secara berkala, Menyusun perencanaan jumlah layanan berdasarkan volume surat sebelumnya, Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan layanan surat-menyrat, Mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi digital bila memungkinkan.	Memadai	2	2	5
Terdapat risiko ketidaktepatan dan ketidaksesuaian informasi apabila jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan atau ketentuan yang berlaku	2	2	5	Ada	Menyusun jadwal dan mekanisme pelaporan yang jelas dan terstandar,Melakukan verifikasi dan validasi data sebelum laporan disampaikan,Memanfaatkan sistem pencatatan atau aplikasi administrasi untuk meningkatkan akurasi laporan	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Adanya keterlambatan pelayanan atau pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu	2	3	10	Ada	Mengusulkan analisi beban kerja pada masing-masing bidang untuk bahan pengusulan penambahan SDM di PPP Morodemak	Memadai	2	2	5
Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	2	2	5	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk pemeliharaan aset barang milik daerah di PPP Morodemak	Memadai	2	2	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	3	10	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk pemeliharaan aset barang milik daerah di PPP Morodemak	Memadai	2	2	5
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang sudah semakin rusak	2	3	10	Ada	Melakukan usulan pengajuan penambahan anggaran untuk perbaikan /pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Memadai	2	2	5
Data produksi perikanan rendah	3	4	17	Ada	Pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan perikanan	Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Volume pelayanan dan jumlah kapal di kolam pelabuhan meningkat	3	4	17	Ada	Membatasi durasi kapal sandar di kolam pelabuhan	Belum Memadai	3	4	17
Menerima komplain dari masyarakat	2	3	10	Ada	Memperhitungkan dengan cermat kebutuhan penyediaan instalasi listrik	Memadai	1	2	3
Menerima komplain dari masyarakat	2	3	10	Ada	Mengusulkan pengadaan dan perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	Memadai	1	1	1
Informasi pengelolaan pelabuhan terhambat	2	3	10	Ada	Menyelenggarakan dan menghadiri rapat koordinasi	Memadai	1	2	3
Surat dan dokumen penting hilang	1	3	7	Ada	Melaksanakan pengadministrasi surat menyurat sesuai aturan yang berlaku	Memadai	1	1	1
Kondisi kantor tidak nyaman	1	2	3	Ada	Memperhitungkan dengan cermat kebutuhan komunikasi, SDA dan listrik kantor	Memadai	1	1	1
Ketertiban, keamanan dan kebersihan kawasan pelabuhan buruk	2	3	10	Ada	Pengadaan tenaga K3 melalui pihak ketiga	Memadai	1	2	3
Kendaraan dinas rusak	1	2	3	Ada	Melakukan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan dinas operasional kantor	Memadai	1	1	1
Peralatan dan mesin rusak	1	2	3	Ada	Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pemeliharaan gedung kantor tidak terlaksana	1	2	3	Ada	Menganggarkan pemeliharaan gedung dan bangunan lain	Memadai	1	1	1
Fasilitas pelabuhan banyak yang rusak dan tidak layak	4	3	16	Ada	Perbaikan dan pemeliharaan, pengajuan anggaran	Memadai	3	3	13
Perbaikan fasilitas terhambat	3	3	13	Ada	Pemilihan rekanan yang profesional, monitoring dan pengawasan pekerjaan	Memadai	2	2	5
Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	3	4	17	Ada	peningkatan kualitas SDM yang ada, Perbaikan dan melengkapi sarpras, peningkatan pelayanan	Memadai	2	3	10
Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	3	3	13	Ada	Peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Tenaga pelaksana, penegakan disiplin, Monitoring dan pengawasan atasan	Memadai	2	3	10
Fungsi perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik	3	3	13	Ada	Peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Tenaga pelaksana, penegakan disiplin, Monitoring dan pengawasan atasan	Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penumpukan piutang oleh penyewa lahan	4	4	19	Ada	Penegakan perjanjian sewa, Pembinaan Tenaga pelaksana, monitoring dan pengawasan atasan, pemberian sanksi bagi pelanggar perjanjian	Memadai	3	3	13
Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi / SPK	4	3	16	Ada	Sosialisasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan oleh instansi terkait	Memadai	3	3	13
Penyediaan paket mengalami keterlabatan / mundur	3	2	9	Ada	Pemilihan rekanan yang kompeten dan profesional, pengawasan dan koordinasi dengan rekanan	Memadai	2	2	5
Penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tidak sesuai dengan kriteria	3	3	13	Ada	Pemilihan rekanan yang kompeten dan profesional, pengawasan dan koordinasi dengan rekanan	Memadai	2	2	5
Laporan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi tidak tersusun dengan baik	3	2	9	Ada	Pemilihan rekanan yang kompeten dan profesional, pengawasan dan koordinasi dengan rekanan	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Laporan jasa surat menyurat tidak tersusun dengan baik	2	2	5	Ada	Pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, penataan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	2	3
Jumlah beban tagihan yang dibayarkan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran yang dibuat	2	2	5	Ada	Pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, penataan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	2	3
Laporan jasa surat menyurat tidak tersusun dengan baik	2	2	5	Ada	Pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, penataan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	2	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	3	2	9	Ada	Pelatihan kompetensi petugas aset barang, menyusun jadwal pemeliharaan berkala, percepatan penghapusan barang milik daerah yang rusak, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	1	2
Proses pemeliharaan dan perawatan kurang optimal dan kurang tepat waktu	2	2	5	Ada	Perencanaan jadwal pemeliharaan dengan baik, mendatangkan tenaga service yang berkompeten	Memadai	2	1	2
Proses pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kurang optimal	3	3	13	Ada	Pemeliharaan gedung dengan skala prioritas dan disesuaikan dengan anggaran yang ada, perawatan dan pemeliharaan secara mandiri	Memadai	3	2	9
Produksi budidaya ikan di laut belum optimal	3	4	17	Ada	Memperbaiki atau menambah prasarana budidaya ikan di laut	Memadai	2	4	14
Produksi budidaya ikan di laut belum optimal	3	4	17	Ada	Penambahan jumlah sarana budidaya ikan di laut	Memadai	2	4	14

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Produksi budidaya ikan air payau dan tawar belum optimal	3	4	17	Ada	Menambah jumlah sarana budidaya ikan air payau dan tawar	Memadai	2	4	14
Produksi budidaya ikan air payau dan tawar belum optimal	3	4	17	Ada	Memperbaiki atau menambah jumlah prasarana budidaya ikan air payau dan tawar	Memadai	2	4	14
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia belum memenuhi kebutuhan	2	3	10	Ada	Memastikan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor memenuhi standar	Memadai	2	2	5
Peralatan dan perlengkapan kantor tidak memenuhi	2	3	10	Ada	Melakukan perencanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor agar memenuhi kebutuhan	Memadai	2	2	5
Penyelenggaraan rapat tidak sesuai rencana	2	3	10	Ada	Melakukan koordinasi penyelenggaraan rapat secara maksimal	Memadai	2	2	5
Pengiriman berkas/dokumen terlambat	3	3	13	Ada	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan pemanfaatan ruang digital	Memadai	2	3	10
Tagihan yang melebihi pagu anggaran	3	3	13	Ada	Melakukan penghematan dan pengajuan anggaran tambahan	Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Adanya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang berubah dari perencanaan	3	3	13	Ada	Melakukan pengajuan atau pergeseran anggaran	Memadai	2	3	10
Jumlah kendaran dinas oprasional banyak yang mengalami kerusakan	3	3	13	Ada	Pendataan pemeliharaan kendaraan dinas secara berkala	Memadai	2	3	10
Banyaknya jumlah peralatan dan mesin yang rusak	3	3	13	Ada	Melakukan pendataan peralatan dan mesin untuk dilakukan pemeliharaan secara berkala	Memadai	2	3	10
Adanya kerusakan pada Gedung Kantor dan bangunan	3	3	13	Ada	Melakukan pengajuan atau pergeseran anggaran	Memadai	2	3	10
Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang semakin rusak	4	4	19	Ada	Melakukan usulan pengajuan penambahan anggaran untuk perbaikan /pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	17
Penyewa lahan tidak membayar retribusi pada waktu yang sudah ditetapkan	4	4	19	Ada	Melakukan penagihan retribusi secara berkala bagi penyewa lahan yang belum membayar	Belum Memadai	3	4	17

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Biaya belanja paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terlalu mahal	3	3	13	Ada	Melakukan pengecekan harga dan kesediaan barang melalui aplikasi Gratis Ongkir sebagai dasar perencanaan dan pengadaan barang	Belum Memadai	2	3	10
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	3	3	13	Ada	Melakukan pengecekan jenis dan spesifikasi barang melalui aplikasi Gratis Ongkir sebagai dasar perencanaan dan pengadaan barang	Belum Memadai	2	3	10
Adanya tamu undangan yang tidak hadir pada kegiatan rapat	3	3	13	Ada	Memberitahukan undangan kegiatan minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut	Belum Memadai	2	3	10
Rendahnya tingkat pengiriman jasa surat menyurat melalui kantor pos	3	3	13	Ada	Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran jasa surat menyurat sesuai dengan kondisi yang ada	Belum Memadai	2	3	10
Biaya belanja jasa langganan air yang tinggi	3	3	13	Ada	Melakukan kontrol penggunaan air kantor supaya tidak berlebihan	Belum Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terlambatnya penerimaan gaji bagi P3K Paruh Waktu dan Tenaga Outsourcing	3	3	13	Ada	Melakukan koordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk mempercepat proses pemindahbukuan gaji bagi P3K Paruh Waktu dan Tenaga Outsourcing	Belum Memadai	2	3	10
Kendaraan dinas sering mengalami kerusakan	3	3	13	Ada	Melakukan pengajuan kendaraan dinas dengan kondisi yang baik dan layak kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	2	3	10
Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya melebihi anggaran yang disediakan	3	3	13	Ada	Melakukan penggunaan peralatan dan mesin lainnya dengan lebih hati-hati	Belum Memadai	2	3	10
Hasil pekerjaan rehabilitasi yang tidak sesuai dengan perencanaan	3	3	13	Ada	Melaksanakan koordinasi dengan pengawas pekerjaan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disusun	Belum Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak terselesaikannya penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan secara tepat waktu	4	3	16	Ada	melakukan penyelesaian penanganan pelanggaran dengan pengenaan sanksi administratif sesuai regulasi dan mengedepankan azas ultimum remidium serta koordinasi/kolaborasi dengan insatnsi terkait yang memiliki kewenangan	Memadai	4	2	12
Kurangnya pemahaman pelaku usaha/masyarakat di perairan umum daratan terhadap regulasi perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan sektor perikanan	4	3	16	Ada	melakukan pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh pelaku usaha/masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan di perairan daratan	Memadai	4	2	12
Penurunan kualitas dan habitat ekosistem pesisir	4	2	12	Ada	Melakukan pendampingan penyusunan dan implementasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut	4	2	12	Ada	Berperan aktif pada Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dan berkolaborasi dengan instansi terkait pengawasan pemanfaatan ruang laut	Memadai	2	1	2
Peserta tidak memahami esensi kegiatan secara komprehensif	3	2	9	Ada	Berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten dan penyuluh lapangan	Memadai	2	1	2
Ketidakselarasannya kebutuhan masyaraka pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tema kegiatan	3	2	9	Ada	Berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait kebutuhan masyarakat yang dapat difasilitasi dalam kegiatan terkait	Memadai	2	1	2
Kelompok tidak tepat sasaran	3	3	13	Ada	Melakukan verifikasi kelompok calon penerima bantuan bersama-sama dengan Dinas kabupaten/kota terkait	Memadai	2	1	2
Penyediaan data dan informasi usaha subsektor perikanan budidaya tidak optimal	3	2	9	Ada	Perlu diadakannya sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan bagi petugas statistik perikanan budidaya Dinas Perikanan Kabupaten/Kota	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bantuan yang diberikan dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Dinas Kab/Kota maupun Provinsi	5	2	15	Ada	Melakukan monitoring dan evaluasi penerima bantuan	Memadai	3	2	9
Pelaku usaha perikanan budidaya yang telah dibina tidak melanjutkan ke tahap permohonan Sertifikasi CBIB, CPIB dan CPPIB	3	2	9	Ada	Pendampingan dan pembinaan secara administrasi dan teknis sampai dengan proses permohonan sertifikasi di OSS	Memadai	2	1	2
Pembudidaya ikan tidak menerapkan teknologi budidaya yang telah diberikan	4	2	12	Ada	Memfasilitasi sosialisasi atau pelatihan penerapan teknologi kepada pembudidaya ikan	Memadai	3	2	9
Pelaporan data dan informasi usaha subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tidak optimal	3	2	9	Ada	Sosialisasi pendataan bagi petugas statistik di tingkat Kabupaten/Kota	Memadai	2	1	2
Kompetensi SDM dan pelaku usaha perikanan menurun	3	2	9	Ada	Pembinaan , fasilitasi dan pendampingan bagi pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan	Memadai	2	2	5
Tidak tersedia ikan untuk konsumsi dan bahan baku industri	3	2	9	Ada	Fasilitasi pertemuan antara pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah)	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pengelolaan kawasan konservasi kurang efektif sehingga terjadi degradasi ekosistem di dalam kawasan	4	4	19	Ada	1. Berkoordinasi dan kolaborasi antar instansi, lembaga/CSR dan masyarakat guna pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, 2. Perencanaan kegiatan pengelolaan yang efektif dan efisien	Memadai	3	4	17
Tingkat keberhasilan tumbuh (survival rate) dari kegiatan rehabilitasi rendah	4	4	19	Ada	1. Berkoordinasi dan kolaborasi dengan instansi lain terkait metode dan teknis rehabilitasi 2. Penjadwalan tanam yang mempertimbangkan prakiraan cuaca (musim)	Memadai	4	3	16
Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	4	4	19	Ada	Melaksanakan tindak lanjut pelanggaran sanksi administrasi bagi para pelaku pelanggaran secara cermat dan tepat	Memadai	3	3	13
Belum optimalnya Frekuensi Operasi Pengawasan yang sesuai Target Cakupan WPPNRI yang Diawasi	4	4	19	Ada	Manajemen peningkatan frekuensi operasi sesuai objek dan urgensi guna optimalisasi penggunaan biaya operasi	Belum Memadai	3	3	13

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	3	3	13	Ada	Melaksanakan pengawasan usaha pembudidayaan ikan di laut s.d. 12 mil.	Memadai	2	2	5
Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	4	4	19	Ada	Melaksanakan pengawasan usaha penangkapan ikan sesuai kewenangan provinsi	Belum Memadai	3	3	13
Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	3	3	13	Ada	Melaksanakan ops. Laut s.d. 12 mil, pengawasan di area pesisir yang memanfaatkan sumberdaya kelautan	Memadai	2	2	5
Belum optimalnya pengembangan kapasitas dan keterampilan teknis bagi POKMASWAS	3	3	13	Ada	Melaksanakan kegiatan penumbuhkembangan kapasitas POKMASWAS	Memadai	2	2	5
Keterbatasan mendapatkan Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang sesuai dengan harga pagu	3	2	9	Ada	Melakukan penyisiran marketplace Gratis Ongkir supaya Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang butuhkan didapat sesuai waktu yang ditentukan	Memadai	2	2	5
Kurangnya terpenuhinya jumlah anggaran untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	3	13	Ada	Diadakannya penalti perjanjian dengan pihak ketiga	Memadai	3	2	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kurangnya terpenuhinya jumlah anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	13	Ada	Menyusun Schedule perjalanan dinas yang matang	Memadai	2	3	10
Terjadinya keterlambatan pengiriman surat dinas ke tujuan	3	2	9	Ada	ketepatan waktu dalam pembuatan laporan	Memadai	2	2	5
Perlunya penambahan daya listrik dan penambahan kecepatan internet	3	3	13	Ada	Dianggarkannya biaya penambahan daya listrik dan penambahan kecepatan internet	Memadai	3	2	9
Keterlambatan dalam pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu	3	2	9	Ada	ketepatan waktu dalam pelaporan anggaran bulan sebelumnya sehingga pengajuan anggaran dapat diajukan tepat waktu	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kurangnya anggaran Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	4	3	16	Ada	Melakukan pemeriksaan dan perbaikan rutin sesuai jadwal yang ditentukan, membuat SOP yang jelas untuk setiap jenis pemeliharaan, penambahan anggaran pemeliharaan dan melakukan pengawasan serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas	Memadai	3	3	13
Kurangnya anggaran Pemeliharaan rutin Peralatan dan Mesin Lainnya	3	2	9	Ada	Melakukan pemeriksaan dan perbaikan rutin sesuai jadwal yang ditentukan, membuat SOP yang jelas untuk setiap jenis pemeliharaan, penambahan anggaran pemeliharaan dan melakukan pengawasan serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Gedung kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Rusak akibat usia dan Cuaca ekstrim	4	3	16	Ada	Melakukan pemeriksaan dan perbaikan sesuai anggaran yang ada, membuat SOP yang jelas untuk setiap jenis pemeliharaan, penambahan anggaran pemeliharaan dan melakukan pengawasan serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemeliharaan	Belum Memadai	3	3	13
Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	5	4	23	Ada	"- Merencanakan anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan - Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM - Kolaborasi dengan mitra (NGO, dinas setempat, akademisi)"	Belum Memadai	4	3	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bibit mangrove dan cemara laut yang mengalami kekeringan atau mati pada saat masa pemeliharaan	4	3	16	Ada	"- Koordinasi dengan masyarakat lokal dan penyuluh kehutanan mengenai lokasi penanaman yang minim potensi terkena gelombang tinggi dan arus yang membawa sampah dari daratan - Melaksanakan penanaman cemara laut pada musim penghujan"	Memadai	2	3	10
Rendahnya tingkat penanganan perkara sanksi administratif	2	4	14	Ada	Merencanakan kegiatan pengawasan	Memadai	1	3	7
Rendahnya jumlah hari operasi pengawasan SDKP dengan Kapal Pengawas	3	4	17	Ada	Merencanakan kegiatan operasi kapal pengawas	Memadai	2	4	14
Target pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha tidak tercapai	3	3	13	Ada	Penjadwalan kegiatan Pengawasan dan optimalisasi SDM	Memadai	2	2	5
Target pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha tidak tercapai	3	3	13	Ada	Penjadwalan kegiatan Pengawasan dan optimalisasi SDM	Memadai	2	2	5
Pengembangan POKMASWAS tidak berjalan optimal	2	3	10	Ada	Pemberian dukungan sarana dan koordinasi dengan instansi terkait	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Keterbatasan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	2	3	10	Ada	"-Menyusun perencanaan kebutuhan komponen listrik secara berkala berdasarkan kondisi dan umur pakai instalasi listrik di bangunan kantor - Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi listrik secara rutin untuk mendeteksi kerusakan lebih dini"	Memadai	2	2	5
Peralatan dan perlengkapan kantor tidak tidak memadai	2	3	10	Ada	"- Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (RKB) secara periodik dan berbasis kebutuhan unit kerja - Melakukan evaluasi dan pembaruan data kebutuhan barang secara berkala"	Memadai	2	2	5
Tidak optimalnya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	3	10	Ada	Menyusun perencanaan jadwal rapat yang akan dihadiri secara langsung dan hadir secara daring	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kesalahan pencatatan atau pengarsipan surat masuk dan keluar	2	3	10	Ada	Menyusun standar prosedur operasional (SOP) pengiriman dan penerimaan surat dan menerapkan sistem pengarsipan yang baku dan terdigitalisasi	Memadai	2	1	2
Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	3	2	9	Ada	Koordinasi dengan pengguna gedung kantor bersama lainnya dan menyesuaikan perencanaan anggaran tahun yang akan datang	Memadai	1	3	7
Terjadinya gangguan atau keterlambatan dalam penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2	3	10	Ada	Meningkatkan kapasitas SDM dan pelatihan	Memadai	2	2	5
Biaya pemeliharaan yang melebihi anggaran dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan berdampak pada kegiatan operasional lain	3	2	9	Ada	"-Melakukan pemeliharaan preventif secara rutin untuk mencegah kerusakan besar - Membuat perencanaan dan anggaran pemeliharaan tahunan yang realistis berdasarkan kondisi kendaraan"	Memadai	2	2	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan kantor	3	3	13	Ada	"- Melakukan pengendalian preventif sebelum terjadinya kerusakan - Melakukan pemeriksaan harian terhadap kondisi peralatan"	Memadai	2	2	5
Keterlambatan penyelesaian pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	3	3	13	Ada	Melakukan survei fisik menyeluruh agar tidak ada kerusakan yang terlewat dalam RAB	Memadai	2	3	10
Pemanfaatan kawasan konservasi yang bersifat destruktif	4	3	16	Ada	1. Sosialisasi kepada masyarakat 2. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengawasan di kawasan konservasi 3. Merehabilitasi ekosistem di dalam kawasan 4. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan	Belum Memadai	3	2	9
Mangrove yang di tanam mati/hilang	4	3	16	Ada	1. Pemilihan bibit yang sesuai standar 2. Penentuan waktu penanaman 3. Melaksanakan pemeliharaan setelah 3 bulan pasca penanaman bersama kelompok	Belum Memadai	3	2	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Belum adanya Peraturan perundang-undangan di tingkat Provinsi yang mengatur sanksi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	3	3	13	Ada	Menggunakan Peraturan perundang-undangan tingkat Pusat untuk menangani perkara sektor kelautan dan perikanan	Memadai	2	2	5
Tidak terawasinya WPPNRI 712 dari kegiatan IUU Fishing	2	4	14	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan bersama instansi terkait (PSDKP) di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil di wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	4	4	19	Ada	1. Melaksanakan penyadartahuan kepada pelaku usaha tentang peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang berlaku 2. Melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan terkait perijinan berusaha dan peraturan dan perundangan bidang kelautan dan perikanan 3. Bagi pelaku usaha yang tidak tertib diberikan sanksi	Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	4	4	19	Ada	1. Melaksanakan penyadartahuan kepada pelaku usaha tentang peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang berlaku 2. Melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan terkait perijinan berusaha dan peraturan dan perundangan bidang kelautan dan perikanan 3. Bagi pelaku usaha yang tidak tertib diberikan sanksi	Memadai	2	3	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	4	4	19	Ada	1. Melaksanakan penyadartahuan kepada pelaku usaha tentang peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang berlaku 2. Melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan terkait perijinan berusaha dan peraturan dan perundangan bidang kelautan dan perikanan 3. Bagi pelaku usaha yang tidak tertib diberikan sanksi	Memadai	2	3	10
Belum optimalnya pengembangan kapasitas dan keterampilan bagi POKMASWAS	3	3	13	Ada	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap POKMASWAS laut	Memadai	2	3	10

c. Penetapan Risiko Prioritas

Risiko prioritas merupakan risiko yang akan dilakukan tindak pengendalian lebih lanjut. Penetapan risiko prioritas berdasarkan pada skala atau level risiko serta selera risiko yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, dan/atau kategori sedang.

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indikator Sasaran				
Nelayan tidak dapat melaut	12	Kepala Dinas	Cuaca buruk	Kelangkaan ikan
Rendahnya kadar NaCl pada garam	13	Kepala Dinas	Teknologi yang belum memadai	Harga garam yang rendah
Indikator Program				
Pelaku usaha penangkapan sebagian besar tidak memiliki dokumen perizinan penangkapan secara lengkap	16	Pemilik kapal, Nelayan	Rendahnya kesadaran para pemilik kapal akan pemenuhan kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan	Pemilik kapal rentan terhadap permasalahan hukum dengan Aparat Penegak Hukum
Kurangnya sumber daya (manusia, keuangan, teknologi) untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan.	13	PPP Asemdayong	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang terbatas	Pelayanan kepelabuhanan kepada masyarakat dan pengguna jasa kawasan tidak dapat berjalan seacara optimal
Aktivitas penangkapan ikan terhambat	16	Kepala PPN Tasikagung	Sarpras pelabuhan perikanan kurang memadai	Produksi perikanan tangkap menurun. Penghasilan ABK rendah
Adanya kerusakan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan konsumsi air laut	14	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan konsumsi air laut	Target produksi ikan tidak tercapai
Adanya pelayanan atau pekerjaan yang terlambat untuk diselesaikan	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten di PPP Larangan	Kebutuhan pengguna jasa layanan pelabuhan yang tidak terpenuhi

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	12	Kepala Bidang PPSDP	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	Kerusakan ekosistem dan sumber daya ikan, penurunan pendapatan masyarakat
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Seksi pengawasan	Kurangnya kepedulian nelayan terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal dan penggunaan peralatan tangkap yang ramah lingkungan	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan
Terjadinya peningkatan kasus pelanggaran	17	Kepala CDK Wilayah Selatan	Kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap kelengkapan dokumen berusaha	Kapal perikanan beroperasi tanpa dilengkapi dokumen periznan yang berlaku
Indikator Kegiatan				
Beberapa bangunan kios ikan dan warung makan mengalami kerusakan dan tidak layak pakai	13	Pelaku Usaha, PPP Asemdayong	Beberapa bangunan kios sudah dimakan usia dan belum adanya anggaran pendukung	Kegiatan ekonomi para pelaku usaha mengalami kelesuan sehingga menurunkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
Minimnya kerjasama dan dukungan dari stakeholder diluar pelabuhan dalam mengembangkan kawasan	13	PPP Asemdayong	Kurangnya koordinasi secara intens dengan instansi diluar PPP Asemdayong	Tidak ada nya dukungan yang maksimal dari luar instansi PPP Asemdayong

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Anggaran pembangunan/rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	14	Kepala PPP Klidang Lor	Alokasi anggaran kurang untuk pembangunan/rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	Fasilitas kepelabuhan belum memadai
Nelayan dan Bakul tidak aman dalam melakukan aktivitas di Pelabuhan	17	PPP Tawang	Anggaran pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan kecil	Pendapatan nelayan dan bakul menurun
Penerbitan dokumen kesyahbandaran ilegal	10	ppp tawang	Banyaknya dokumen perijinan	mencari jalan pintas dalam kepengurusan dokumen
Kurangnya dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	13	PPP Karimunjawa	Kebijakan terkait kelengkapan dokumen kepelabuhanan terkendala keterbatasan anggaran	Pelabuhan Perikanan kurang dapat berkembang lebih baik
Nelayan enggan membayar retribusi tambat labuh dan pas masuk	10	PPP Karimunjawa	Kondisi kolam pelabuhan yang sudah dangkal dan banyak yang rusak	pendapatan pemerintah dari retribusi berkurang
Adanya kerusakan sarana dan prasarana produksi budidaya di loka air laut	14	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan di loka air laut	target produksi ikan tidak tercapai
Turunnya produksi benih ikan endemik yang dikembangkan	14	Kepala BPPB Kelas A	Turunnya produktifitas induk ikan endemik	Target produksi ikan tidak tercapai
Adanya kerusakan sarana dan prasaranan budidaya ikan di loka air tawar dan payau	14	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan di loka air tawar dan payau	Target produksi ikan tidak tercapai

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Kurangnya kesadaran nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku
Akses jalan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah kunjungan dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan
Kolam pelabuhan yang semakin dangkal	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Sedimentasi lumpur yang masuk ke kolam pelabuhan dari aliran Sungai Bongkok	Penurunan jumlah trip harian dan hasil tangkapan ikan di kawasan pelabuhan
Dokumen pengembangan pelabuhan perikanan yang dimiliki masih belum lengkap	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran untuk penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan	Terhambatnya pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan
Tidak terselesaikannya penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan secara tepat waktu	12	Kepala Bidang PPSDP	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masyarakat	masih terjadinya pelanggaran, kerusakan ekosistem sumberdaya ikan, konflik sosial, kerugian ekonomi

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kurangnya pemahaman pelaku usaha/masyarakat pembudidaya air payau dan pergaraman terhadap regulasi perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan	12	Kepala Bidang PPSDP	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masyarakat	Pelaku usaha/masyarakat rentan terkena sanksi, terjadi kerusakan ekosistem sumber daya ikan
Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	13	1. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Kurangnya pemahaman masyarakat/nelayan sekitar tentang zonasi dan aturan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	Kerusakan ekosistem terumbu karang Menurunnya hasil tangkapan nelayan
Keselamatan petugas pada saat survei/monitoring di lapangan	17	1. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	1. Arus yang kencang dan gelombang yang tinggi 2. Minimnya sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja	Kecelakaan Kerja / Kematian

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman yang cukup tinggi	16	1. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	1. Kualitas bibit yang tidak sesuai standar, 2. Metode dan waktu penanaman yang kurang tepat, 3. Jarak dan kondisi lingkungan sekitar lahan penanaman yang tidak sesuai, 4. Kegiatan pemeliharaan pasca penanaman yang tidak maksimal.	Bibit mangrove yang ditanam tidak tumbuh (mati), Bibit hilang terbawa ombak/gelombang
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Seksi pengawasan	Belum optimalnya tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk memberikan efek jera	Tidak ada efek jera bagi para pelaku usaha yang melanggar jika sanksi penanganan tindak lanjut belum optimal
Rendahnya tingkat penerbitan HPK dan SLO Kapal perikanan Kewenangan Provinsi	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Seksi pengawasan	Masih rendahnya kepatuhan terkait kepemilikan, kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi	Kegiatan penangkapan ikan oleh kapal perikanan kewenangan provinsi tidak terlapor dan terawasi

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	16	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Anggaran dan SDM pengelola tidak memadai	Nilai EVIKA masih sangat rendah
Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan Kapal Pengawas	16	Kepala CDK Wilayah Selatan	Biaya operasional dan pemeliharaan kapal pengawas yang tinggi	Banyak pelaku usaha dan kapal perikanan yang beroperasi tidak diperiksa
Indikator Sub Kegiatan				
Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang semakin rusak	19	Kepala PPN Tegalsari	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPN Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	17	Kepala PPN Tegalsari	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kapal perikanan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi tertangkap saat patroli pengawasan dan menghambat aktivitas penangkapan serta citra pelabuhan.	13	Kepala PPP Wonokerto	Kurangnya kesadaran nelayan untuk tertib dokumen dan penggunaan API ramah lingkungan	Kapal perikanan berpotensi terkena penertiban atau penindakan saat patroli pengawasan; Menurunnya citra pelabuhan apabila masih terdapat kapal yang tidak mematuhi ketentuan perikanan
Proses bongkar muat ikan di kawasan PPP Wonokerto yang tidak lancar menyebabkan mutu hasil tangkapan tidak terjaga, sehingga menurunkan nilai jual ikan dan berdampak pada pendapatan nelayan.	13	Kepala PPP Wonokerto	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bongkar muat; Penataan aktivitas bongkar muat yang belum tertib; Penanganan hasil tangkapan yang belum sesuai standar	Mutu hasil tangkapan ikan tidak terjaga; kapal nelayan tidak bisa sandar di dermaga sehingga harus sandar di dermaga lama yang tergenang rob

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kondisi TPI Wonokerto yang kotor dan kumuh menyebabkan mutu hasil tangkapan ikan yang dilelang menjadi tidak higienis, sehingga menurunkan nilai jual dan kepercayaan pembeli.	13	Kepala PPP Wonokerto	Kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan di area TPI; Rendahnya kesadaran pedagang dan pengguna TPI dalam menjaga kebersihan; Keterbatasan sarana kebersihan dan sanitasi di kawasan TPI	Mutu dan higienitas ikan menurun; Harga jual ikan menjadi lebih rendah; Menurunnya kepercayaan pembeli terhadap kualitas ikan di TPI; Menurunnya aktivitas lelang dan daya tarik pasar ikan
Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di kawasan PPP Wonokerto, disertai kurangnya koordinasi antar pihak terkait, fasilitas pendukung, serta pemahaman nelayan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan kapal	13	Kepala PPP Wonokerto	Kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan dan masyarakat pelabuhan; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan kapal; Terbatasnya fasilitas pendukung keselamatan di kawasan pelabuhan; Koordinasi antar instansi dan pihak terkait belum optimal.	Meningkatnya potensi kecelakaan atau gangguan keselamatan kapal; Aktivitas pelabuhan menjadi kurang tertib dan aman; Menurunnya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna pelabuhan; Berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan pengguna pelabuhan.

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persekongkolan antara pemilik pekerjaan dengan calon penyedia jasa menyebabkan proses pemilihan tidak objektif dan berpotensi menunjuk penyedia jasa yang tidak kompeten, sehingga menurunkan kualitas hasil pekerjaan serta berdampak pada memburuknya citra Dinas Kelautan dan Perikanan	20	Kepala PPP Wonokerto	Kurangnya transparansi dalam proses pemilihan penyedia jasa; Pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa belum optimal; Adanya potensi konflik kepentingan antara pihak yang terlibat dalam proses pengadaan	Kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis; Potensi kerugian keuangan negara; Menurunnya kepercayaan publik terhadap instansi; Potensi temuan audit oleh aparat pengawas
Banyaknya fasilitas kepelabuhanan di PPP Wonokerto yang rusak menyebabkan sarana dan prasarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menghambat pelayanan dan aktivitas operasional pelabuhan.	13	Kepala PPP Wonokerto	Rob yang menggenangi kawasan PPP Wonokerto; usia infrastruktur dan kurangnya pemeliharaan	Aset pelabuhan tidak termanfaatkan secara optimal dan berpotensi mangkrak; Menurunnya produktivitas kawasan pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan; Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan aset; Munculnya kesan kawasan pelabuhan kurang tertata dan kurang
Jumlah anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan terbatas	13	Kepala PPP Klidang Lor	Sarana dan prasaran pelabuhan belum lengkap	pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha terganggu

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
pelayanan fungsi pemerintahan dan perusahaan belum optimal	13	Kepala PPP Klidang Lor	Jumlah Anggaran yang tersedia serta SDM yang dimiliki terbatas	pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha belum optimal
Jumlah anggaran Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan Lainnya terbatas	14	Kepala PPP Klidang Lor	Gedung kantor dan bangunan Lainnya dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	Gedung kantor dan bangunan Lainnya belum berfungsi optimal
kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan	13	ppp tawang	ketidakesesuaian spesifikasi sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional pelabuhan,	PAD menurun
ketidakpatuhan pengguna pelabuhan terhadap peraturan yang berlaku.	10	ppp tawang	banyaknya stakeholder yang ada dikawasan PPP	overlap tupoksi
kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	14	ppp tawang	belum adanya pengawasan pelaksanaan kegiatan secara berkala	keterlambatan pelaksanaan kegiatan
Data produksi perikanan rendah	10	Kepala PPN Tasikagung	Hasil tangkapan tidak didaratkan di PPN Tasikagung	Kebijakan pengembangan penangkapan ikan ditinjau kembali
Volume pelayanan dan jumlah kapal di kolam pelabuhan meningkat	17	Kepala PPN Tasikagung	Pelayanan sesuai standar ISO	Kapal berdesak-desakan
Fasilitas pelabuhan banyak yang rusak dan tidak layak	13	PPP Karimunjawa	Kurangnya pemeliharaan dan faktor usia bangunan	Pelayanan pelabuhan terganggu

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi / SPK	13	PPP Karimun Jawa	Kurangnya kesadaran nelayan terhadapnya pentingnya asuransi atau perlindungan	Nelayan tidak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami ketika bekerja
Produksi budidaya ikan di laut belum optimal	14	Kepala BPPB Kelas A	Terbatasnya jumlah prasarana untuk budidaya ikan di laut	Produksi budidaya ikan di laut tidak optimal
Produksi budidaya ikan di laut belum optimal	14	Kepala BPPB Kelas A	Terbatasnya jumlah sarana untuk budidaya ikan di laut	Produksi budidaya ikan laut tidak optimal
Produksi budidaya ikan air payau dan tawar belum optimal	14	Kepala BPPB Kelas A	Terbatasnya jumlah saranan untuk budidaya ikan air payau dan tawar	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar tidak optimal
Produksi budidaya ikan air payau dan tawar belum optimal	14	Kepala BPPB Kelas A	Terbatasnya jumlah prasarana untuk budidaya ikan air payau dan tawar	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar tidak optimal
Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang semakin rusak	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPP Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan
Penyewa lahan tidak membayar retribusi pada waktu yang sudah ditetapkan	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Kurangnya kesadaran dari penyewa lahan	Target retribusi dari pelayanan sewa lahan yang tidak tercapai

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak terselesaikannya penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan secara tepat waktu	12	Kepala Bidang PPSDP	kompleksitas modus pelanggaran, keterbatasan kompetensi SDM pengawasan dan keterbatasan kewenangan	masih terjadinya pelanggaran, kerusakan ekosistem sumberdaya ikan, konflik sosial, kerugian ekonomi
Kurangnya pemahaman pelaku usaha/masyarakat di perairan umum daratan terhadap regulasi perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan sektor perikanan	12	Kepala Bidang PPSDP	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masyarakat	Pelaku usaha/masyarakat rentan terkena sanksi, terjadi kerusakan ekosistem sumber daya ikan
Pengelolaan kawasan konservasi kurang efektif sehingga terjadi degradasi ekosistem di dalam kawasan	17	1. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	1. Alokasi anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi yang tidak memadai. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, 3. Tingginya aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.	Meningkatnya luas kawasan konservasi yang mengalami kerusakan dan terancamnya target biota dan keanekaragaman hayati laut

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat keberhasilan tumbuh (survival rate) dari kegiatan rehabilitasi rendah	16	1. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	1. Pemilihan metode yang kurang sesuai dengan karakteristik lokasi rehabilitasi. 2. Kerusakan bibit karang akibat pencemaran/sampah.	Kegiatan rehabilitasi tidak memberikan hasil yang optimal, dan target luasan rehabilitasi tidak tercapai
Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Seksi pengawasan	Masih rendahnya kepatuhan terkait kepemilikan, kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan
Belum optimalnya Frekuensi Operasi Pengawasan yang sesuai Target Cakupan WPPNRI yang Diawasi	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Seksi pengawasan	Biaya operasional operasi yang cenderung tinggi dan Kesiapan sarana prasarana operasi yang belum maksimal	Peningkatan potensi pelanggaran dan kerusakan SDKP di Wilayah Cakupan WPPNRI yang Diawasi

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Seksi pengawasan	Masih rendahnya kepatuhan terkait kepemilikan, kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi	Peningkatan potensi pelanggaran dan kerusakan SDKP di Wilayah Cakupan WPPNRI yang Diawasi
Kurangnya anggaran Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Terbatasnya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas terdiri dari 1 mobil dinas dan 3 motor dinas dalam kondisi yang tidak baik.	Penyusutan nilai aset yang berakibat kerusakan kendaraan dinas sehingga meningkatkan biaya perbaikan di masa mendatang
Gedung kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Rusak akibat usia dan Cuaca ekstrim	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Usia gedung dan kualitas bangunan yang dimakan usia serta pengaruh cuaca ekstrim	Kondisi Ruang kerja menjadi rawan sehingga kurang nyaman bagi Pegawai CDKWB dan terjadi peningkatan biaya perbaikan dimasa mendatang
Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	16	Kepala CDK Wilayah Selatan	Anggaran dan SDM pengelola tidak memadai	Nilai EVIKA masih rendah

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rendahnya jumlah hari operasi pengawasan SDKP dengan Kapal Pengawas	14	Kepala CDK Wilayah Selatan	Biaya operasional kapal pengawas yang tinggi	Jangkauan wilayah dan kapal perikanan yang beroperasi di laut kurang terawasi

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Rencana Tindak Pengendalian ini yang menjadi dasar dalam memastikan bahwa perencanaan yang disusun telah berbasis pada risiko.

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Indikator Sasaran										
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Nelayan tidak dapat melaut	12	Kepala Dinas	Cuaca buruk	Kelangkaan ikan	Mitigasi Dampak	Pemberian fish finder kepada nelayan	Kepala Dinas	1 tahun
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Garam	Rendahnya kadar NaCl pada garam	13	Kepala Dinas	Teknologi yang belum memadai	Harga garam yang rendah	Mitigasi Dampak	Pemberian hibah geoisolator kepada petambak garam	Kepala Dinas	1 tahun
Indikator Program										
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Pelaku usaha penangkapan sebagian besar tidak memiliki dokumen perizinan penangkapan secara lengkap	16	Pemilik kapal, Nelayan	Rendahnya kesadaran para pemilik kapal akan pemenuhan kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan	Pemilik kapal rentan terhadap permasalahan hukum dengan Aparat Penegak Hukum	Mitigasi Kemungkinan	Melanjutkan pelayanan perizinan terpadu dan pembinaan kepada masyarakat nelayan	Kepala Pelabuhan	November 2028

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Kurangnya sumber daya (manusia, keuangan, teknologi) untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan.	13	PPP Asemdayong	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang terbatas	Pelayanan kepelabuhanan kepada masyarakat dan pengguna jasa kawasan tidak dapat berjalan secara optimal	Mitigasi Dampak	Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan kompetensi baik secara luring maupun daring, dan mengusulkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pelayanan	Kepala Pelabuhan	Desember 2027
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Aktivitas penangkapan ikan terhambat	16	Kepala PPN Tasikagung	Sarpras pelabuhan perikanan kurang memadai	Produksi perikanan tangkap menurun. Penghasilan ABK rendah	Mitigasi Kemungkinan	Optimalisasi pemeliharaan sarpras	Kepala PPN Tasikagung	Januari-Desember
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	Adanya kerusakan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan konsumsi air laut	14	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan konsumsi air laut	Target produksi ikan tidak tercapai	Mitigasi Kemungkinan	Perbaikan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan konsumsi air laut	Kelapa BPPB Kelas A	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Adanya pelayanan atau pekerjaan yang terlambat untuk diselesaikan	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten di PPP Larangan	Kebutuhan pengguna jasa layanan pelabuhan yang tidak terpenuhi	Mitigasi Kemungkinan	Menugaskan SDM yang ada untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi/pe latihan untuk menambah kompetensi yang dibutuhkan untuk pelayanan pelabuhan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	12	Kepala Bidang PPSDP	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	Kerusakan ekosistem dan sumber daya ikan, penurunan pendapatan masyarakat	Mitigasi Dampak	melakukan perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan	Bidang PPSDP	Desember 2027

Indikator Kegiatan

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Beberapa bangunan kios ikan dan warung makan mengalami kerusakan dan tidak layak pakai	13	Pelaku Usaha, PPP Asemdayong	Beberapa bangunan kios sudah dimakan usia dan belum adanya anggaran pendukung	Kegiatan ekonomi para pelaku usaha mengalami kelesuan sehingga menurunkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Mitigasi Dampak	Perawatan secara mandiri oleh pelaku usaha	PPP Asemdayong	Desember 2027
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Minimnya kerjasama dan dukungan dari stakeholder diluar pelabuhan dalam mengembangkan kawasan	13	PPP Asemdayong	Kurangnya koordinasi secara intens dengan instansi diluar PPP Asemdayong	Tidak ada nya dukungan yang maksimal dari luar instansi PPP Asemdayong	Mitigasi Kemungkinan	Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi luar PPP Asemdayong	Kepala PPP Asemdayong	Desember 2027
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/dir ehabilitasi	Anggaran pembangunan /rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	14	Kepala PPP Klidang Lor	Alokasi anggaran kurang untuk pembangunan /rehabilitasi fasilitas kepelabuhan	Fasilitas kepelabuhan belum memadai	Mitigasi Dampak	Mengusulkan penambahan anggaran pada periode berikutnya	Kepala PPP Klidang Lor	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/dir ehabilitasi	Nelayan dan Bakul tidak aman dalam melakukan aktivitas di Pelabuhan	17	PPP Tawang	Anggaran pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan kecil	Pendapatan nelayan dan bakul menurun	Mitigasi Kemungkinan	pengerukan perbaikan kios dan penataan kawasan	PPP Tawang	Desember 2028
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Penerbitan dokumen kesyahbandaran ilegal	10	ppp tawang	Banyaknya dokumen perijinan	mencari jalan pintas dalam kepengurusan dokumen	Mitigasi Dampak	sosialisasi dan gerai perijinan	ppp tawang	desember 2027
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/dir ehabilitasi	Kurangnya dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	13	PPP Karimunjawa	Kebijakan terkait kelengkapan dokumen kepelabuhanan terkendala keterbatasan anggaran	Pelabuhan Perikanan kurang dapat berkembang lebih baik	Mitigasi Dampak	Perbaikan sistem administrasi, pengajuan dokumen pendukung pelabuhan dan pengajuan anggaran	Kepala PPP Karimunjawa	1 Tahun (Januari - Desember 2027)
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/dir ehabilitasi	Nelayan enggan membayar retribusi tambat labuh dan pas masuk	10	PPP Karimunjawa	Kondisi kolam pelabuhan yang sudah dangkal dan banyak yang rusak	pendapatan pemerintah dari retribusi berkurang	Mitigasi Kemungkinan	Perbaikan dan pemilharaan sarpras pelabuhan, pengajuan anggaran	Kepala PPP Karimunjawa	1 Tahun (Januari - Desember 2027)

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Adanya kerusakan sarana dan prasarana produksi budidaya di loka air laut	14	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan di loka air laut	target produksi ikan tidak tercapai	Mitigasi Kemungkinan	Perbaikan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan di loka air laut	Kelapa BPPB Kelas A	Desember 2027
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan	Turunnya produksi benih ikan endemik yang dikembangkan	14	Kepala BPPB Kelas A	Turunnya produktifitas induk ikan endemik	Target produksi ikan tidak tercapai	Mitigasi Kemungkinan	Melakukan peremajaan calon induk ikan endemik lokal	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2027
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Adanya kerusakan sarana dan prasaranan budidaya ikan di loka air tawar dan payau	14	Kepala BPPB Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan di loka air tawar dan payau	Target produksi ikan tidak tercapai	Mitigasi Kemungkinan	Perbaikan sarana dan prasarana budidaya ikan di loka air tawar dan payau	Kelapa BPPB Kelas A	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen kapal yang dimiliki nelayan sudah kadaluwarsa	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Kurangnya kesadaran nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku	Mitigasi Kemungkinan	Mengajukan untuk diadakan kegiatan pengawasan dan penertiban nelayan di laut oleh instansi yang berwenang kepada Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Akses jalan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah kunjungan dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan	Mitigasi Kemungkinan	Menetapkan perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Kolam pelabuhan yang semakin dangkal	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Sedimentasi lumpur yang masuk ke kolam pelabuhan dari aliran Sungai Bongkok	Penurunan jumlah trip harian dan hasil tangkapan ikan di kawasan pelabuhan	Mitigasi Kemungkinan	Menetapkan pengerukan dan perubahan pintu masuk kolam pelabuhan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Dokumen pengembangan pelabuhan perikanan yang dimiliki masih belum lengkap	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran untuk penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan	Terhambatnya pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Mitigasi Kemungkinan	Menetapkan penyusunan dokumen pengembangan pelabuhan perikanan sebagai kebutuhan prioritas dari PPP Larangan dan akan selalu diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai usulan tersebut disetujui	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan	Tidak terselesaikan nya penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan secara tepat waktu	12	Kepala Bidang PPSDP	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masyarakat	masih terjadinya pelanggaran, kerusakan ekosistem sumberdaya ikan, konflik sosial, kerugian ekonomi	Mitigasi Dampak	melakukan identifikasi jenis pelanggaran, koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran, dan penyelesaian pelanggaran dengan mengendepankan pengenaan sanksi administratif dalam rangka pembinaan pelaku usaha/masyarakat	Kepala Bidang PPSDP	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha pergarman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/masyarakat pembudidaya air payau dan pergarman terhadap regulasi perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan	12	Kepala Bidang PPSDP	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masyarakat	Pelaku usaha/masyarakat rentan terkena sanksi, terjadi kerusakan ekosistem sumber daya ikan	Mitigasi Dampak	melakukan sosialisasi/pemberian pemahaman secara langsung (tatap muka) kepada pelaku usaha pembudidaya ikan air payau dan pergarman dengan pemilihan lokasi prioritas berdasarkan seringnya terjadi pelanggaran	Kepala Bidang PPSDP	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	13	1. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Kurangnya pemahaman masyarakat/nelayan sekitar tentang zonasi dan aturan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	Kerusakan ekosistem terumbu karang Menurunnya hasil tangkapan nelayan	Mitigasi Dampak	1. Sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkaitan, 2. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan, 3. Penguatan kegiatan pengawasan di kawasan konservasi	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Keselamatan petugas pada saat survei/monitoring di lapangan	17	1. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	1. Arus yang kencang dan gelombang yang tinggi 2. Minimnya sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja	Kecelakaan Kerja / Kematian	Mitigasi Kemungkinan	1. Pemantauan/mencari informasi kondisi cuaca sebelum kegiatan, 2. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan kerja, 3. Peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman yang cukup tinggi	16	1. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	1. Kualitas bibit yang tidak sesuai standar, 2. Metode dan waktu penanaman yang kurang tepat, 3. Jarak dan kondisi lingkungan sekitar lahan penanaman yang tidak sesuai, 4. Kegiatan pemeliharaan pasca penanaman yang tidak maksimal.	Bibit mangrove yang ditanam tidak tumbuh (mati), Bibit hilang terbawa ombak/gelombang	Mitigasi Kemungkinan	1. Pemilihan bibit mangrove yang baik dan sesuai standar, 2. Pemilihan lokasi tanam yang tepat sesuai habitatnya, 3. Mencari waktu tanam yang tepat untuk menghindari gelombang dan cuaca ekstrim, 4. Adanya masa pemeliharaan 90 hari setelah	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Seksi pengawasan	Belum optimalnya tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk memberikan efek jera	Tidak ada efek jera bagi para pelaku usaha yang melanggar jika sanksi penanganan tindak lanjut belum optimal	Mitigasi Dampak	Melaksanakn penanganan tindak lanjut pelanggaran secara cermat dan tepat serta memberikan sanksi sesuai aturan	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang semakin rusak	19	Kepala PPN Tegalsari	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPN Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	Mitigasi Kemungkinan	Menentukan kebutuhan prioritas yang harus segera terpenuhi dan menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan pada saat perubahan APBD	Kepala PPN Tegalsari	Desember 2027
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	17	Kepala PPN Tegalsari	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum	Mitigasi Kemungkinan	Sosialisasi dan monitoring serta evaluasi thd kepatuhan pelaku usaha	Kepala PPN Tegalsari	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Kapal perikanan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi tertangkap saat patroli pengawasan dan menghambat aktivitas penangkapan serta citra	13	Kepala PPP Wonokerto	Kurangnya kesadaran nelayan untuk tertib dokumen dan penggunaan API ramah lingkungan	Kapal perikanan berpotensi terkena penertiban atau penindakan saat patroli pengawasan; Menurunnya citra pelabuhan apabila masih terdapat kapal yang tidak mematuhi ketentuan perikanan	Mitigasi Kemungkinan	Sosialisasi kewajiban dokumen kapal dan aturan alat tangkap; Fasilitasi pengurusan dokumen kapal bagi nelayan; Pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Proses bongkar muat ikan di kawasan PPP Wonokerto yang tidak lancar menyebabkan mutu hasil tangkapan tidak terjaga, sehingga menurunkan nilai jual ikan dan berdampak pada pendapatan nelayan.	13	Kepala PPP Wonokerto	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bongkar muat; Penataan aktivitas bongkar muat yang belum tertib; Penanganan hasil tangkapan yang belum sesuai standar	Mutu hasil tangkapan ikan tidak terjaga; kapal nelayan tidak bisa sandar di dermaga sehingga harus sandar di dermaga lama yang tergenang rob	Mitigasi Dampak	Pembinaan penanganan ikan yang baik kepada nelayan dan pelaku usaha; Penataan dan pengaturan kegiatan bongkar muat di kawasan pelabuhan; pengusulan kelanjutan pembangunan dermaga	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Kondisi TPI Wonokerto yang kotor dan kumuh menyebabkan mutu hasil tangkapan ikan yang dilelang menjadi tidak higienis, sehingga menurunkan nilai jual dan kepercayaan pembeli.	13	Kepala PPP Wonokerto	Kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan di area TPI; Rendahnya kesadaran pedagang dan pengguna TPI dalam menjaga kebersihan; Keterbatasan sarana kebersihan dan sanitasi di kawasan TPI	Mutu dan higienitas ikan menurun; Harga jual ikan menjadi lebih rendah; Menurunnya kepercayaan pembeli terhadap kualitas ikan di TPI; Menurunnya aktivitas lelang dan daya tarik pasar ikan	Mitigasi Kemungkinan	Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pengelolaan kebersihan dan penanganan lingkungan kawasan TPI; Koordinasi dengan pengelola TPI Wonokerto terkait kebersihan lingkungan TPI Wonokerto	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di kawasan PPP Wonokerto, disertai kurangnya koordinasi antar pihak terkait, fasilitas pendukung, serta pemahaman nelayan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan kapal	13	Kepala PPP Wonokerto	Kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan dan masyarakat pelabuhan; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan kapal; Terbatasnya fasilitas pendukung keselamatan di kawasan pelabuhan; Koordinasi antar instansi	Meningkatnya potensi kecelakaan atau gangguan keselamatan kapal; Aktivitas pelabuhan menjadi kurang tertib dan aman; Menurunnya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna pelabuhan; Berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan pengguna pelabuhan.	Mitigasi Kemungkinan	Penyusunan SOP penanganan kebakaran kapal di kawasan pelabuhan; Penyediaan sarana keselamatan seperti APAR dan perlengkapan darurat lainnya; Sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan terkait keselamatan dan keamanan kapal;	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persekongkolan antara pemilik pekerjaan dengan calon penyedia jasa menyebabkan proses pemilihan tidak objektif dan berpotensi menunjuk penyedia jasa yang tidak kompeten, sehingga menurunkan kualitas hasil pekerjaan serta berdampak pada memburuknya citra Dinas	20	Kepala PPP Wonokerto	Kurangnya transparansi dalam proses pemilihan penyedia jasa; Pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa belum optimal; Adanya potensi konflik kepentingan antara pihak yang terlibat dalam proses pengadaan	Kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis; Potensi kerugian keuangan negara; Menurunnya kepercayaan publik terhadap instansi; Potensi temuan audit oleh aparat pengawas	Mitigasi Kemungkinan	'Meningkatkan transparansi proses pengadaan melalui penerapan sistem pengadaan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku; Memperkuat pengawasan internal terhadap seluruh tahapan pemilihan penyedia jasa; Menerapkan prinsip integritas dan	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Banyaknya fasilitas kepelabuhanan di PPP Wonokerto yang rusak menyebabkan sarana dan prasarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menghambat pelayanan dan aktivitas operasional pelabuhan.	13	Kepala PPP Wonokerto	Rob yang menggenangi kawasan PPP Wonokerto; usia infrastruktur dan kurangnya pemeliharaan	Aset pelabuhan tidak termanfaatkann secara optimal dan berpotensi mangkrak; Menurunnya produktivitas kawasan pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan; Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan aset; Munculnya kesan kawasan	Mitigasi Dampak	Penghapusan aset mangkrak; Melakukan pendataan dan pemetaan kondisi serta potensi pemanfaatan aset dan lahan di kawasan PPP Wonokerto; Pengusulan rehab sarpras	Kepala PPP Wonokerto	1 Tahun (2027) RTP dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2027
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Jumlah anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan terbatas	13	Kepala PPP Klidang Lor	Sarana dan prasaran pelabuhan belum lengkap	pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha terganggu	Mitigasi Dampak	Mengusulkan penambahan anggaran pada periode berikutnya	Kepala PPP Klidang Lor	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	pelayanan fungsi pemerintahan dan perusahaan belum optimal	13	Kepala PPP Klidang Lor	Jumlah Anggaran yang tersedia serta SDM yang dimiliki terbatas	pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha belum optimal	Mitigasi Dampak	Mengusulkan peningkatan anggaran dan Penambahan SDM	Kepala PPP Klidang Lor	Desember 2027
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Jumlah anggaran Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan Lainnya terbatas	14	Kepala PPP Klidang Lor	Gedung kantor dan bangunan Lainnya dalam kondisi rusak sebab anggaran terbatas	Gedung kantor dan bangunan Lainnya belum berfungsi optimal	Mitigasi Dampak	Mengusulkan penambahan anggaran pada periode berikutnya	Kepala PPP Klidang Lor	Desember 2027
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan	13	ppp tawang	ketidaksesuaian spesifikasi sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional pelabuhan,	PAD menurun	Mitigasi Dampak	peningkatan anggaran	ppp tawang	desember 2027
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	ketidakpatuhan pengguna pelabuhan terhadap peraturan yang berlaku.	10	ppp tawang	banyaknya stakeholder yang ada dikawasan PPP	overlap tupoksi	Mitigasi Dampak	sosialisasi	ppp tawang	desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	14	ppp tawang	belum adanya pengawasan pelaksanaan kegiatan secara berkala	keterlambatan pelaksanaan kegiatan	Mitigasi Dampak	perencanaan kegiatan yang matang	ppp tawang	desember 2026
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Data produksi perikanan rendah	10	Kepala PPN Tasikagung	Hasil tangkapan tidak didaratkan di PPN Tasikagung	Kebijakan pengembangan penangkapan ikan ditinjau kembali	Mitigasi Dampak	Pengajuan anggaran pemeliharaan sarpras pelabuhan	Kepala PPN Tasikagung	Semester 1
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Volume pelayanan dan jumlah kapal di kolam pelabuhan meningkat	17	Kepala PPN Tasikagung	Pelayanan sesuai standar ISO	Kapal berdesak-desakan	Mitigasi Kemungkinan	Mengusulkan pembangunan breakwater untuk memperluas kolam pelabuhan	Kepala OPD	Semester 1
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Volume pelayanan dan jumlah kapal di kolam pelabuhan meningkat	17	Kepala PPN Tasikagung	Pelayanan sesuai standar ISO	Kapal berdesak-desakan	Mitigasi Kemungkinan	Mengusulkan penambahan SDM yang kompeten dan berintegrasi	Kepala PPN	Semester 2

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Fasilitas pelabuhan banyak yang rusak dan tidak layak	13	PPP Karimunjawa	Kurangnya pemeliharaan dan faktor usia bangunan	Pelayanan pelabuhan terganggu	Berbagi	Sosialiasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan terkait pentingnya perjanjian kerja / asuransi	Kepala PPP Karimunjawa	1 Tahun (Januari - Desember 2027)
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi / SPK	13	PPP Karimunjawa	Kurangnya kesadaran nelayan terhadapnya pentingnya asuransi atau perlindungan	Nelayan tidak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami ketika bekerja	Berbagi	Sosialiasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan terkait pentingnya perjanjian kerja / asuransi	Kepala PPP Karimunjawa	1 Tahun (Januari - Desember 2027)
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut belum optimal	14	Kepala BPPB Kelas A	Terbatasnya jumlah prasarana untuk budidaya ikan di laut	Produksi budidaya ikan di laut tidak optimal	Mitigasi Kemungkinan	Memperbaiki atau menambah prasarana budidaya ikan di laut	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2027
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut belum optimal	14	Kepala BPPB Kelas A	Terbatasnya sarana untuk budidaya ikan di laut	Produksi budidaya ikan laut tidak optimal	Mitigasi Kemungkinan	Penambahan jumlah sarana budidaya ikan di laut	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar belum optimal	14	Kepala BPPB Kelas A	Terbatasnya jumlah sarana untuk budidaya ikan air payau dan tawar	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar tidak optimal	Mitigasi Kemungkinan	Menambah jumlah sarana budidaya ikan air payau dan tawar	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2027
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar belum optimal	14	Kepala BPPB Kelas A	Terbatasnya jumlah prasarana untuk budidaya ikan air payau dan tawar	Produksi budidaya ikan air payau dan tawar tidak optimal	Mitigasi Kemungkinan	Memperbaiki atau menambah jumlah prasarana budidaya ikan air payau dan tawar	Kepala BPPB Kelas A	Desember 2027
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang semakin rusak	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana di PPP Larangan	Penurunan aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan	Mitigasi Kemungkinan	Menentukan kebutuhan prioritas yang harus segera terpenuhi dan menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan pada saat perubahan APBD	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Penyewaan lahan tidak membayar retribusi pada waktu yang sudah ditetapkan	17	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Kurangnya kesadaran dari penyewaan lahan	Target retribusi dari pelayanan sewa lahan yang tidak tercapai	Mitigasi Kemungkinan	Melakukan pemberian teguran, peringatan, dan sanksi berupa pembongkaran lahan bagi penyewaan lahan yang melanggar peraturan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember 2027
Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Tidak terselesaikannya penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan secara tepat waktu	12	Kepala Bidang PPSDP	kompleksitas modus pelanggaran, keterbatasan kompetensi SDM pengawasan dan keterbatasan kewenangan	masih terjadinya pelanggaran, kerusakan ekosistem sumberdaya ikan, konflik sosial, kerugian ekonomi	Mitigasi Dampak	melakukan identifikasi jenis pelanggaran, koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran, dan penyelesaian pelanggaran dengan mengendepankan pengenaan sanksi administratif dalam rangka pembinaan pelaku usaha/masyarakat	Kepala Bidang PPSDP	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/masyarakat di perairan umum daratan terhadap regulasi perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan sektor perikanan	12	Kepala Bidang PPSDP	Banyaknya perubahan aturan perizinan berusaha di sektor kelautan perikanan dan terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pelaku usaha/masyarakat	Pelaku usaha/masyarakat rentan terkena sanksi, terjadi kerusakan ekosistem sumber daya ikan	Mitigasi Dampak	melakukan sosialisasi/pemberian pemahaman secara langsung (tatap muka) kepada pelaku usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di perairan umum daratan dengan pemilihan lokasi prioritas berdasarkan seringnya terjadi pelanggaran	Kepala Bidang PPSDP	Desember 2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Pengelolaan kawasan konservasi kurang efektif sehingga terjadi degradasi ekosistem di dalam kawasan	17	1. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	1. Alokasi anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi yang tidak memadai. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, 3. Tingginya aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.	Meningkatnya luas kawasan konservasi yang mengalami kerusakan dan terancamnya target biota dan keanekaragaman hayati laut	Mitigasi Dampak	1. Mengajukan usulan peningkatan anggaran pengelolaan kawasan konservasi. 2. Membentuk dan melatih Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) untuk memperluas jangkauan pengawasan	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Tingkat keberhasilan tumbuh (survival rate) dari kegiatan rehabilitasi rendah	16	1. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	1. Pemilihan metode yang kurang sesuai dengan karakteristik lokasi rehabilitasi. 2. Kerusakan bibit karang akibat pencemaran/sampah.	Kegiatan rehabilitasi tidak memberikan hasil yang optimal, dan target luasan rehabilitasi tidak tercapai	Mitigasi Kemungkinan	1. Menyusun SOP Penanaman yang responsif terhadap perubahan iklim, termasuk jadwal tanam yang fleksibel. 2. Berkoordinasi dengan BMKG untuk informasi cuaca real-time.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027
Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Seksi pengawasan	Masih rendahnya kepatuhan terkait kepemilikan, kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan	Mitigasi Dampak	Melaksanakan tindak lanjut pelanggaran sanksi administrasi bagi para pelaku pelanggaran secara cermat dan tepat	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya Frekuensi Operasi Pengawasan yang sesuai Target Cakupan WPPNRI yang Diawasi	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Seksi pengawasan	Biaya operasional operasi yang cenderung tinggi dan Kesiapan sarana prasarana operasi yang belum maksimal	Peningkatan potensi pelanggaran dan kerusakan SDKP di Wilayah Cakupan WPPNRI yang Diawasi	Mitigasi Dampak	Manajemen peningkatan frekuensi operasi sesuai objek dan urgensi guna optimalisasi penggunaan biaya operasi	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Masih tingginya tingkat pelanggaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Seksi pengawasan	Masih rendahnya kepatuhan terkait kepemilikan, kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi	Peningkatan potensi pelanggaran dan kerusakan SDKP di Wilayah Cakupan WPPNRI yang Diawasi	Mitigasi Dampak	Melaksanakan pengawasan usaha penangkapan ikan sesuai kewenangan provinsi	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2027

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kurangnya anggaran Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Terbatasnya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas terdiri dari 1 mobil dinas dan 3 motor dinas dalam kondisi yang tidak baik.	Penyusutan nilai aset yang berakibat kerusakan kendaraan dinas sehingga meningkatkan biaya perbaikan di masa mendatang	Mitigasi Kemungkinan	Perencanaan anggaran tahun yang akan datang dinaikkan pada biaya pemeliharaan kendaraan dinas	Wilayah Barat	1 Tahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Gedung kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Rusak akibat usia dan Cuaca ekstrim	13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Usia gedung dan kualitas bangunan yang dimakan usia serta pengaruh cuaca ekstrim	Kondisi Ruang kerja menjadi rawan sehingga kurang nyaman bagi Pegawai CDKWB dan terjadi peningkatan biaya perbaikan dimasa mendatang	Mitigasi Kemungkinan	Perencanaan anggaran tahun yang akan datang dinaikkan pada biaya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	2 bulan
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	16	Kepala CDK Wilayah Selatan	Anggaran dan SDM pengelola tidak memadai	Nilai EVIKA masih rendah	Mitigasi Dampak	Meningkatkan sinergitas dengan mitra (NGO, dinas setempat, akademisi)	Kepala CDK Wilayah Selatan	Desember 2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Rendahnya jumlah hari operasi pengawasan SDKP dengan Kapal Pengawas	14	Kepala CDK Wilayah Selatan	Biaya operasional kapal pengawas yang tinggi	Jangkauan wilayah dan kapal perikanan yang beroperasi di laut kurang terawasi	Mitigasi Dampak	Merencanakan penambahan anggaran operasi kapal pengawas	Kepala CDK Wilayah Selatan	Desember 2026